SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan PPAS dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun 2026;
c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2026

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJPD dan RPJMD.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2026 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diperlukan karena adanya :

a) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi (terkait alokasi dana transfer dan prioritas program nasional).
   Penyesuaian yang dikarenakan perubahan dana transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sehingga perlu disesuaikan dalam pelaksanaan belanjanya juga.
b) Adanya sisa SILPA Tahun Anggaran 2025 dan tambahan yang dapat dibelanjakan.
   SILPA Tahun 2025 yang masih belum digunakan sehingga menambah kemampuan anggaran yang dapat dibelanjakan.
c) Memperhatikan visi, misi, dan Program Bupati, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
d) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026.
e) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan alokasi program dan kegiatan pada hampir semua Perangkat Daerah.
   Hasil evaluasi triwulan II Tahun 2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR", Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing dan Sejahtera.**

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah "Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing SDM dalam Mendukung Pangan Nasional.". Arah kebijakan pembangunan ini dijabarkan dalam enam prioritas daerah, yaitu 1) Meningkatkan integritas kualitas SDM, 2) Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi, 3) Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan, 4) Meningkatkan kondusifitas wilayah, 5) Mengembangkan kualitas infrastruktur, dan 6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari dua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dokumen Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

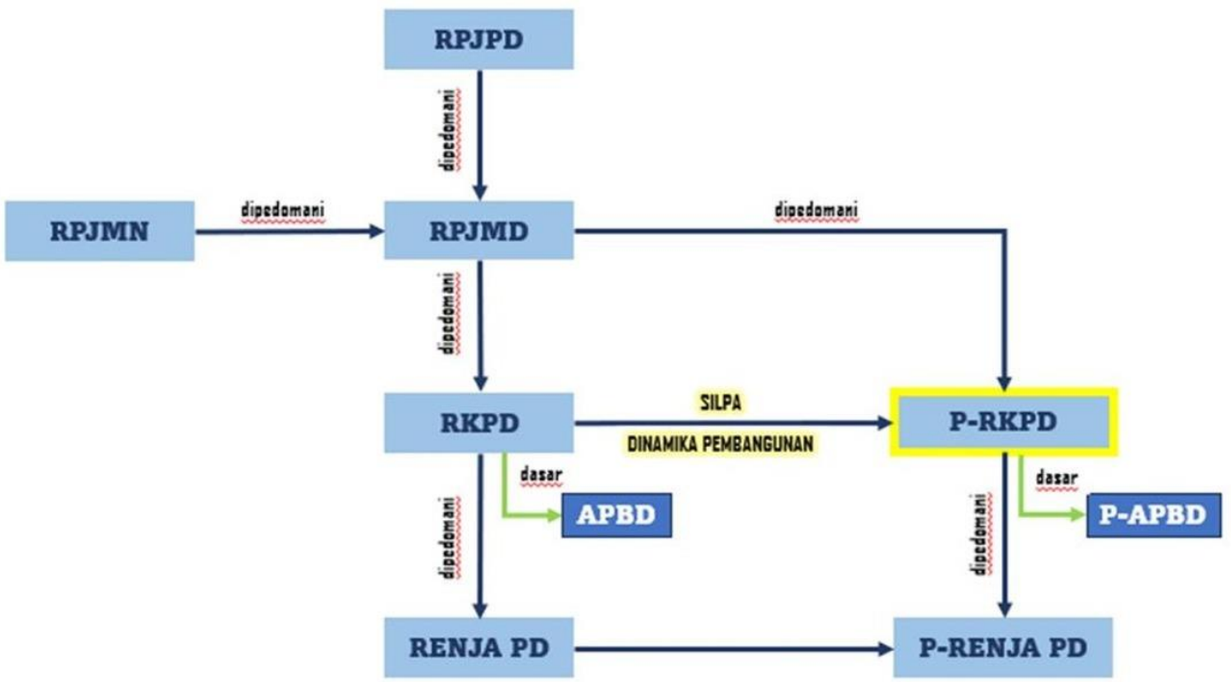
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD menjelaskan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya RKPD menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Secara substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya ditingkat pusat, provinsi maupun daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dalam rangka mengakomodir penyesuaian dalam tahap perencanaan daerah. Perubahan RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). KUPA PPAS ini akan menjadi bahan pembahasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). RKPD Perubahan yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Hubungan antar dokumen–dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2026 Triwulan II. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas.

Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2026, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga

kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih terpadu dan terarah dengan baik.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD), (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional.

Adapun tujuan penyusunannya:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349 RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, dengan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD Tahun 2026
Berisi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Berisi tentang analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup
Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2026

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dengan menghitung capaian kinerja, untuk setiap urusan. Disajikan dalam berbagai bentuk diantaranya: perbandingan Program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026; Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026; Realisasi Pencapaian Target Indikator Daerah dan Indikator Program Tahun 2026.

2.1. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran daerah, ditunjukkan dengan pencapaian indikator dari masing-masing tujuan dan sasaran, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181), secara singkat hasilnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2026			
						Target	Capaian 2025	%	Status
"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.									
1	BERINTEGRITAS Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik Misi 5: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,50	87,21	100,82	Sangat Tinggi
			Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	68,21	96,07	Sangat Tinggi
				Maturitas SPIP	level	3,250	3,13	96,31	Sangat Tinggi
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,54	4,41	97,14	Sangat Tinggi
		TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusifitas wilayah		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.873.621,10	106.656	5,69	Sangat Rendah
				Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	100,00	Sangat Tinggi
			Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,45	70,69	100,00	Sangat Tinggi
			Sasaran 3: Meningkatnya kondusifitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 Penduduk	178	NA	NA	NA
2	BERDAYA SAING Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender Misi 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,85	3,85	100,00	Sangat Tinggi
			Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi
			Sasaran 5: Meningkatnya riset dan inovasi	Kapabilitas Inovasi	Angka	3	NA	NA	NA
			Sasaran 6: Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	5,75	92,74	Sangat Tinggi
			Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,72	75,45	84,09	Tinggi

No	Visi Dan Frase Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2026			
						Target	Capaian 2025	%	Status
3	SEJAHTERA Misi 3: Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi	TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		Tingkat Kemiskinan	%	8,84	8,48	104,25	Sangat Tinggi
			Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,342	0,332	103,01	Sangat Tinggi

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2026, diolah
Catatan : Data capaian menggunakan angka Tahun 2025

Capaian pembangunan kesehatan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi umur panjang dan hidup sehat. Berbagai program kesehatan yang dilaksanakan, seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan risiko kesakitan maupun kematian. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan AHH dan menjadi bagian penting dalam pencapaian IPM Kabupaten Karanganyar.

Peningkatan Angka Harapan Hidup memperbesar Indeks Kesehatan, yang selanjutnya berkontribusi langsung pada pembentukan IPM gabungan. Kenaikan konsisten pada Angka Harapan Hidup membuktikan bahwa intervensi pembangunan tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi atau pendidikan, tetapi juga pada investasi kualitas hidup dan ketahanan hidup masyarakat.

2.2. Kesesuaian Program RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

a. Kesesuaian Program

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan di daerah maka harus ada kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPJMD dan RKPD dimaksudkan untuk mengetahui program yang terdapat dalam RKPD sesuai dengan program yang terdapat dalam RPJMD. Sedangkan Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RKPD dan APBD dimaksudkan untuk mengetahui program yang terdapat dalam APBD sesuai dengan program yang terdapat dalam RKPD. Berikut kesesuaian program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 per Urusan:

Tabel 2.2

Tabel Kesesuaian Program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
I	***URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
II	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	ROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENATAAN DESA	2	PROGRAM PENATAAN DESA	2	PROGRAM PENATAAN DESA
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				

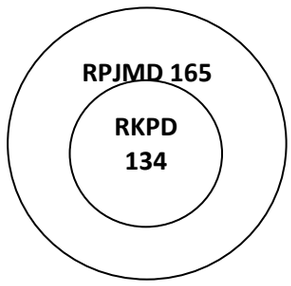
RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
III	***URUSAN PEMERINTAH PILIHAN***				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
IV	***UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH***				
4.01	**Unsur Sekretariat Daerah**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.02	**Unsur Sekretariat DPRD**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
5.01	**PERENCANAAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02	**KEUANGAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	**KEPEGAWAIAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
2	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
VI	***UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH***				
6.01	**PENGAWASAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

RPJMD 2025-2029		RKPD Tahun 2026		APBD Tahun 2026	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
VII	***UNSUR KEWILAYAHAN***				
7.01	**Kecamatan**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
VIII	***UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sumber : Bapperida, 2026

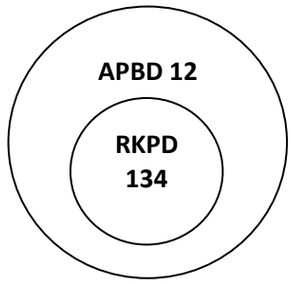
Berdasarkan data persandingan diatas, terdapat 165 program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, 134 Program dalam RKPD Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program dalam RKPD Tahun 2026, ada 31 program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang tidak digunakan/dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2026, sehingga kesesuaiannya sebesar 81,21 %. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Kesesuaian Program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) Program terdapat 134 Program dalam RKPD Tahun 2026 dan 146 Program dalam APBD Tahun

2026, ada 12 Program baru yang muncul di APBD 2026, sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Kesesuaian Program dalam RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

b. Kesesuaian Dana (Pagu Anggaran)

Pagu Anggaran Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan APBD 2026, dapat terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja di setiap Perangkat Daerah, terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026 sebesar 0,65 % dan terdapat kenaikan pagu anggaran di APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 12.670.325.650,00, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Tabel Kesesuaian Pagu Anggaran RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	747.513.554.013,00	752.312.954.013,00	0,64
2.	Dinas Kesehatan	369.315.252.243,00	381.955.292.243,00	3,42
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	107.038.606.399,00	117.658.606.399,00	9,92
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.793.823.799,00	9.190.479.799,00	4,51
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.066.129.699,00	4.412.579.699,00	8,52
6.	Dinas Sosial	6.707.839.679,00	8.307.149.679,00	23,84
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.977.178.933,00	12.263.428.933,00	2,39
8.	Dinas Lingkungan Hidup	11.751.416.781,00	13.281.416.781,00	13,02
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.570.364.028,00	5.638.964.028,00	1,23
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.113.566.462,00	16.724.966.462,00	3,79
11.	Dinas Perhubungan	39.344.124.291,00	40.276.424.291,00	2,37
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.674.770.130,00	8.204.053.130,00	6,90
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	3.260.171.452,00	9.848.121.452,00	202,07
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.772.754.833,00	6.014.074.833,00	4,18
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.869.575.283,00	4.928.375.283,00	1,21
16.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11.103.731.891,00	17.327.081.891,00	56,05
17.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	18.064.860.990,00	32.571.380.990,00	80,30
18.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	13.261.603.909,00	14.912.877.909,00	12.45
19.	Sekretariat Daerah	44.031.047.622,00	39.352.363.122,00	-10.63
20.	Sekretariat DPRD	48.610.808.483,00	62.676.958.483,00	28,94
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6.051.765.175,00	7.101.765.175,00	17,35
22.	Badan Keuangan Daerah	449.118.748.763,00	363.997.219.763,00	-18,95
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.600.925.883,00	8.223.425.883,00	8,19

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	%
24.	Inspektorat Daerah	11.903.559.095,00	11.903.559.095,00	0,00
25.	Kecamatan Jatipuro	2.277.202.090,00	2.413.952.090,00	6,01
26.	Kecamatan Jatiyoso	2.080.374.672,00	2.157.324.672,00	3,70
27.	Kecamatan Jumantono	2.162.272.766,00	2.244.122.766,00	3,79
28.	Kecamatan Jumapolo	1.938.349.768,00	2.017.749.768,00	4,10
29.	Kecamatan Matesih	2.292.583.574,00	2.376.883.574,00	3,68
30.	Kecamatan Tawangmangu	7.523.551.224,00	7.882.751.224,00	4,77
31.	Kecamatan Ngargoyoso	2.089.966.722,00	2.174.266.722,00	4,03
32.	Kecamatan Karangpandan	2.138.776.521,00	2.223.076.521,00	3,94
33.	Kecamatan Karanganyar	23.000.381.922,00	26.789.681.922,00	16,47
34.	Kecamatan Tasikmadu	2.303.863.498,00	2.385.713.498,00	3,55
35.	Kecamatan Jaten	2.337.798.547,00	2.419.648.547,00	3,50
36.	Kecamatan Colomadu	2.645.161.800,00	2.809.361.800,00	6,21
37.	Kecamatan Gondangrejo	2.389.692.867,00	2.478.892.867,00	3,73
38.	Kecamatan Mojogedang	1.791.130.009,00	1.868.080.009,00	4,30
39.	Kecamatan Kebakkramat	2.116.678.476,00	2.196.078.476,00	3,75
40.	Kecamatan Kerjo	2.154.548.993,00	2.313.848.993,00	7,39
41.	Kecamatan Jenawi	2.036.291.147,00	2.120.591.147,00	4,14
42.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.649.499.476,00	12.784.378.476,00	67,13
	JUMLAH	**2.030.444.303.908,00**	**2.030.739.922.408,00**	**0,01**

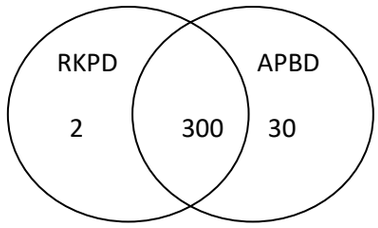
Sumber : Bapperida dan BKD Kabupaten Karanganyar, 2026

Deviasi pagu Dinas Kesehatan sebesar 3,42% antara RKPD dan APBD Tahun 2026 (semula) disebabkan oleh penyesuaian alokasi anggaran pada tahap penyusunan dan penetapan APBD sebagai bagian dari proses penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah serta hasil pembahasan penganggaran. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip *money follows program*, yaitu pengalokasian anggaran diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan. Pengalokasian anggaran difokuskan secara presisi pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung (outcome/benefit) terhadap indikator kinerja utama (IKU) sektor kesehatan, khususnya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dan penurunan stunting.

Selanjutnya, perbedaan antara pagu RKPD dan APBD akan dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data sebagai dasar pemantauan pada evaluasi triwulan berikutnya.

c. Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

Penyusunan APBD Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2026 terdapat total 352 kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dan 380 kegiatan dalam APBD Tahun 2026. Terdapat dua kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2026. Masih ada 30 kegiatan di APBD Tahun 2026 yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2026. . Kegiatan yang ada di APBD Tahun 2026 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2026 akan diperbaiki di Perubahan RKPD 2026. sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.3
Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

Tabel 2.4
Tabel Kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD Tahun 2026

No	Kegiatan	Perangkat Daerah
1.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida, 2026

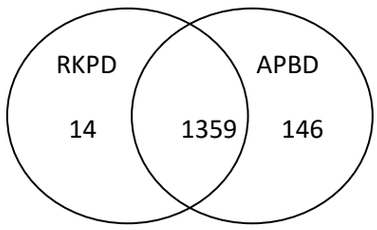
Tabel 2.5
Tabel Kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2026

No	Kegiatan	Perangkat Daerah
1.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Pendataan Penyediaan dan REHABILITASIi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan REHABILITASIi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13.	Pembangunan dan REHABILITASIi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16.	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
18.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
19.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
27.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Kegiatan	Perangkat Daerah
28.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
29.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
30.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja

Sumber : Bapperida, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui jumlah sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 sejumlah 1373 sub kegiatan, dan 1505 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2026, dimana terdapat 14 sub kegiatan di RKPD Tahun 2026 yang tidak dilaksanakan atau dianggarkan dalam APBD Tahun 2026 dan 146 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2026 yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2026. Sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2026 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2026 akan diperbaiki di Perubahan RKPD 2026. Secara singkat dapat digambarkan dalam diagram venn berikut :



Gambar 2.4
Kesesuaian Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun 2026

d. Evaluasi Kinerja (Realisasi dan Status) Berdasarkan Urusan

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran urusan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
(3)	66% ≤ 75%	Sedang (S)
(4)	51% ≤ 65%	Rendah (R)
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah lima indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun , satu indikator capaian sangat tinggi dan satu indikator capaian sedang. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	89,96	NA	NA	NA	90,25	NA	NA
		Angka Partisipasi Sekolah Dasar	%	99,43	NA	NA	NA	99,50	NA	NA
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	98,80	NA	NA	NA	99,00	NA	NA
		Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	%	63,50	NA	NA	NA	66,00	NA	NA
2	PROGRAM	Persentase guru (PAUD,	%	81,80	90,60	110,76	Sangat	82,80	109,42	Sangat

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan dasar, dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan) yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan					Tinggi			Tinggi
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta yang Disetujui (PAUD, SD, SMP, Kesetaraan)	%	90,50	70,00	77,35	Sedang	91,50	76,50	Tinggi
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,80	NA	NA	NA	76,4	NA	NA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada tahun 2026 dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 18 (delapan belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah delapan indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun , tiga indikator capaian sangat tinggi, satu indikator capaian sedang dan enam indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan STBM	%	80,00	78,00	97,50	Sangat Tinggi	100,00	78,00	Tinggi
		Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	ratio	1,00	1,10	110	Sangat Tinggi	1,00	110	Sangat Tinggi
		Indek pencapaian SPM ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, anak sekolah	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	71,00	73,70	103,80	Sangat Tinggi	75,00	98,27	Sangat Tinggi
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	5,00	3,07	103,80	Sangat Tinggi	5,00	103,80	Sangat Tinggi
		Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	%	46,00	28,33	61,59	Rendah	46,00	48,08	Sangat Rendah
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,00	47,60	49,07	Sangat Rendah	99,00	49,07	Sangat Rendah
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	80,10	81,05	101,19	Sangat Tinggi	80,50	100,68	Sangat Tinggi
		Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	%	87,00	88,24	101,43	Sangat Tinggi	91,00	96,97	Sangat Tinggi
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi	96,00	88,54	Tinggi
		Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	%	66,10	66,10	100,00	Sangat Tinggi	80,00	86,63	Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	2,62	2,63	100,38	Sangat Tinggi	2,64	99,62	Sangat Tinggi
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.	%	58,00	10,00	17,24	Sangat Rendah	70,00	14,28	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
	MAKANAN MINUMAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,00	100,00	119,05	Sangat Tinggi	86,00	116,28	Sangat Tinggi
		Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	34,00	10,00	29,41	Sangat Rendah	50,00	20,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	NA	NA	NA	80,00	NA	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2026

Indikator Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat, berstatus sangat rendah pada semester I hal ini disebabkan karena pada semester I banyak pelaku usaha yang belum memenuhi syarat (biasanya pelaku usaha baru).

Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada semester II adalah dengan melakukan pendampingan *corrective action and preventive action* (CAPA) untuk pelaku usaha industri rumah tangga pangan dengan harapan terjadi peningkatan persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.

Untuk Indikator Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), capaian semester I baru 10% (Persentase capaian sebesar 33,33%) masih sangat rendah dikarenakan pendataan dilakukan pada semester II sekaligus untuk melakukan pemetaan permasalahan pada Survei Mawas Diri (SMD). Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada semester II untuk mempercepat pendataan PHBS.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun , dan enam indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	77,00	76,50	99,35	Sangat Tinggi	79,00	96,84	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,50	99,40	99,90	Sangat Tinggi	99,90	99,50	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,40	99,40	100,00	Sangat Tinggi	99,80	99,60	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun	%	35,35	35,35	100,00	Sangat Tinggi	36,46	96,96	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	23,81	NA	NA	NA	24,57	NA	NA
		Persentase Tingkat Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan	%	65,00	59,64	91,75	Sangat Tinggi	70,00	85,20	Tinggi
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara	%	26,41	NA	NA	NA	9,00	NA	NA
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	85,30	85,30	100,00	Sangat Tinggi	85,30	100,00	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	NA	NA	NA	76	NA	NA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun , dan dua indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan REHABILITASIi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	59,67	58,73	98,42	Sangat Tinggi	92,85	63,25	Rendah
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan RTLH	%	96,96	97,00	100,04	Sangat Tinggi	98,64	98,34	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	65,60	NA	NA	NA	65,80	NA	NA

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	21,00	NA	NA	NA	49,00	NA	NA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 5 (lima) program terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dua indikator capaian sangat tinggi, dua indikator capaian sedang, satu indikator capaian rendah dan satu indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Linmas yang dibina	%	0,11	NA	NA	NA	0,09	NA	NA
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (*response time)* penanganan kebakaran	Menit	15,00	7,8	52,00	Rendah	15,00	52,00	Rendah
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,30	NA	NA	NA	75	NA	NA
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	70,00	70,00	Sedang	100,00	70,00	Sedang
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	70,00	70,00	Sedang	100,00	70,00	Sedang
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	NA	NA	NA	73,8	NA	NA

Sumber : SATPOLPP dan BPBD Kabupaten Karanganyar, 2026

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 (lima) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah satu indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat sedang dan lima indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	69,00	69,00	Sedang	100,00	69,00	Sedang
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	20,00	20,00	Sangat Rendah	100,00	20,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
		Persentase PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	3,98	1,33	33,42	Sangat Rendah	4,38	30,37	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	25,00	25,00	Sangat Rendah	100,00	25,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,50	NA	NA	NA	73,5	NA	NA

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2026

Terkait pelaksanaan SPM bidang sosial, sudah dilakukan evaluasi dan penyesuaian untuk kinerja dan pagu anggaran guna memastikan target SPM bidang sosial dapat tercapai. penyesuaian dilakukan seperti melakukan penambahan pagu anggaran yang kurang setelah melihat capaian di semester 1, melakukan pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk memastikan kinerja semua aspek SPM dapat tercapai. Evaluasi dilakukan untuk memastikan SPM untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, PGOT dan korban bencana alam dan sosial mendapatkan standar pelayanan minimum.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah semua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen kebijakan tenaga kerja yang disusun (RTK Makro dan RTK Mikro)	Dokumen RTK Mikro	1	NA	NA	NA	1	NA	NA
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	33,00	NA	NA	NA	45,00	NA	NA
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,00	NA	NA	NA	85,00	NA	NA
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA

Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat tinggi, satu indikator capaian rendah dan dua indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	8,90	NA	NA	NA	9,30	NA	NA
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	4,18	2,10	50,24	Rendah	4,15	50,60	Rendah
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	3,30	0,03	1,00	Sangat Rendah	6,20	0,53	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	45,23	NA	NA	NA	54,76	NA	NA
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Per 100.000 penduduk	7,28	3,30	45,33	Sangat Rendah	7,25	45,52	Sangat Rendah
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,75	NA	NA	NA	73	NA	NA

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2026

9. Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena

dihitung akhir tahun, dan satu indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/ kapita/ hari	64,20	NA	NA	NA	65,00	NA	NA
		Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kapita/ hari	2201,80	NA	NA	NA	2202,50	NA	NA
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	2,78	NA	NA	NA	2,70	NA	NA
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang sudah diterbitkan	sertifikat	176,00	159,00	90,34	Sangat Tinggi	258,00	61,63	Rendah

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

10. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah dua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dan satu indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan	1,00	NA	NA	NA	1,00	NA	NA
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemda yang meimiliki sertifikat	%	50,00	NA	NA	NA	70,00	NA	NA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2026

11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah lima indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dua indikator capaian sangat tinggi, satu indikator capaian tinggi dan dua indikator capaian rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100,00	80,00	80,00	Tinggi	100,00	80,00	Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	%	65,62	37,5	57,15	Rendah	79,75	47,02	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan ruang terbuka hijau	Ha	3.982,75	3.982,55	99,99	Sangat Tinggi	3.983,55	99,97	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	%	78,00	NA	NA	NA	80,00	NA	NA
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	77,5	50	64,52	Rendah	78,50	63,69	Rendah
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	35,00	NA	NA	NA	75,00	NA	NA
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	%	55,00	NA	NA	NA	75,00	NA	NA
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan sampah	%	3,50	NA	NA	NA	5,50	NA	NA
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,7	NA	NA	NA	76,5	NA	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2026

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) program terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tujuh indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dan satu indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	%	99,55	NA	NA	NA	99,60	NA	NA
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,35	NA	NA	NA	69,55	NA	NA
		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99,24	NA	NA	NA	99,28	NA	NA
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
		dilaporkan								
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase tertib pelaksanaan pelayanan adminduk di desa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	%	37,50	NA	NA	NA	47,50	NA	NA
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen penyajian data kependudukan	Buku	2,00	1,00	50,00	Sangat Rendah	2,00	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	NA	NA	NA	71,70	NA	NA

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 2026

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah enam indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dua indikator capaian sangat tinggi dan satu indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	91,40	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
		Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan Sapras	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	89,50	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki dokumen RPJMDes, APBDes, dan RKPDes yang mendukung pencapaian prioritas daerah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib administrasi	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
		Persentase desa memiliki BUMDes	%	98,77	100,00	101,25	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
		Persentase desa dengan infrastuktur baik melalui TMMD	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	NA	NA	NA	73,00	NA	NA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2026

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah lima indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dua indikator capaian sangat tinggi dan satu indikator capaian sedang. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4,30	NA	NA	NA	4,10	NA	NA
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,50	69,00	97,87	Sangat Tinggi	71,50	96,50	Sangat Tinggi
		Persentase Kampung KB Mandiri	%	30,00	21,47	71,57	Sedang	33,80	63,52	Rendah
		Kelahiran Tidak Diinginkan	%	9,60	NA	NA	NA	8,50	NA	NA
		Demand Satisfied	%	89,30	NA	NA	NA	91,70	NA	NA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	93,50	96,40	103,10	Sangat Tinggi	95,00	101,47	Sangat Tinggi
		Indeks Lansia Berdaya	Angka	56,50	NA	NA	NA	58,40	NA	NA
		Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	90,90	NA	NA	NA	93,10	NA	NA

Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2026

15. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dan satu indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,57	NA	NA	NA	53,77	NA	NA
		Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	75,30	NA	NA	NA	75,60	NA	NA
		Persentase terminal kondisi baik	%	48,30	60,41	125,07	Sangat Tinggi	49,50	122,04	Sangat Tinggi
		Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	85,00	NA	NA	NA	87,00	NA	NA
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	NA	NA	NA	72,35	NA	NA

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2026

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	4,00	NA	NA	NA	5,00	NA	NA

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	5,00	NA	NA	NA	5,00	NA	NA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,5	NA	NA	NA	75,5	NA	NA

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

Transformasi digital pemerintahan memasuki fase baru yang tidak lagi berorientasi semata pada pemenuhan tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi diarahkan pada pencapaian kinerja pemerintahan digital yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menetapkan transformasi digital sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sekaligus mengamanatkan perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 memberikan penegasan kepada seluruh instansi pemerintah mengenai pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan Pemerintah Digital pada Tahun 2025 sebagai penguatan implementasi SPBE sekaligus masa transisi menuju pengukuran kinerja melalui Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Surat edaran tersebut menandai perubahan fokus evaluasi dari penilaian aspek kematangan proses menuju pengukuran capaian transformasi digital yang menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan tata kelola pemerintahan.

Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) diharapkan menjadi instrumen yang lebih komprehensif dalam mengukur keberhasilan transformasi digital nasional karena tidak hanya menilai kesiapan tata kelola, manajemen, dan teknologi, tetapi juga tingkat integrasi layanan, interoperabilitas data, pemanfaatan platform digital bersama, keamanan informasi, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, serta dampak digitalisasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian strategi transformasi digital secara bertahap melalui penguatan tata kelola pemerintahan digital, percepatan integrasi layanan dan data, optimalisasi arsitektur SPBE, pengembangan talenta digital, serta peningkatan kolaborasi lintas instansi. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan capaian indeks, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan digital yang adaptif, terintegrasi, berpusat pada pengguna (user-centric), serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, transformasi dari Evaluasi SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) harus dipandang sebagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia, yaitu dari orientasi kepatuhan (*compliance*) menuju orientasi hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), sehingga digitalisasi benar-benar menjadi pengungkit peningkatan kinerja pemerintahan, daya saing bangsa, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

17. Urusan Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui 8 (delapan) program, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah dua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, tiga indikator capaian sangat tinggi dan tiga indikator capaian tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	13,00	13,00	100,00	Sangat Tinggi	21,00	61,90	Rendah
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	32,00	26,00	81,25	Tinggi	44,00	59,09	Rendah
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	28,80	22,00	76,39	Tinggi	29,00	75,86	Tinggi
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	37,00	35,00	94,59	Sangat Tinggi	47,00	74,47	Sedang
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	64,87	NA	NA	NA	65,00	NA	NA
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	26,87	20,22	75,25	Tinggi	26,91	75,14	Tinggi
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	11,66	32,87	281,90	Sangat Tinggi	11,70	280,94	Sangat Tinggi
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,50	NA	NA	NA	72,00	NA	NA

Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

18. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dan dua indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan LKPM	%	52,00	68,14	131,05	Sangat Tinggi	60,00	113,57	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	NA	NA	NA	75	NA	NA

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2026

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah satu indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dan dua indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	40,00	NA	NA	NA	60,00	NA	NA
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2026

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengarahkan seluruh program kepemudaan untuk mendukung Prioritas Daerah 1 (Peningkatan Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia). Pelaksanaan program dituntut tidak sekadar rutinitas kegiatan, melainkan berorientasi pada hasil pembangunan yang terukur.

Intervensi Kegiatan terhadap Outcome Kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain:

a. Jambore Pemuda & Penguatan Mental Pemuda
   Membentuk karakter unggul, ketahanan mental, dan integritas moral. Berkontribusi pada penguatan domain Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda serta menekan perilaku destruktif remaja.
b. Pemuda Pelopor
   Mencetak *role model* kepemimpinan di tingkat desa yang inovatif dan solutif. Menguatkan kepemimpinan sosial dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.
c. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
   Mendorong kemandirian ekonomi dan mencetak wirausaha muda produktif. Berdampak langsung pada peningkatkan domain Lapangan Kerja dan Kewirausahaan serta menekan tingkat pengangguran pemuda.

Keberhasilan penajaman outcome pembangunan keolahragaan yang mencapai cakupan pembinaan sebesar 100% terbukti secara terukur melalui

lonjakan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Karanganyar, dari 0,346 pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 0,442 pada tahun 2025.

Capaian positif ini disokong langsung oleh peningkatan prestasi olahraga daerah, yang mencatatkan kenaikan raihan dari 83 medali pada tahun 2024 menjadi 92 medali pada tahun 2025, serta berhasil mencetak 16 atlet berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional.

Keberhasilan pembinaan tersebut berjalan linier dengan optimalisasi infrastruktur pendukung melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan, antara lain:

a. Kawasan olahraga Raden Mas Said
   Pelaksanaan pekerjaan pemasangan sistem penerangan/lampu lapangan sepak bola, pembenahan dan peningkatan kualitas rumput/drainase lapangan, penyediaan *bench* pemain, serta renovasi GOR dan Lapangan Tenis.
b. Stadion 45 Karanganyar
   Peningkatan kapasitas dan kenyamanan tribun bagian timur guna mendukung penyelenggaraan event olahraga daerah.

20. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator kinerja Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi. Capaian indikator kinerja tersebut di Semester I Tahun 2026 adalah belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Angka	2,92	NA	NA	NA	2,96	NA	NA

Sumber : Dinas Komunikasi da Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

21. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator kinerja adalah Tingkat keamanan siber. Capaian indikator kinerja tersebut di Semester I Tahun 2026 adalah belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Program Urusan Persandian Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan siber	Nilai	3	NA	NA	NA	3	NA	NA

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2026

22. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah semua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	55,00	NA	NA	NA	75,00	NA	NA
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	85,00	NA	NA	NA	90,00	NA	NA
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang teregistrasi/tercatat	%	45,00	NA	NA	NA	70,00	NA	NA
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	55,00	NA	NA	NA	80,00	NA	NA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2026

23. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan Kebudayaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah semua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk	%	90,00	NA	NA	NA	94,00	NA	NA
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi	Naskah	6,00	NA	NA	NA	10,00	NA	NA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	NA	NA	NA	72,8	NA	NA

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2026

24. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah semua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30

Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	100,00	NA	NA	NA	100	NA	NA
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang di kelola dan dilestarikan	%	100,00	NA	NA	NA	100	NA	NA

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2026

C. Urusan Pilihan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah semua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1.948.990	NA	NA	NA	1.964.630	NA	NA
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	%	35,29	NA	NA	NA	50,00	NA	NA
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	%	30,00	NA	NA	NA	50,00	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

26. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah lima indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32

Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Tamu wisatawan	Orang	5.850.000	NA	NA	NA	6.050.000	NA	NA
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	31,58	NA	NA	NA	33,58	NA	NA
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	jumlah usaha ekraf yang terdaftar HAKI	Unit	77,00	NA	NA	NA	117,00	NA	NA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih ketrampilan	%	14,50	NA	NA	NA	15,50	NA	NA
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	NA	NA	NA	76	NA	NA

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2026

27. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah lima belas indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, tiga indikator capaian sangat tinggi, satu indikator capaian sedang, tiga indikator capaian rendah dan sembilan

indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)								
		1. Padi	Ton	344032	156802	45,58	Sangat Rendah	344049	45,58	Sangat Rendah
		2. Jagung	Ton	27320	19772	72,37	Sedang	27352	72,29	Sedang
		3. Kacang Tanah	Ton	3215	1165	36,24	Sangat Rendah	3228	36,09	Sangat Rendah
		4. Ubi Kayu	Ton	74570	8942	11,99	Sangat Rendah	74560	11,99	Sangat Rendah
		5. Ubi Jalar	Ton	38860	23411	60,24	Rendah	38890	60,20	Rendah
		Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)								
		1. Cabai besar	Kuintal	28450	16926	59,49	Rendah	28480	59,43	Rendah
		2. Cabai rawit	Kuintal	8255	4841	58,64	Rendah	8280	58,47	Rendah
		3. Bawang Merah	Kuintal	50572	54839	108,44	Sangat Tinggi	50590	108,40	Sangat Tinggi
		4. Bawang Putih	Kuintal	24475	155	0,63	Sangat Rendah	24490	0,63	Sangat Rendah
		5. Alpukat	Kuintal	96496	35987	37,29	Sangat Rendah	96790	37,18	Sangat Rendah
		6. Duku	Kuintal	4104	7302	177,92	Sangat Tinggi	4300	169,81	Sangat Tinggi
		7. Durian	Kuintal	117180	48903	41,73	Sangat Rendah	117462	41,63	Sangat Rendah
		8. Jambu Biji	Kuintal	4230	4035	95,39	Sangat Tinggi	4270	94,50	Sangat Tinggi
		9. Pisang	Kuintal	170280	44650	26,22	Sangat Rendah	170310	26,22	Sangat Rendah
		10. Tanaman Hias (Krisan)	Buah	1247460	65200	5,23	Sangat Rendah	1247500	5,23	Sangat Rendah
		11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	Kuintal	5745	973	16,94	Sangat Rendah	5755	16,91	Sangat Rendah
		Angka produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao)								
		1.Tembakau	Ton	255,36	NA	NA	NA	310,39	NA	NA
		2. Kopi	Ton	202,56	NA	NA	NA	235,69	NA	NA
		3.Teh	Ton	4,80	NA	NA	NA	5,2	NA	NA
		4. Cengkeh	Ton	42,30	NA	NA	NA	52,15	NA	NA
		5. Kelapa	Ton	484,26	NA	NA	NA	588,61	NA	NA
		6. Kakao	Ton	27,92	NA	NA	NA	33,95	NA	NA
		Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)								
		1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Ekor	55707	NA	NA	NA	56270	NA	NA
		2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Ekor	154338	NA	NA	NA	155887	NA	NA
		3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)	Ekor	12639740	NA	NA	NA	12766611	NA	NA
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam	%	28,58	NA	NA	NA	28,62	NA	NA

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
		keadaan baik								
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-2,04	NA	NA	NA	-12,82	NA	NA
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	%	100,00	NA	NA	NA	100	NA	NA
		Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani	%	100,00	NA	NA	NA	100	NA	NA
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	16,50	NA	NA	NA	19	NA	NA
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,65	NA	NA	NA	75,5	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2026

4. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	%	35	NA	NA	NA	55	NA	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2026

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	2	100	Sangat Tinggi	2	100	Sangat Tinggi

Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

6. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) program, terdiri dari 7 (Tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase penerbitan ijin usaha pedagangan	%	76,00	NA	NA	NA	80,00	NA	NA
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarpras perdagangan sesuai standar (SNI)	%	22,00	NA	NA	NA	24,00	NA	NA
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	USD$	159500000	NA	NA	NA	170500000	NA	NA
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ukur Takar Timbang (UTTP) ditera dan tera ulang	%	72,00	NA	NA	NA	80,00	NA	NA
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasaran	%	77,00	NA	NA	NA	85,00	NA	NA
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,1	NA	NA	NA	73,9	NA	NA

Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

7. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah dua indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Program Urusan Perindustrian Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang dibina	Sentra	3	NA	NA	NA	4	NA	NA
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase penerbitan izin usaha industri	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar SIINAS	%	9,59	NA	NA	NA	13,91	NA	NA

Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2026

8. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	2	NA	NA	NA	2	NA	NA

Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2026

D. Urusan Unsur Pendukung

a. Unsur Sekretariat Daerah

Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, dua indikator capaian sangat tinggi dan dua indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	100,00	100,50	Sangat Tinggi	99,50	100,50	Sangat Tinggi
		Nilai LPPD	nilai	3,60	NA	NA	NA	3,66	NA	NA
		Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan	%	100,00	44,00	44,00	Sangat Rendah	100,00	44,00	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyerapan APBD	%	94,20	43,37	46,04	Sangat Rendah	95,00	45,65	Sangat Rendah
		ROA (RETURN OF ASET) BUMD	%	1,87	1,82	97,33	Sangat Tinggi	2,10	86,67	Tinggi
		Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100	NA	NA	NA	100	NA	NA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,00	NA	NA	NA	74,40	NA	NA

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

b. Unsur Sekretariat DPRD

Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD dilaksanakan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah satu indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100,00	47,72	47,72	Sangat Rendah	100,00	47,72	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,70	NA	NA	NA	72.40	NA	NA

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, 2026

E. Urusan Unsur Penunjang

9. Urusan Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Perencanaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun , dua indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,75	100,00	110,19	Sangat Tinggi	90,95	109,95	Sangat Tinggi
		Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	Angka	40,00	NA	NA	NA	42,00	NA	NA
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	Angka	40,00	NA	NA	NA	42,00	NA	NA
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	40,00	NA	NA	NA	42,00	NA	NA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	NA	NA	NA	75,00	NA	NA

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

10. Urusan Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Keuangan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, empat indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan APBD	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
		Persentase realisasi anggaran	%	100,00	38,8	38,80	Sangat Rendah	100,00	38,80	Sangat Rendah
		Persentase pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	51,00	NA	NA	NA	53,00	NA	NA
		Persentase piutang pajak yang tertagih	%	91,20	NA	NA	NA	91,6	NA	NA
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,00	NA	NA	NA	78	NA	NA

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

11. Urusan Kepegawaian

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Kepegawaian dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah satu indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sedang dan satu indikator capaian rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	92,00	66,00	71,74	Sedang	95,00	69,47	Sedang
		Tingkat kinerja ASN	%	95,00	58,00	61,05	Rendah	95,00	61,05	Rendah
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	NA	NA	NA	74	NA	NA

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2026

12. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	27,00	34,00	125,93	Sangat Tinggi	31,00	109,68	Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2026

13. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Riset dan Inovasi, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%	34,00	NA	NA	NA	42,00	NA	NA

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

14. Pengawasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yang terdiri dari 5 (lima)

indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah empat indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat tinggi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	95,30	96,30	101,05	Sangat Tinggi	96,30	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	59,00	NA	NA	NA	59,00	NA	NA
		Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	7,00	NA	NA	NA	11,00	NA	NA
		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Angka	35,00	NA	NA	NA	39,00	NA	NA
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	NA	NA	NA	74	NA	NA

Sumber : Inspektorat Kabupaten Karanganyar, 2026

15. Urusan Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 17 kecamatan melalui 6 (enam) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Keenam program tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Program Kecamatan Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
7.1	**Kec. JATIPURO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	80	80,00	Tinggi	100	80,00	Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	33	33,00	Sangat Rendah	100	33,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	60	60,00	Rendah	100	60,00	Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,45	NA	NA	NA	71	NA	NA
7.2	**Kec. JATIYOSO**									

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	60	60,00	Rendah	100	60,00	Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,2	NA	NA	NA	74	NA	NA
7.3	**Kec. JUMANTONO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	75	75,00	Sedang	100	75,00	Sedang
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	35	35,00	Sangat Rendah	100	35,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,75	NA	NA	NA	69,15	NA	NA
7.4	**Kec. JUMAPOLO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	96	50	52,08	Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20	NA	NA	NA	71,60	NA	NA
7.5	**Kec. MATESIH**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,35	NA	NA	NA	70,55	NA	NA
7.6	**Kec. TAWANGMANGU**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	83,5	100	119,76	Sangat Tinggi	83,9	119,19	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	60	60,00	Rendah	100	60,00	Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	70	70,00	Sedang	100	70,00	Sedang
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,4	NA	NA	NA	73,8	NA	NA
7.7	**Kec. NGARGOYOSO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,55	NA	NA	NA	72,25	NA	NA
7.8	**Kec. KARANGANYAR**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	40	42,11	Sangat Rendah	98	40,82	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,95	NA	NA	NA	71,40	NA	NA
7.9	**Kec. KARANGPANDAN**									

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	80	80,00	Tinggi	100	80,00	Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	60	60,00	Rendah	100	60,00	Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,95	NA	NA	NA	75,25	NA	NA
7.10	**Kec.TASIKMADU**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	72	72,00	Sedang	100	72,00	Sedang
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	11	11,00	Sangat Rendah	100	11,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	12,14	12,14	Sangat Rendah	100	12,14	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	NA	NA	NA	73,4	NA	NA
7.11	**Kec.JATEN**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100,00	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,45	NA	NA	NA	73,4	NA	NA
7.12	**Kec. COLOMADU**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	90	50	55,56	Rendah	90	55,56	Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	30	30,00	Sangat Rendah	100	30,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	100	50,00	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,8	NA	NA	NA	72.90	NA	NA
7.13	**Kec. GONDANGREJO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100,00	4,17	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100,00	4,17	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100,00	4,17	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	2,08	2,08	Sangat Rendah	100,00	2,08	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100,00	4,17	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,60	NA	NA	NA	72,50	NA	NA
7.14	**Kec. MOJOGEDANG**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	3,13	3,13	Sangat Rendah	100,00	3,13	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	2,08	2,08	Sangat Rendah	100,00	2,08	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100,00	4,17	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	1,38	1,38	Sangat Rendah	100,00	1,38	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	2,08	2,08	Sangat Rendah	100,00	2,08	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	NA	NA	NA	72,55	NA	NA
7.15	**Kec. KEBAKKRAMAT**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100	4,17	Sangat Rendah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100	4,17	Sangat Rendah
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100	4,17	Sangat Rendah
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	2,08	2,08	Sangat Rendah	100	2,08	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	4,17	4,17	Sangat Rendah	100	4,17	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,47	NA	NA	NA	72,5	NA	NA
7.16	**Kec. KERJO**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,85	NA	NA	NA	70,00	NA	NA
7.17	**Kec. JENAWI**									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	100,00	50,00	Sangat Rendah
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,10	NA	NA	NA	73,22	NA	NA

Sumber : Kecamatan, 2026

16. Unsur Urusan Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum, Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 6 (enam) program, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Semester I tahun 2026 adalah tiga indikator belum ada capaian karena dihitung akhir tahun, satu indikator capaian sangat tinggi, satu indikator capaian rendah dan satu indikator capaian sangat rendah. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48

Capaian Kinerja Program Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	17,00	1,00	5,88	Sangat Rendah	17	5,88	Sangat Rendah

No	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	37,50	NA	NA	NA	38,5	NA	NA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	54,00	54,37	100,69	Sangat Tinggi	56,00	97,09	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	17,00	NA	NA	NA	17	NA	NA
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100,00	58,82	58,82	Rendah	100	58,82	Rendah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	NA	NA	NA	74,50	NA	NA

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026

e. Capaian Indikator Kinerja Utama Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.49.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Perangkat Daerah Koordinator	Satuan	2026				Target Akhir RPJMD		
				Target	Capaian TW II	%	Status	Target	%	Status
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Setda	Angka	86,5	87,21	100,82	Sangat Tinggi	88,5	98,54	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP	Setda	Nilai	71	68,21	96,07	Sangat Tinggi	73	93,44	Sangat Tinggi
3	Maturitas SPIP	Setda	Level	3,25	3,13	96,31	Sangat Tinggi	3,45	90,72	Sangat Tinggi
4	Indeks pelayanan publik	Setda	Angka	4,54	4,41	97,14	Sangat Tinggi	4,64	95,04	Sangat Tinggi
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	DLH	Angka	72,45	70,69	97,57	Sangat Tinggi	72,63	97,33	Sangat Tinggi
6	Indeks daya saing daerah	Baperida	Angka	3,85	3,85	100,00	Sangat Tinggi	3,95	97,47	Sangat Tinggi
7	Indeks Pembangunan Manusia	Baperida	Angka	79,26	78,67	99,26	Sangat Tinggi	82,09	95,83	Sangat Tinggi
8	Pertumbuhan Ekonomi	Baperida	%	6,2	5,75	92,74	Sangat Tinggi	6,5	88,46	Tinggi
9	Indeks Ketahanan Pangan	DispertanPP	Angka	89,72	75,45	84,09	Tinggi	90,27	83,58	Tinggi
10	Tingkat Kemiskinan	Setda	%	8,84	8,48	104,25	Sangat Tinggi	8,22	96,93	Sangat Tinggi

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2026, diolah
Catatan : Data capaian menggunakan angka Tahun 2025

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan infrastruktur fisik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 masih ditandai oleh belum optimalnya kualitas, konektivitas, kapasitas dan ketahanan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi serta kawasan permukiman. Kerusakan infrastruktur jalan dipengaruhi oleh umur layanan konstruksi, tingginya beban lalu lintas dan kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), keterbatasan kapasitas dan lebar jalan, kondisi drainase yang belum optimal, serta karakteristik wilayah yang berbukit dan rawan bencana longsor. Dengan adanya keterbatasan pendanaan sebagai dampak adanya efisiensi, Pemerintah daerah harus selektif dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi pelayanan publik, nilai strategis kawasan, manfaat ekonomi, serta risiko apabila infrastruktur tidak segera ditangani.

Pada sektor sumber daya air, masih terdapat permasalahan keandalan jaringan irigasi, baik terkait kondisi fisik bangunan dan saluran maupun distribusi air yang belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada sektor perumahan dan permukiman masih diperlukan penguatan intervensi terhadap kawasan kumuh, rumah tidak layak huni dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tahun 2026 perlu diarahkan tidak semata-mata pada pembangunan baru, tetapi lebih menekankan pada pemeliharaan, REHABILITASIi, peningkatan kualitas, konektivitas dan ketahanan infrastruktur.

Terkait permasalahan non-infrastruktur Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 masih ditandai oleh belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kualitas pelayanan dasar, percepatan penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, produktivitas ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta kualitas lingkungan hidup. Pada aspek sosial, masih diperlukan penguatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial. Pada aspek ekonomi, tantangan utama berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, daya saing UMKM dan ekonomi kreatif, penguatan investasi, serta peningkatan nilai tambah sektor industri, pertanian dan pariwisata.

Di sisi lain, tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup semakin membutuhkan perhatian melalui penguatan pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena kemampuan fiskal daerah harus dihadapkan pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar dan program prioritas, sehingga diperlukan penguatan efektivitas, efisiensi, integrasi data, kolaborasi lintas sektor dan penerapan prinsip *money follow priority* dalam pengalokasian sumber daya pembangunan.

Perubahan RKPD 2026 Kabupaten Karanganyar diarahkan bukan semata-mata untuk melakukan penyesuaian program dan anggaran, tetapi untuk memastikan respons pembangunan terhadap perkembangan kondisi aktual daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penajaman dilakukan dengan mempertimbangkan capaian indikator pembangunan, perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, perkembangan kerangka ekonomi daerah, kemampuan fiskal, perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD.

Dengan pendekatan tersebut, perubahan perencanaan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi berbasis INTANPARI, penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan pangan, penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan tata kelola pembangunan berbasis data dan berorientasi hasil.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas dan arah kebijakan pembangunan, berikut upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar:

1. Menetapkan prioritas infrastruktur berdasarkan tingkat urgensi.
   Tidak semua kerusakan dapat ditangani sekaligus. Pemerintah Kabupaten perlu membuat skala prioritas berbasis kondisi dan risiko. Prioritas terutama diarahkan pada:
   a. jalan dan jembatan yang rusak berat;
   b. akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan;
   c. ruas penghubung sentra produksi dengan pasar;
   d. infrastruktur pendukung kawasan pertanian;
   e. drainase kawasan rawan genangan;
   f. jaringan irigasi yang mendukung lahan pertanian produktif.
2. Menggeser orientasi dari pembangunan baru ke pemeliharaan dan REHABILITASIi
   Dalam keterbatasan kondisi fiskal, anggaran lebih diarahkan untuk:
   a. pemeliharaan rutin;
   b. REHABILITASIi ringan dan sedang;
   c. preservasi jalan;
   d. normalisasi drainase;
   e. pemeliharaan jaringan irigasi; dan
   f. pemeliharaan jembatan dan talud
3. Optimalisasi fungsi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai sumber pendanaan alternatif
4. Memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, diantaranya melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan pengembangan investasi

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026 yang didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas domestik. Capaian tersebut dilansir dari Media Indonesia melampaui angka pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan angka mencapai 2,94 persen. Selain itu, sektor investasi menyumbang 1,79 persen dan belanja pemerintah tercatat memberikan kontribusi sebesar 1,26 persen.

Menteri Keuangan menekankan pentingnya melihat struktur pertumbuhan ekonomi berdasarkan masing-masing komponen. Penghitungan dilakukan melalui pertumbuhan tiap komponen yang dikalikan dengan pangsanya terhadap total perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengonfirmasi bahwa kinerja ekonomi pada awal tahun 2026 ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas penduduk. BPS RI menyebutkan adanya faktor libur nasional dan momentum keagamaan yang memicu aktivitas belanja.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 1-2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan (Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul fitri), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah saat ini tengah memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Upaya ini mencakup percepatan belanja kementerian serta pelaksanaan program prioritas nasional yang telah dimulai sejak awal tahun 2026.
(Sumber : https://www.babelinsight.id/ekonomi-indonesia-tumbuh-561-persen-pada-triwulan-i-2026-1778906355)

Di tengah dinamika geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap resilien dan mencatat pertumbuhan yang solid. Pada triwulan 1-2026, PDB Indonesia mampu tumbuh hingga 5,61 persen (y-on-y), melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama juga mencatat pertumbuhan yang positif pada triwulan 1-2026, diantaranya: Vietnam 7,8 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 5,0 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

BPS RI, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 2,94 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 1-2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14 persen (y-on-y) pada triwulan 1-2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan darat bahkan mencapai 20,20 persen (y-on-y) pada triwulan 1-2026.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2026 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh solid sebesar 5,96 persen. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh impresif hingga 21,81 persen seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melaui pembayaran gaji ke-14 (THR) serta peningkatan belanja barang dan jasa terutama melalui program untuk masyarakat: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat lima sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap total PDB triwulan 1-2026, yaitu industri pengolahan (19,07 persen), perdagangan (13,28 persen), pertanian (12,67 persen), konstruksi (9,81 persen), dan pertambangan (8,69 persen).

Beberapa sektor turut mencatat pertumbuhan yang tinggi, seperti akomodasi dan makan minum yang mampu tumbuh hingga 13,14 persen didorong oleh perluasan cakupan program MBG dan momen libur nasional; sektor jasa lainnya tumbuh 9,91 persen, didorong oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara; serta sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Selanjutnya, BPS mencatat sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y). Kinerja sektor ini terutama didorong oleh industri makanan dan minuman, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya ditopang oleh meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu tumbuh 6,26 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y) seiring meningkatnya produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi barang pertanian dan industri pengolahan, impor barang-barang konsumsi, barang modal dan bahan baku, serta aktivitas belanja masyarakat.

Sementara itu, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan yang solid 5,49 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y), didorong oleh peningkatan aktivitas konstruksi baik oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan sektor pertanian tumbuh stabil pada angka 4,97 persen untuk triwulan 1-2026 (y-on-y).

Secara regional, pada triwulan-1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen, diikuti Sulawesi 6,95 persen serta Jawa 5,79 persen (y-on-y).

BPS turut merilis kondisi ketenagakerjaan terkini. Penduduk dengan status bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta orang diantaranya yang masih menganggur. Jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor

pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional pada Februari 2026.

Lebih lanjut, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal maupun informal mengalami peningkatan selama Februari 2025-Februari 2026. Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang, sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS membagi penduduk bekerja ke dalam 3 kategori, yaitu: pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

BPS mencatat, Februari 2026, proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen. (Sumber : https://www.bps.go.id/id/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html)

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran 2026
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode	2,5±1,0
2.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.500–16.900
3.	Cadangan Devisa (miliar USD)	171,01-171,42
4.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2-604
5.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)–(0,90)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18-21,20
7.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70
8.	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70
9.	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22–13,35
10.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45–11,40
11.	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)–0,40)
12.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)–(2,70)
13.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,80-39,90
14.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17-7,18
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,30-2.175,30
16.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,40-1.006,50

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan

menjadi 5,80-6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence*, *business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dan/atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis ecommerce bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Tabel 3.2.
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
Pertumbuhan PDB		5,80-6,30
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran		
1.	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53-5,83
2.	Konsumsi Pemerintah	6,85-6,96
3.	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17-7,18
4.	Ekspor Barang dan Jasa	7,05-7,50
5.	Impor Barang dan Jasa	7,34-7,50
Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3.	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4.	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6.	Konstruksi	7,80–7,91
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10.	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12.	Real Estat	2,78–2,98
13.	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15.	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17.	Jasa lainnya	7,24–7,76

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU) dan meningkatkan efisiensi

produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor *demand side* pun diperkirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antar wilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan

peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (*Tourism 5.0*).

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Memasuki bulan Maret 2026, kondisi perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang resilien. Stabilitas indikator makro yang terjaga serta dukungan kebijakan fiskal yang optimal menjadi faktor utama dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. APBN terus hadir sebagai instrumen penting, baik dalam menjaga stabilitas maupun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang kuat. Sepanjang tahun 2025, ekonomi tumbuh 5,37% (yoy), dengan capaian triwulan IV sebesar 5,84% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap solid. Dari sisi persepsi masyarakat, tingkat optimisme masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2026 berada di level 116,3, yang masih berada pada zona optimis, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Tekanan inflasi menunjukkan tren yang lebih terkendali. Inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 3,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan Februari. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara yang terendah di Kabupaten Wonosobo. Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,32%, tingkat kemiskinan berada di 9,39%, dan ketimpangan menurun dengan Gini Ratio 0,350.

Di sektor primer, peningkatan daya beli petani dan nelayan tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani menjadi 116,38 serta Nilai Tukar Nelayan menjadi 105,06. Selain itu, kualitas pembangunan manusia juga meningkat, tercermin dari IPM yang mencapai 74,77. Kondisi ekonomi di Jawa Tengah menjadi pondasi penting bagi pelaksanaan kebijakan fiskal di Jawa Tengah ke depan.

Kinerja APBD konsolidasi di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang cukup sehat dengan ruang fiskal yang masih terbuka. Pendapatan daerah hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp24,72 triliun atau 24,27% dari target, yang didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp18,53 triliun, serta PAD sebesar Rp6,19 triliun.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp13,94 triliun atau 12,71% dari target, dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada periode selanjutnya.
(Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id/data-publikasi/309-artikel/3381-kinerja-fiskal-jawa-tengah-di-triwulan-i-2026-menunjukkan-tren-positif-dalam-menopang-perekonomian-di-jawa-tengah.html)

Kinerja ekonomi Jawa Tengah menunjukkan tren positif pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat nilai ekspor kumulatif Januari–April 2026 mencapai 4,57 miliar dolar AS atau tumbuh 19,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. peningkatan ekspor tersebut menjadi salah satu indikator menguatnya aktivitas ekonomi daerah, terutama dari sektor industri pengolahan yang masih menjadi tulang punggung ekspor Provinsi Jawa Tengah.

Secara kumulatif Januari-April 2026 total ekspor Jawa Tengah mencapai 4.567,32 juta dolar AS atau meningkat 19,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. kenaikan ekspor

ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh 16,39 persen. Sementara itu, pasar utama ekspor Jawa Tengah masih didominasi oleh Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Belanda, dan Korea Selatan.

Secara tahunan (year-on-year), nilai ekspor Jawa Tengah pada April 2026 bahkan melonjak hingga 65,73 persen menjadi 1,38 miliar dolar AS dibandingkan April 2025. Adapun ekspor nonmigas tercatat sebesar 1,27 miliar dolar AS atau naik 58,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Jawa Tengah mengalami inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,23 persen pada Mei 2026. Angka tersebut berbalik dari kondisi April 2026 yang mencatat deflasi sebesar 0,03 persen.

Secara tahunan, inflasi Jawa Tengah mencapai 2,85 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date) berada di level 1,19 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,07 persen. Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura akibat faktor cuaca menjadi pemicu utama. Lima komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada Mei 2026 adalah cabai merah sebesar 0,06 persen, bawang merah 0,05 persen, cabai rawit 0,05 persen, telepon seluler 0,04 persen, serta minyak goreng 0,03 persen. Kabar baik juga datang dari sektor pertanian.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 117,39 atau meningkat 2,16 persen dibandingkan April 2026 yang berada di angka 114,90. Kenaikan tersebut menunjukkan pendapatan yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran mereka. Peningkatan NTP dipicu naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,58 persen menjadi 152,85, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik 0,41 persen menjadi 130,21. Komoditas yang paling besar mendorong kenaikan pendapatan petani antara lain gabah, bawang merah, jagung, cabai rawit, dan sapi potong. Sementara itu, komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan biaya yang harus dibayar petani meliputi bawang merah, bakalan sapi, cabai merah, sawi hijau, dan cabai rawit. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang berhasil mencatat kenaikan NTP bersama Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sektor pariwisata juga menunjukkan pemulihan yang kuat. Hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Tengah mencapai 2.671 orang. Sebanyak 2.616 wisatawan masuk melalui Bandara Ahmad Yani Semarang, sedangkan 55 wisatawan lainnya melalui Bandara Adi Soemarmo. Jika dibandingkan Maret 2026, jumlah kunjungan wisman pada April meningkat 25,46 persen. Bahkan secara tahunan, lonjakannya mencapai 399,25 persen dibandingkan April 2025. Lima negara yang mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah adalah Tiongkok, Malaysia, Singapura, India, dan Thailand. Tak hanya wisman, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga terus meningkat. Selama Januari–April 2026, jumlah perjalanan wisatawan domestik ke Jawa Tengah mencapai 56,49 juta perjalanan atau tumbuh 2,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data tersebut menunjukkan bahwa di tengah tantangan inflasi dan dinamika ekonomi global, Jawa Tengah mampu menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan ekspor, meningkatnya kesejahteraan petani, serta bangkitnya sektor pariwisata yang kembali bergairah.
(Sumber : https://halosemarang.id/ekspor-jawa-tengah-melonjak-1953-persen-kunjungan-wisman-dan-ntp-ikut-menguat/)

Tabel 3.3.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 -6,00
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	52,0 - 55,7
3.	Inflasi	%	1,50 - 3,50
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,47-4,37
5.	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53
6.	Rasio Gini	Angka	0,351 - 0,361

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Jawa Tengah sebagai lumbung pangan berarti menetapkan dan memperkuat peran daerah sebagai pusat produksi dan penyedia utama pangan, baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan dorongan untuk peningkatan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, irigasi, dan alat mesin pertanian (alsintan), potensi lahan, iklim, dan sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, peningkatan sarana seperti pembangunan jalan tani, gudang, irigasi, dan pasar agar hasil pertanian dapat tersimpan dan terdistribusikan. Program-program pendukung lainnya seperti pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan ditingkatkan agar petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem. Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional mengandung harapan bahwa daerah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, namun juga mampu menyuplai daerah lain bahkan berkontribusi pada cadangan pangan nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. mendorong implementasi hilirisasi sektor pertanian (terutama komoditas perkebunan unggulan dan pangan strategis);
3. peningkatan industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman);
4. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
7. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
8. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
9. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
10. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
11. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
12. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
13. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
14. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;

15. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
16. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
17. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
18. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
19. penguatan kerjasama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
20. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
21. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
22. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
23. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
24. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

3.1.3. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Karanganyar.

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, di antaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

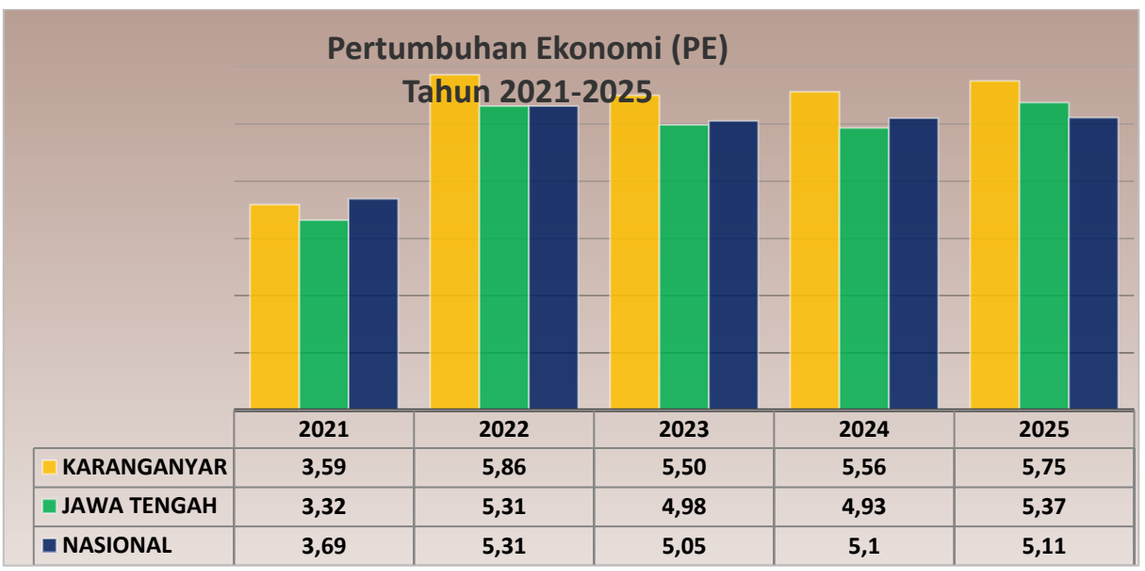
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada rentang Tahun 2021-2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi tumbuh positif dari 3,59% di Tahun 2021 menjadi 5,86% di Tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,36 poin di tahun 2023, yaitu menjadi 5,50%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebesar 5,56% dan naik 0,19 poin di Tahun 2025, yaitu menjadi 5,75%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Karanganyar	3,59	5,86	5,50	5,56	5,75
Provinsi Jawa Tengah	3,32	5,31	4,98	4,93	5,37
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,10	5,11

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS



Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

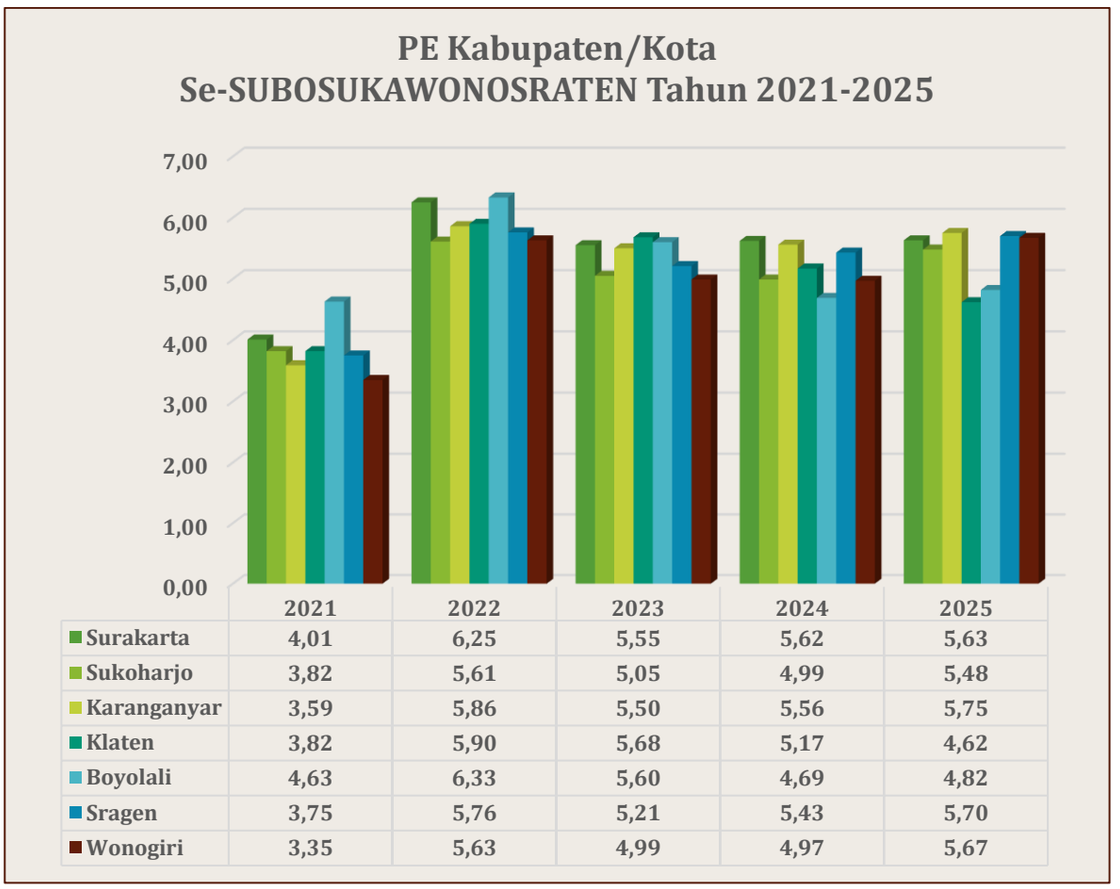
Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Boyolali	4,63	6,33	5,60	4,69	4,82
2	Klaten	3,82	5,90	5,68	5,17	4,62
3	Sukoharjo	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48
4	Wonogiri	3,35	5,63	4,99	4,97	5,67
5	**Karanganyar**	**3,59**	**5,86**	**5,50**	**5,56**	**5,75**
6	Sragen	3,75	5,76	5,21	5,43	5,70
7	Surakarta	4,01	6,25	5,55	5,62	5,63
8	Jawa Tengah	3,32	5,31	4,98	4,93	5,37
9	Nasional	3,69	5,31	5,05	5,10	5,11

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dengan nilai 5,75% tertinggi di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.



	2021	2022	2023	2024	2025
Surakarta	4,01	6,25	5,55	5,62	5,63
Sukoharjo	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48
Karanganyar	3,59	5,86	5,50	5,56	5,75
Klaten	3,82	5,90	5,68	5,17	4,62
Boyolali	4,63	6,33	5,60	4,69	4,82
Sragen	3,75	5,76	5,21	5,43	5,70
Wonogiri	3,35	5,63	4,99	4,97	5,67

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

2. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2025 sebesar Rp. 55.089,00 miliar lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang bernilai sebesar Rp. 51.123,06 miliar. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut, juga menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.6.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (miliar rupiah)
Tahun 2021–2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.101,03	5.452,25	5.700,76	5.891,54	6.435,24
2. Pertambangan dan Penggalian	437,90	424,12	453,98	485,60	499,26
3. Industri Pengolahan	18.350,44	19.947,96	21.975,71	23.986,20	25.800,95
4. Pengadaan Listrik dan Gas	57,04	59,79	65,20	75,80	81,20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,43	28,23	28,88	30,28	29,06
6. Konstruksi	2.735,34	2.974,62	3.436,81	3.662,60	3.829,03
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.404,58	4.837,54	5.425,11	5.656,65	6.017,01

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
8. Transportasi dan Pergudangan	761,85	1.374,86	1.599,07	1.871,23	2.095,21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.225,23	1.520,12	1.728,65	2.111,47	2.406,73
10. Informasi dan Komunikasi	563,49	577,40	611,67	645,75	712,21
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.406,23	1.550,42	1.636,91	1.679,53	1.770,66
12. Real Estate	648,56	687,89	739,46	803,18	859,97
13. Jasa Perusahaan	149,86	163,18	182,87	207,16	229,73
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	676,21	704,08	736,29	803,67	832,41
15. Jasa Pendidikan	1.719,24	1.763,20	1.821,55	1.897,33	2.057,36
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,77	359,98	389,57	416,45	443,22
17. Jasa Lainnya	544,92	662,12	798,16	898,62	989,75
PDRB ADHB	**39.157,21**	**43.087,76**	**47.150,65**	**51.123,06**	**55.089,00**

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Begitu juga untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2025 Kabupaten Karanganyar memiliki nilai PDRB sebesar Rp. 33.709,11 miliar.

Tabel 3.7.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (miliar rupiah)
Tahun 2021–2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.368,36	3.464,22	3.458,92	3.444,54	3.652,96
2. Pertambangan dan Penggalian	268,61	250,58	261,29	276,77	285,58
3. Industri Pengolahan	12.425,19	12.940,60	13.702,82	14.442,04	15.236,44
4. Pengadaan Listrik dan Gas	47,20	49,26	52,27	56,74	59,71
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,68	23,05	23,31	23,95	22,35
6. Konstruksi	1.825,51	1.887,03	2.080,26	2.209,15	2.286,68
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.321,31	3.475,11	3.637,03	3.833,35	3.997,49
8. Transportasi dan Pergudangan	599,12	1.021,76	1.105,81	1.239,26	1.361,16
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899,19	1.095,89	1.229,23	1.474,24	1.657,79
10. Informasi dan Komunikasi	598,62	631,36	631,36	663,17	728,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	916,42	929,59	963,32	983,23	1.013,19
12. Real Estate	511,26	534,67	565,15	610,87	647,59
13. Jasa Perusahaan	101,77	107,17	116,22	128,67	139,94
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	468,86	473,74	481,93	508,46	417,29
15. Jasa Pendidikan	1.031,00	1.054,20	1.074,97	1.099,37	1166,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237,27	242,30	256,02	269,34	281,59
17. Jasa Lainnya	409,85	477,19	558,33	613,34	654,21
PDRB ADHB	**27.039,61**	**28.624,99**	**30.198,21**	**31.876,51**	**33.709,11**

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan

dengan 100 persen. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di Kabupaten Karanganyar.

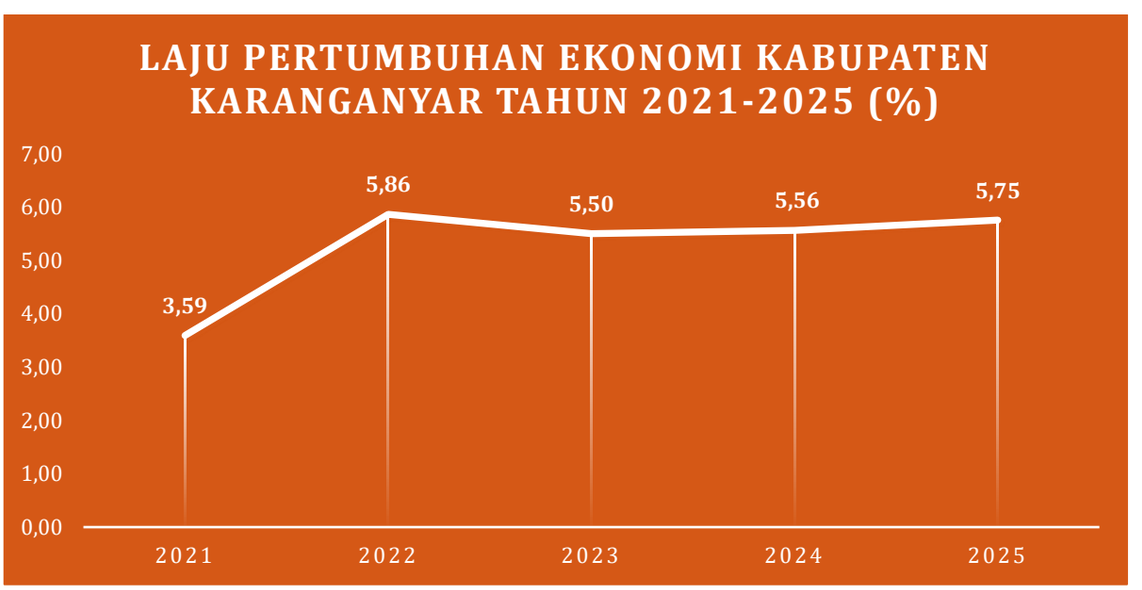
Selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 3,59 persen pada tahun 2021, 5,86 persen pada tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi 5,5 persen, tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,56 persen dan 5,75 persen pada tahun 2025. Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2021	39.157,21	5,76%	27.039,61	3,59%
2022	43.087,76	10,04%	28.624,99	5,86%
2023	47.150,76	9,43%	30.198,21	5,50%
2024	51.123,06	8,42%	31.876,51	5,56%
2025	55.089,00	7,76%	33.709,11	5,75%

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS



Gambar 3.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025(%)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2021-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB Tahun 2021-2025.

Tabel 3.9.

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2025 (%)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,03	12,65	12,09	11,52	11,68
2. Pertambangan dan Penggalian	1,12	0,98	0,96	0,95	0,91

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
3. Industri Pengolahan	46,86	46,30	46,61	46,92	46,84
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
6. Konstruksi	6,99	6,90	7,29	7,16	6,95
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,25	11,23	11,12	11,06	10,92
8. Transportasi dan Pergudangan	1,95	3,19	3,39	3,66	3,8
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,13	3,53	3,67	4,13	4,37
10. Informasi dan Komunikasi	1,44	1,34	1,30	1,26	1,29
11. Jasa Keuangan	3,59	3,60	3,47	3,29	3,21
12. Real Estate	1,66	1,60	1,57	1,57	1,56
13. Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,39	0,41	0,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,63	1,56	1,57	1,51
15. Jasa Pendidikan	4,39	4,09	3,86	3,71	3,73
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,84	0,83	0,81	0,80
17. Jasa Lainnya	1,39	1,54	1,69	1,76	1,80

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2021-2025, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

3. Laju Inflasi

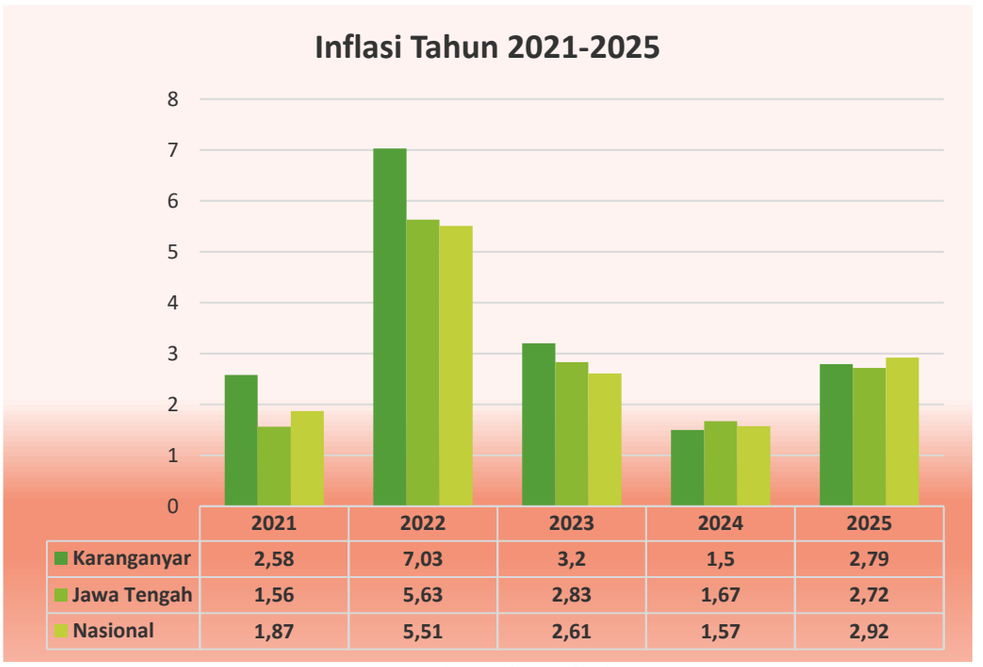
Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2025) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,58% dan mengalami kenaikan menjadi 7,03% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, nilai inflasi kembali mengalami penurunan hingga ke angka 3,20 di tahun 2023 dan 1,50 di tahun 2024. Nilai Inflasi kembali naik di tahun 2025, yaitu menjadi 2,79%. Nilai inflasi ini menggunakan data inflasi dari Kota Surakarta. Dimana nilai inflasi di Tahun 2025 sebesar 2,79 lebih tinggi dari nilai inflasi Jawa Tengah (2,72) dan lebih rendah dari inflasi nasional (2,92).

Tabel 3.10.

Inflasi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Inflasi	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Karanganyar	2,58	7,03	3,20	1,50	2,79
Provinsi Jawa Tengah	1,56	5,63	2,83	1,67	2,72
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2026, BPS



Gambar 3.4
Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

4. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.11.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kab. Karanganyar		Jawa Tengah	Nasional
	(Ribu Jiwa)	(%)	(%)	(%)
2021	95,41	10,68	11,79	10,14
2022	88,56	9,85	10,93	9,54
2023	88,64	9,79	10,77	9,36
2024	87,37	9,59	9,58	8,57
2025	77,66	8,48	9,48	8,47

Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, BPS

Secara umum, pada periode Maret 2015-Maret 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar sebanyak 77,66 ribu orang atau sebesar 8,48 persen terhadap total penduduk. Secara absolut, terjadi penurunan sekitar 9,71 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 yang sebesar 87,37 ribu orang. Demikian juga secara persentase, kemiskinan mengalami penurunan 1,11 persen poin dari 9,59 persen menjadi 8,48 persen.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar di tahun 2025 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 3.5
Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Wilayah Pengembangan SUBOSUKAWONOSRATEN, Angka Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 menempati posisi ke 5 (lima) setelah Kabupaten Sragen (11,22), Kabupaten Klaten (11,00), Kabupaten Wonogiri (9,59) dan Kabupaten Boyolali (8,71), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Angka Kemiskinan di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

No	Kabupaten	Angka Kemiskinan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Surakarta	9,4	8,84	8,44	8,31	7,69
2	Sukoharjo	8,23	7,61	7,58	7,47	6,83
3	**Karanganyar**	**10,68**	**9,85**	**9,79**	**9,59**	**8,48**
4	Klaten	13,49	12,33	12,28	12,04	11,00
5	Boyolali	10,18	9,82	9,81	9,63	8,71
6	Sragen	13,83	12,94	12,87	12,41	11,22
7	Wonogiri	11,55	10,99	10,94	10,71	9,59

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Karanganyar, arah pembangunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, perkembangan ekonomi Jawa Tengah, serta dinamika ekonomi nasional, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026:

a) Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
   Pertumbuhan ekonomi Karanganyar relatif baik dan yang tertinggi di Solo Raya. Namun, kondisi ekonomi global yang masih dipengaruhi perlambatan perdagangan dunia, geopolitik internasional, dan fluktuasi harga komoditas berpotensi menekan kinerja investasi maupun ekspor daerah. Tantangannya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas rata-rata Jawa Tengah melalui penguatan sektor unggulan daerah.
b) Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan

Inflasi masih menjadi perhatian utama, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim tertentu yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Kabupaten Karanganyar yang memiliki sektor pertanian kuat perlu menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga pangan agar daya beli masyarakat tidak menurun.

c) Peningkatan Daya Saing UMKM
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Tantangan yang dihadapi meliputi:
   1) Keterbatasan akses permodalan.
   2) Rendahnya adopsi teknologi digital.
   3) Persaingan produk dari luar daerah dan luar negeri.
   4) Keterbatasan akses pasar yang lebih luas.

   Transformasi digital dan peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak.

d) Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengurangan Pengangguran
Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karanganyar relatif rendah, pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tantangan ini semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital dan keterampilan industri.

e) Penurunan Kemiskinan yang Lebih Berkualitas
Angka kemiskinan terus menurun, namun masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang mudah kembali miskin akibat guncangan ekonomi, gagal panen, atau kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

f) Penguatan Investasi Daerah
Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin tinggi. Karanganyar perlu meningkatkan daya tarik investasi melalui:
   1) Penyediaan infrastruktur pendukung.
   2) Kemudahan perizinan.
   3) Kepastian regulasi.
   4) Ketersediaan tenaga kerja terampil.

   Investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

g) Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi
Karanganyar memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang besar. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas destinasi, aksesibilitas, promosi digital, serta keterlibatan masyarakat agar sektor pariwisata mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian lokal.

h) Transformasi Ekonomi Digital
Perkembangan ekonomi digital menuntut pelaku usaha, petani, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Tantangan yang dihadapi antara lain:
   1) Kesenjangan literasi digital.
   2) Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi.
   3) Belum optimalnya pemanfaatan marketplace dan sistem pembayaran digital.

   Transformasi digital menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan daerah.

i) Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim

Karanganyar sebagai daerah pertanian menghadapi risiko perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, dan ancaman bencana dapat mengganggu produksi pangan serta pendapatan petani.

j) Kualitas SDM sebagai Faktor Daya Saing
Kualitas sumber daya manusia masih menjadi isu strategis utama. Tantangannya meliputi:
1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2) Penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
3) Penguasaan teknologi dan inovasi.
4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Peningkatan kualitas SDM menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Karanganyar yang berdaya saing.

Memperhatikan berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Langkah strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Memperkuat Struktur Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing
1) Mengembangkan sektor unggulan daerah, terutama pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
2) Mendorong hilirisasi produk pertanian dan UMKM untuk meningkatkan nilai tambah.
3) Memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan usaha.
4) Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

b) Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
1) Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
2) Mengembangkan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim.
3) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dan inovasi teknologi.
4) Memperkuat sistem distribusi pangan dan cadangan pangan daerah.

c) Mempercepat Transformasi Digital Pemerintahan dan Ekonomi
1) Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.
2) Meningkatkan pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
3) Memperluas digitalisasi UMKM dan layanan publik.
4) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi hingga tingkat desa.

d) Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan
1) Memperkuat program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
2) Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
3) Meningkatkan akses kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
4) Mengembangkan desa-desa kantong kemiskinan melalui pendekatan pembangunan berbasis potensi wilayah.

e) Mendorong Investasi dan Kemudahan Berusaha
1) Menyederhanakan proses perizinan melalui pelayanan berbasis digital.

2) Menyiapkan kawasan strategis dan infrastruktur pendukung investasi.
3) Meningkatkan promosi investasi pada sektor industri, pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.
4) Memberikan kepastian regulasi dan kemudahan layanan bagi investor.

f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
1) Memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata.
2) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja.
3) Memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan tenaga kerja terampil.
4) Mengembangkan literasi digital dan kewirausahaan bagi generasi muda.

g) Mengembangkan Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan
1) Meningkatkan kualitas destinasi wisata unggulan.
2) Mengembangkan konsep wisata terpadu berbasis alam, budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif.
3) Memperkuat promosi digital dan branding pariwisata daerah.
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

h) Memperkuat Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah
1) Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur pendukung ekonomi.
2) Mengembangkan konektivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
3) Memperluas akses air minum, sanitasi, dan permukiman layak.
4) Mendukung pengembangan kawasan Solo Raya sebagai pusat pertumbuhan regional.

i) Meningkatkan Ketahanan Lingkungan dan Adaptasi Perubahan Iklim
1) Memperkuat upaya konservasi sumber daya alam.
2) Mengendalikan kerusakan lingkungan dan risiko bencana.
3) Mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan.
4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

j) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, dan Kolaboratif
1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2) Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
3) Memperkuat pengawasan internal dan manajemen risiko pembangunan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menempuh strategi pembangunan yang berfokus pada penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan investasi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, transformasi digital, peningkatan ketahanan pangan dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikannya.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social*

Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2026 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar.
2. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.
3. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya

3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2026, diharapkan Pendapatan Daerah dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2026 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
4) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
5) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
6) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
7) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
   a) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
   b) Menghambat mobilitas penduduk;
   c) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
   d) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

   sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah PD BPR Bank Karanganyar, PD BPR BKK Tasikmadu, PD BPR Bank Daerah Karanganyar, PD BKK Karanganyar, PUD Aneka Usaha dan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
   a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c) Hasil kerja sama daerah;
   d) Jasa giro;
   e) Pendapatan bunga;
   f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   g) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   h) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   i) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   j) Pendapatan denda pajak daerah;
   k) Pendapatan denda retribusi daerah;
   l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   m) Pendapatan dari pengembalian;
   n) Pendapatan dari BLUD; dan
   o) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun

Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
   a) DBH-Kehutanan;
   b) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara – Landrent;
   c) DBH-Minyak Bumi;
   d) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
   e) DBH-Perikanan.
2) Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-SDA, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAU, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

1) DAK Fisik; dan

2) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

e. Dana Insentif Fiskal (DIF)

Dana Insentif Fiskal (DIF) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DIF, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DIF dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil

1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penetapan perubahan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.
2) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2026, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. **Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. **Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan II Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.
Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2026	LEBIH/KURANG	%
4	**PENDAPATAN**	**1.983.739.922.408**	**1.028.914.681.180**	**954.825.241.228**	**51,87**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**522.598.236.818**	**280.309.754.806**	**242.288.482.012**	**53,64**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	317.987.473.000	169.890.455.248	148.097.017.752	53,43
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	178.776.456.117	90.181.572.195	88.594.883.922	50,44
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101	12.921.831.154	6.859.425.947	65,32
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.053.050.600	7.315.896.209	-1.262.845.609	120,86
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.461.141.685.590**	**748.604.926.374**	**712.536.759.216**	**51,23**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.187.235.000	703.844.885.210	675.342.349.790	51,03
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590	44.760.041.164	37.194.409.426	54,62
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-

Sumber : BKD, 2026, diolah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 1.931.019.677.319,00 turun sebesar Rp. 52.720.245.089,00 atau sebesar 2,66% jika dibandingkan dengan target penetapan Pendapatan APBD tahun 2026 sebesar Rp. 1.983.739.922.408,00. Tabel Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
4	**PENDAPATAN**	**1.983.739.922.408**	**1.931.019.677.319**	**-52.720.245.089**	**-2,66**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**522.598.236.818**	**534.470.723.729**	**11.872.486.911**	**2,27**
4.1.01	Pajak Daerah	317.987.473.000	325.487.473.000	7.500.000.000	2,36
4.1.02	Retribusi Daerah	178.776.456.117	184.191.227.636	5.414.771.519	3,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101	19.971.916.093	190.658.992	0,96
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.053.050.600	4.820.107.000	-1.232.943.600	-20,37

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.461.141.685.590**	**1.396.548.953.590**	**-64.592.732.000**	**-4,42**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.187.235.000	1.285.007.503.000	-94.179.732.000	-6,83
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590	111.541.450.590	29.587.000.000	36,10
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00

Sumber : BKD, 2026, diolah

Adanya penurunan proyeksi atas target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 lebih diakibatkan adanya efisiensi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Target Perubahan Pajak Daerah tahun 2026 naik Rp. 7.500.000.000,00 atau sebesar 2,36%, Retribusi Daerah naik sebesar Rp. 5.414.771.519,00 atau sebesar 3,03% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkkan tahun 2026 naik Rp. 190.658.992,00 atau sebesar 0,96% Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan turun sebesar Rp. 1.232.943.600,00 atau sebesar 20,37%.

Sedangkan untuk target perubahan Pendapatan Transfer tahun 2026 turun sebesar Rp. 64.592.732.000,00 atau turun sebesar 4,43% jika dibandingkan dengan target pendapatan penetapan tahun 2026. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan akan turun sebesar Rp. 94.179.732.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 29.587.000.000,00.

3.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan perubahan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan perubahan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan

memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Belanja Pegawai**

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
   b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
   c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
   d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNS Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa

keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan;
f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
   3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 dengan ketentuan;
   1) Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK tidak dipotong pajak;
   2) Biaya penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa,

namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% dari biaya hotel diwilayah bersangkuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3) Uang representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT;
4) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bersangkutan, bukan pelaksana perjalanan dinas;
5) Untuk biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM;
6) Pemakaian kendaraan dinas yang menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;
7) Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil;
8) Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya pejalanan dinas Perangkat Daerah pengirim;
9) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) Penghargaan atas suatu prestasi;
   3) Beasiswa kepada masyarakat;
   4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima

hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28).

5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
    1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
   1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
   4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Pengeluaran untuk mendanai:
   1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) Keperluan mendesak; dan/atau
   3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

   yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
   1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

   Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan II Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15.
Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2026	LEBIH/KURANG	%
5	**BELANJA**	**2.030.739.922.408**	**924.684.730.192**	**1.106.055.192.216**	**45,53**
5.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**1.598.504.688.490**	**797.581.453.520**	**800.923.234.970**	**49,90**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.035.949.058.068	552.910.520.444	483.038.537.624	53,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.633.771.422	204.749.305.697	277.884.465.725	42,42
5.1.05	Belanja Hibah	76.323.339.000	37.991.142.940	38.332.196.060	49,78
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.598.520.000	1.930.484.439	1.668.035.561	53,65
5.2	**BELANJA MODAL**	**123.364.080.418**	**11.524.990.280**	**111.839.090.138**	**9,34**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.682.238.168	6.520.677.530	13.161.560.638	33,13

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2026	LEBIH/KURANG	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.521.818.000	297.902.500	10.223.915.500	2,83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	84.945.097.300	674.054.100	84.271.043.200	0,79
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.937.589.950	4.032.356.150	3.905.233.800	50,80
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	277.337.000	0	277.337.000	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**1.584.039.362**	**3.415.960.638**	**31,68%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	1.584.039.362	3.415.960.638	31,68%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**303.871.153.500**	**113.994.247.030**	**189.876.906.470**	**37,51%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600	-	22.354.230.600	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	281.516.922.900	113.994.247.030	167.522.675.870	40,49%

Sumber : BKD, 2026, diolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2026 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun 2026 sebagaimana Tabel Berikut.

Tabel 3.16.

Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
5	**BELANJA**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**	**111.510.639.919**	**5,49**
5.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**1.598.504.688.490**	**1.720.731.283.026**	**122.226.594.536**	**7,65**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.035.949.058.068	1.034.187.761.485	-1.761.296.583	-,017
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.633.771.422	592.242.048.541	109.608.277.119	22,71
5.1.05	Belanja Hibah	76.323.339.000	90.485.753.000	14.162.414.000	18,56
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.598.520.000	3.815.720.000	217.200.000	6,04
5.2	**BELANJA MODAL**	**123.364.080.418**	**174.132.323.651**	**50.768.243.233**	**41,15**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**4.718.500.000**	**-281.500.000**	**-5,63**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.718.500.000	-281.500.000	-5,63
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**303.871.153.500**	**242.668.455.650**	**-61.202.697.850**	**-20,14**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600	23.565.264.750	1.211.034.150	5,42
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	281.516.922.900	219.103.190.900	-62.413.732.000	-22,17
	Surplus (Defisit)	**-47.000.000.000**	**-211.230.885.008**	**-164.230.885.008**	**349,43**

Sumber : BKD, 2026, diolah

Anggaran Belanja Tahun 2026 naik sebesar Rp. 111.510.639.919,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2026 atau sebesar 5,49%. Belanja operasional mengalami kenaikan sebesar 7,65% jika dibandingkan anggaran belanja APBD murni Tahun 2026 atau naik sebesar Rp. 122.226.594.536,00. Belanja operasional bersumber dari Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 109.608.277.119,00 atau 22,71%, Belanja Hibah naik sebesar Rp. 14.162.414.000,00 atau 18,56% dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp. 217.200.000,00 atau 6,04%.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 174.132.323.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.768.243.233,00 atau 41,15%. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan turun sebesar Rp. 281.500.000,00 atau 5.63%.

3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian *(prudential)* dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih

perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

c. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

d. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan II Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17.
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karanganyar
sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2026	LEBIH/KURANG	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.000.000.000**	**0**	**47.000.000.000**	**0,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**50.000.000.000**	**0**	**50.000.000.000**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	0	50.000.000.000	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.000.000.000**	**0**	**3.000.000.000**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	0	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**47.000.000.000**	**0**	**47.000.000.000**	**0,00**

Sumber : BKD, 2025, diolah

Tabel 3.18.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**50.000.000.000**	**214.230.885.008**	**164.230.885.008**	**328,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	214.230.885.008	164.230.885.008	328,46
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**-**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BKD, 2026, diolah

Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yaitu :
Rp 1.931.019.677.319,- + Rp 214.230.885.008,- = Rp 2.145.250.562.327,-

Adapun Proyeksi Postur Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tabel 3.19.

Proyeksi Postur Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	RKPD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	%
4	**PENDAPATAN**	**1.983.444.303.908**	**1.983.739.922.408**	**1.931.019.677.319**	**- 52.720.245.089**	**-2,66%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**522.598.236.818**	**522.598.236.818**	**534.470.723.729**	**11.872.486.911**	**2,27%**
4 1.1	Pajak Daerah	317.987.473.000	317.987.473.000	325.487.473.000	7.500.000.000	2,36%
4 1.2	Retribusi Daerah	178.776.456.117	178.776.456.117	184.191.227.636	5.414.771.519	3,03%
4 1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101	19.781.257.101	19.971.916.093	190.658.992	0,96%
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.053.050.600	6.053.050.600	4.820.107.000	- 1.232.943.600	-20,37%
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.460.846.067.090**	**1.461.141.685.590**	**1.396.548.953.590**	**- 64.592.732.000**	**-4,42%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.378.891.616.500	1.379.187.235.000	1.285.007.503.000	- 94.179.732.000	-6,83%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590	81.954.450.590	111.541.450.590	29.587.000.000	36,10%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	0,00%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	0,00%
5	**BELANJA**	**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**	**111.510.639.919**	**5,49%**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.531.763.100.673**	**1.598.504.688.490**	**1.720.731.283.026**	**122.226.594.536**	**7,65%**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.049.342.686.129	1.035.949.058.068	1.034.187.761.485	- 1.761.296.583	-0,17%
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.570.244.544	482.633.771.422	592.242.048.541	109.608.277.119	22,71%
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00%
5.1.5.	Belanja Hibah	47.628.170.000	76.323.339.000	90.485.753.000	14.162.414.000	18,56%
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	222.000.000	3.598.520.000	3.815.720.000	217.200.000	6,04%
5.2.	**BELANJA MODAL**	**116.302.934.302**	**123.364.080.418**	**174.132.323.651**	**50.768.243.233**	**41,15%**
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	0,00%
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.857.721.352	19.682.238.168	26.425.816.530	6.743.578.362	34,26%
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.038.118.000	10.521.818.000	21.201.548.000	10.679.730.000	101,50%
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.368.747.300	84.945.097.300	118.045.218.849	33.100.121.549	38,97%
5.2.5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.865.980.650	7.937.589.950	8.176.728.850	239.138.900	3,01%
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	172.367.000	277.337.000	283.011.422	5.674.422	2,05%
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**4.718.500.000**	**- 281.500.000**	**-5,63%**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	4.718.500.000	- 281.500.000	-5,63%
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**377.378.268.933**	**303.871.153.500**	**242.668.455.650**	**- 61.202.697.850**	**-20,14%**
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600	22.354.230.600	23.565.264.750	1.211.034.150	5,42%
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	355.024.038.333	281.516.922.900	219.103.190.900	- 62.413.732.000	-22,17%
	DEFISIT/SURPLUS	**- 47.000.000.000**	**- 47.000.000.000**	**- 211.230.885.008**	**- 164.230.885.008**	**349,43%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.000.000.000**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**214.230.885.008**	**164.230.885.008**	**328,46%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000	214.230.885.008	164.230.885.008	328,46%
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**-**	**0,00%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	-	-	-	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	**47.000.000.000**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**-**	**-**	**-**	
	TOTAL APBD	**2.033.444.303.908**	**2.033.739.922.408**	**2.145.250.562.327**	**111.510.639.919**	5,48%

Sumber : BKD, 2026, diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode jabatan 2025-2030 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan Sejahtera.

Hubungan antara tujuan dan sasaran daerah yang hendak dicapai ditunjukan dengan beberapa indikator dengan target capaian di tahun 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.

Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar		Satuan	Target Tahun 2026 dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Target dalam RKPD Tahun 2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,50	86,50
2.	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	71,00
3.	Maturitas SPIP	Level	3,250	3,250
4.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,54	4,54
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,45	72,45
6.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,85	3,85
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,26	79,26
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	6,20
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,72	89,72
10.	Tingkat Kemiskinan	%	8,84	8,84

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029,2026

Memperhatikan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2026, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Berikut persandingan antara target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 4.2.

Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar		Satuan	Target dalam RKPD Tahun 2026	Target dalam Perubahan RKPD Tahun 2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,50	87,50
2.	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	71,00

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar		Satuan	Target dalam RKPD Tahun 2026	Target dalam Perubahan RKPD Tahun 2026
3.	Maturitas SPIP	Level	3,250	3,250
4.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,54	4,54
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,45	72,45
6.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,85	3,85
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,26	79,26
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	6,20
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,72	75,88
10.	Tingkat Kemiskinan	%	8,84	8,00

Sumber : Bapperida, 2026

Tabel 4.3.

Rencana Perubahan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
A.	**TUJUAN DAN SASARAN DAERAH**				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,50	87,50	Realisasi Tahun 2025 : 87,21
2.	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	71,00	
3.	Maturitas SPIP	Level	3,25	3,25	
4.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,54	4,54	
5.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	1.873.621,1	1.873.621,1	
6.	Kasus Konflik SARA	Kasus	0	0	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,45	72,45	
8.	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	178	178	
9.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,85	3,85	
10.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,26	79,26	
11.	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,0	3,0	
12.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,20	6,20	
13.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,72	75,88	Sesuai dengan Surat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.1/139/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Penyampaian Target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2026 dan Tahun 2027
14.	Tingkat Kemiskinan	%	8,84	8,00	Realisasi Tahun 2025 : 8,48
15.	Indeks Gini	Angka	0,342	0,331	Realisasi Tahun 2025 : 0,332
B.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,72	75,88	Sesuai dengan Surat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.1/139/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Penyampaian Target Indeks

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
					Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2026 dan Tahun 2027
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,02	6,07	Realisasi Tahun 2025 : 6,09
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42,68	42,68	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,45	72,45	
5.	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,17	6,17	
6.	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	%	2,50	2,50	
7.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	1.873.621,10	1.873.621,10	
8.	Indeks Risiko Bencana	Angka	86,55	81,64	Realisasi Tahun 2025 : 82,14
C.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1.	Tingkat Kemiskinan	%	8,84	8,00	Realisasi Tahun 2025 : 8,48
2.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	61,95	61,95	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,10	Realisasi Tahun 2025 : 3,26
4.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,11	19,11	
5.	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,56	78,56	
6.	Total *Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total	Jiwa	1,98	1,98	
7.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	77,69	77,69	
8.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	9,50	9,50	
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,24	13,24	
10.	Persentase Penduduk Penerima PKG	%	46,00	46,00	
11.	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	100,00	100,00	
12.	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	25,00	25,00	
13.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	66,10	66,10	
14.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5,00	5,00	
15.	Jumlah Kasus Kematian balita	Kasus	105,00	105,00	
16.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage)*	%	90,85	90,85	
17.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	92,91	92,91	
18.	Penyangdang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD	Orang	30,00	30,00	
19.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,16	10,16	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	14,02	
21.	Angka Literasi/Numerasi				
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	70,20	70,20	
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	80,90	80,90	
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	63,00	63,00	
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	70,63	70,63	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
22.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	82,88	82,88	
23.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,16	11,16	
24.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	8,27	8,27	
25.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota	%	32,91	32,91	
26.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,62	95,62	
27.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	95,77	95,77	
28.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	30,50	30,50	
29.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	21,20	21,20	
30.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	129.000,00	129.000,00	
31.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,260	0,260	
32.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,68	66,68	
33.	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,60	0,60	
D.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,48	65,00	Realisasi Tahun 2025 = 65,00
2.	Kapabilitas Inovasi	Angka	3	3	
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	77,03	77,03	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,8	4,42	Realisasi Tahun 2025 = 4,37
5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	47,4	47,4	
6.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	5.600,00	5.600,00	
7.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,97	3,97	
8.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	4,67	4,67	
9.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	1,91	1,91	
10.	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	%	1,9	1,9	
11.	*Return on Asset (ROA) BUMD*	%	1,87	1,87	
12.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,66	23,66	
13.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,5	83,5	
14.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,57	51,57	
15.	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	75	75	
16.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	93,14	93,14	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
17.	Persentase Status Desa Mandiri	%	20,99	20,99	
18.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	0,51	
19.	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	
20.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,41	4,41	
E.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,50	87,50	Realisasi Tahun 2025 : 87,21
2.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	99,50	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,65	3,65	
4.	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,92	1,92	
5.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,54	4,54	
6.	Indeks Integritas Nasional	Angka	81,50	81,50	
7.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	
F.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
Urusan Pendidikan					
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	
Urusan Kesehatan					
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,00	1,00	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	
6.	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota					
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	75,00	75,00	
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,50	99,50	
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,40	99,40	
4.	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,50	83,50	
6.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95,00	95,00	
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	59,67	59,67	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,04	3,04	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	
7.	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	15,00	15,00	
Urusan Sosial					
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	
2.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	
Urusan Tenaga Kerja					
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	100,00	Realisasi Tahun 2025 = 100,00
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	58,00	58,00	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	59.000.000,00	60.800.000,00	Realisasi Tahun 2025 = 60.765.000,00
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	62,00	62,00	
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	81,00	81,00	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,90	8,90	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	4,18	4,18	
Urusan Pangan					
1.	Persentase Cadangan Pangan	%	20,18	20,18	
Urusan Pertanahan					
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00	100,00	
3.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	
4.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	
Urusan Lingkungan Hidup					
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	72,45	72,45	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	99,15	99,15	
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,25	67,25	
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,25	99,25	
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	64,00	64,00	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.	Persentase Status Desa Mandiri	%	20,99	20,99	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,98	1,98	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	70,5	70,5	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,10	8,10	
Urusan Perhubungan					
1.	Rasio konektivitas	ratio	68,00	0,1	Adanya penyesuaian formulasi serta memperhatikan realisasi rasio konektivitas di tahun 2025, menyebabkan terjadinya perubahan target di tahun 2026
2.	V/C ratio di Jalan Kabupaten/Kota	ratio	0,66	0,66	
Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92,00	92,00	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,87	64,87	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	25,00	25,00	
Urusan Penanaman Modal					
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	0,25	0,25	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	40,00	40,00	
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11,00	11,00	
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Unit/Medali	40,00	40,00	
Urusan Statistik					
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	75,00	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75,00	75,00	
Urusan Persandian					
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	65	65	
Urusan Perpustakaan					
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,5	70,5	
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,3	75,3	
3.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100,00	100,00	
4.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71,00	71,00	
Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Kg	2.509.625,00	2.509.625,00	
Urusan Pariwisata					
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	57,00	57,00	
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	12,00	12,00	
3.	Tingkat hunian akomodasi	%	31,50	31,50	
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,90	4,37	Realisasi Tahun 2025 = 4,37%
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	5,50	5,50	
Urusan Pertanian					
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang)	Ton/Ha	7,71	7,71	
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-2,04	-2,04	
Urusan Perdagangan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	76,00	100,00	Realisasi Tahun 2025 = 100,00
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,40	97,40	
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,00	88,07	Realisasi Tahun 2025 = 88,06
Urusan Perindustrian					
1.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	35,00	42,77	Realisasi Tahun 2025 = 42,76
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	92,90	98,60	Realisasi Tahun 2025 = 98,50
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	74,00	74,00	
Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)					
1.	Rasio PAD	%	14,89	14,89	
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,25	3,25	
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,05	3,05	
4.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)	%	0,75	0,75	
5.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	
Urusan Pemerintahan (Pengadaan)					
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	72,00	72,00	
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,00	48,00	
3.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	18,00	18,00	
Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)					
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS	%	182,70	182,70	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2026	Target Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
	tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,50	27,50	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,30	80,30	
Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)					
1.	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,21	91,21	
2.	*Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	108,35	108,35	
3.	*Assets Management*	%	100,00	100,00	
4.	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,56	7,56	

Sumber : Bapperida, 2026

Tabel 4.4.
Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja
Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.1.	**Pendidikan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,80	75,80
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	89,96	89,96
		Angka Partisipasi Sekolah Dasar	%	99,43	99,43
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	98,80	98,80
		Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	%	63,50	63,50
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	%	81,80	81,80
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta yang Disetujui	%	90,50	90,50
1.2.	**Kesehatan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	78,00
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan STBM	%	80,00	80,00
		Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	ratio	1,00	1,00
		Indek pencapaian SPM ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, anak sekolah	%	100,00	100,00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	71,00	71,00
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	5,00	5,00
		Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	%	46,00	46,00
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,00	97,00
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	80,10	80,10
		Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	%	87,00	87,00
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85,00	85,00
		Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	%	66,10	66,10
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan teregistrasi	%	100,00	100,00
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1.000 penduduk	2,62	2,62

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.	%	58,00	58,00
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,00	84,00
		Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	%	100,00	100,00
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	34,00	34,00
1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	77,00	77,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,50	99,50
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,40	99,40
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun	%	35,35	35,35
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	23,81	23,81
		Persentase Tingkat Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan	%	65,00	65,00
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara	%	26,41	26,41
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	85,30	85,30
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100
1.4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**				
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	59.67	59.67
3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan RTLH	%	96,96	96,96
4.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	%	65,60	65,60
5.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	21,00	21,00
1.5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,30	74,30
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100,00	100,00
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00
		Persentase Linmas yang dibina	%	0,11	0,11
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,00	15,00
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
1.6.	**Sosial**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,50	72,50
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00
		Persentase PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	3,98	3,98
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.1.	**Tenaga Kerja**				
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen kebijakan tenaga kerja yang disusun (RTK Makro dan RTK Mikro)	Dokumen	1 RTK Mikro	1 RTK Mikro
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	33,00	33,00
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,00	81,00
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan yang terselesaikan	%	100,00	100,00
2.2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,75	72,75
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	8,90	8,90
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	4,18	4,18
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	3,30	3,30
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	45,23	45,23
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100,00	100,00
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Per 100.000 penduduk	7,28	7,28
2.3.	**Pangan**				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	%	100,00	100,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi protein perkapita per hari	gram/ kapita/ hari	64,20	64,20
		Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kapita/ hari	2201,80	2201,80
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	2,78	2,78
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah sertifikat izin edar PSAT yang sudah diterbitkan	sertifikat	176,00	176,00
2.4.	**Pertanahan**				
1.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang	1,00	1,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
2.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemda yang memiliki sertifikat	%	50,00	50,00
2.5.	**Lingkungan Hidup**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,7	75,7
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu (air dan udara)	%	65,62	65,62
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan ruang terbuka hijau	Ha	3.982,75	3.982,75
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	%	78,00	78,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	77,5	77,5
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	35,00	35,00
8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan terkait LH	%	55,00	55,00
9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00
10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan sampah	%	3,50	3,50
2.6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	71,50
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	%	99,15	99,15
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,35	69,35
		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	%	99,24	99,24
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100,00	100,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase tertib pelaksanaan pelayanan adminduk di desa/kelurahan se Kabupaten Karanganyar	%	37,50	37,50
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen penyajian data kependudukan	Buku	2,00	2,00
2.7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,00
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	91,40	91,40
		Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan Sarpras	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga	%	89,50	89,50
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki dokumen RPJMDes, APBDes, dan RKPDes yang mendukung pencapaian prioritas daerah	%	100,00	100,00
		Persentase desa tertib administrasi	%	100,00	100,00
		Persentase desa memiliki BUMDes	%	98,77	98,77
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina	%	100,00	100,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD	%	100,00	100,00
2.8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4,30	4,30
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,50	70,50
		Persentase Kampung KB Mandiri	%	30,00	30,00
		Kelahiran Tidak Diinginkan	%	9,60	9,60
		Demand Satisfied	%	89,30	89,30
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	93,50	93,50
		Indeks Lansia Berdaya	Angka	56,50	56,50
		Indeks Pengasuhan Remaja	Angka	90,90	90,90
2.9.	**Perhubungan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	72,15
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	51,57	51,57
		Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	75,30	75,30
		Persentase terminal kondisi baik	%	48,30	48,30
		Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	85,00	85,00
2.10.	**Komunikasi dan Informatika**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,5	73,5
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	4,00	4,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan Keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	5,00	5,00
2.11.	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,50	70,50
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	13,00	13,00
3.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	%	32,00	32,00
4.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	%	28,80	28,80
5.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	%	37,00	37,00
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	64,87	64,87
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	26,87	26,87
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	11,66	11,66
2.12.	**Penanaman Modal**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	Persentase kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti	%	100,00	100,00
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	%	100,00	100,00
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan LKPM	%	52,00	52,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan Berusaha	%	100,00	100,00
2.13.	**Kepemudaan dan Olahraga**				
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	40,00	40,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan	%	100,00	100,00
2.14.	**Statistik**				
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Angka	2,92	2,92
2.15.	**Persandian**				
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan siber	Nilai	3	3
2.16.	**Kebudayaan**				
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	55,00	55,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	85,00	85,00
3.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang teregistrasi/tercatat	%	45,00	45,00
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	%	55,00	55,00
2.17.	**Perpustakaan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	72,15
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan penduduk	%	90,00	90,00
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang teridentifikasi	Naskah	6,00	6,00
2.18.	**Kearsipan**				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	%	100,00	100,00
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola dan dilestarikan	%	100,00	100,00
III.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.1.	**Kelautan dan Perikanan**				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	kg	1.948.990	1.948.990
2.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan	%	35,29	35,29
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	%	30,00	30,00
3.2.	**Pariwisata**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	75
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Tamu wisatawan	Orang	5.850.000	5.850.000
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	%	31,58	31,58
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah usaha ekraf yang terdaftar HAKI	Unit	77,00	77,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang dibina/dilatih keterampilan	%	14,50	14,50
3.3.	**Pertanian**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,65	73,65
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)			
		1. Padi	Ton	344.032,00	344.032,00
		2. Jagung	Ton	27.320,00	27.320,00
		3. Kacang Tanah	Ton	3.215,00	3.215,00
		4. Ubi Kayu	Ton	74.570,00	74.570,00
		5. Ubi Jalar	Ton	38.860,00	38.860,00
		Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)			
		1. Cabai besar	Kuintal	28.450,00	28.450,00
		2. Cabai rawit	Kuintal	8.255,00	8.255,00
		3. Bawang Merah	Kuintal	50.572,00	50.572,00
		4. Bawang Putih	Kuintal	24.475,00	24.475,00
		5. Alpukat	Kuintal	96.496,00	96.496,00
		6. Duku	Kuintal	4.104,00	4.104,00
		7. Durian	Kuintal	117.180,00	117.180,00
		8. Jambu Biji	Kuintal	4.230,00	4.230,00
		9. Pisang	Kuintal	170.280,00	170.280,00
		10. Tanaman Hias (Krisan)	Buah	1.247.460,00	1.247.460,00
		11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	Kuintal	5.745,00	5.745,00
		Angka produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao)			
		Tembakau	Ton	255,36	255,36
		Kopi	Ton	202,56	202,56
		Teh	Ton	4,80	4,80
		Cengkeh	Ton	42,30	42,30
		Kelapa	Ton	484,26	484,26
		Kakao	Ton	27,92	27,92
		Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)			
		1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Ekor	55.707,00	55.707,00
		2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Ekor	154.338,00	154.338,00
		3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)	Ekor	12.639.740,00	12.639.740,00
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	%	28,58	28,58
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-2,04	-2,04
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani	%	100,00	100,00
		Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani	%	100,00	100,00
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	16,50	16,50
3.4.	**Kehutanan**				
1.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	%	35	35
3.5.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	2
3.6.	**Perdagangan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,10	73,10

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase penerbitan izin usaha perdagangan	%	76,00	76,00
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarpras perdagangan sesuai standar (SNI)	%	22,00	22,00
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100,00	100,00
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	USD$	159.500.000	159.500.000
6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ukur Takar Timbang (UTTP) ditera dan tera ulang	%	72,00	72,00
7.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasaran	%	77,00	77,00
3.7.	**Perindustrian**				
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang dibina	Sentra	3	3
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase penerbitan izin usaha industri	%	100	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar SIINAS	%	9,59	9,59
3.8.	**Transmigrasi**				
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	2	2
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.1.	**Unsur Sekretariat Daerah**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,00	74,00
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	99,50
		Nilai LPPD	nilai	3,60	3,60
		Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyerapan APBD	%	94,20	94,20
		ROA (*Return Of Aset*) BUMD	%	1,87	1,87
		Tingkat Kematangan UKPBJ	%	100	100
4.2.	**Unsur Sekretariat DPRD**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,70	71,70
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100	100
V.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.1.	**Perencanaan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,75	90,75
		Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	Angka	40,00	40,00
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	Angka	40,00	40,00
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	40	40
5.2.	**Keuangan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,00	76,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan APBD	%	100,00	100,00
		Persentase realisasi anggaran	%	100,00	100,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Persentase pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	%	100,00	100,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	51,00	51,00
		Persentase piutang pajak yang tertagih	%	91,20	91,20
5.3.	**Kepegawaian**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	92	92
		Tingkat kinerja ASN	%	95	95
5.4.	**Pendidikan dan Pelatihan**				
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	27	27
5.5.	**Penelitian dan Pengembangan**				
1.	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%	34	34
VI.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.1.	**Inspektorat Daerah**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	95,30	95,30
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kumulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko/SPIP/Pengendalian Korupsi	%	59,00	59,00
		Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	7,00	7,00
		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Angka	35,00	35,00
VII.	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.1.	**Kecamatan Jatipuro**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,45	70,45
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.2.	**Kecamatan Jatiyoso**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,2	73,2
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.3.	**Kecamatan Jumantono**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,75	68,75
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.4.	**Kecamatan Jumapolo**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20	71,20
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.5.	**Kecamatan Matesih**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,35	70,35
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.6.	**Kecamatan Tawangmangu**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,4	73,4
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	83,5	83,5
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.7.	**Kecamatan Ngargoyoso**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,55	72,55
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.8.	**Kecamatan Karangpandan**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,95	73,95
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.9.	**Kecamatan Karanganyar**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,95	70,95
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
7.10.	**Kecamatan Tasikmadu**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	73
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.11.	**Kecamatan Jaten**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,45	71,45
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.12.	**Kecamatan Colomadu**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,80	71,80
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	90	90
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.13.	**Kecamatan Gondangrejo**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,60	71,60
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.14.	**Kecamatan Mojogedang**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	72,35
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.15.	**Kecamatan Kebakkramat**				

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,47	71,47
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.16.	**Kecamatan Kerjo**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,85	68,85
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100	100
7.17.	**Kecamatan Jenawi**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,10	73,10
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	%	100,00	100,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	%	100,00	100,00
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	%	100,00	100,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	%	100,00	100,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	%	100,00	100,00
8	**Urusan Pemerintahan Umum**				
8.1	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	73,50
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	17,00	17,00
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	37,50	37,50
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	54,00	54,00
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kecamatan	17,00	17,00
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100,00	100,00

NO	Urusan/Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2026	
				Penetapan	Perubahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				

Sumber : Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karanganyar, 2026

Terkait pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan, seluruh target SPM dipertahankan meskipun perubahan anggaran yang signifikan pada beberapa program dikarenakan target SPM merupakan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri harus bisa tercapai 100%, untuk itu perlu penambahan anggaran pada perubahan RKPD Tahun 2026.

Penyesuaian pembiayaan pada Urusan Kesehatan tersebut tidak mengubah target kinerja program, kegiatan, maupun sub-kegiatan, karena indikator keberhasilan tetap berorientasi pada hasil (output/outcome-driven). Target pelayanan dan cakupan kesehatan masyarakat tetap dipertahankan sesuai komitmen awal RKPD murni untuk menjamin ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah serta SPM Bidang Kesehatan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran pada perubahan RKPD Tahun 2026 tidak berubah sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai masukan dalam RKPD Tahun 2026.

Sebagai pendukung arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 dan berdasarkan masukan dari anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perubahan Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1) Pengentasan Kemiskinan.
   Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
2) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat untuk mencapai IPM yang lebih tinggi.
3) Penanganan Stunting
   Mengurangi prevalensi stunting pada balita melalui intervensi gizi dan perbaikan sanitasi.
4) Pertumbuhan Ekonomi
   Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendukung sektor-sektor produktif dan investasi.
5) Pengendalian Inflasi Daerah
   Menjaga stabilitas harga barang dan jasa untuk melindungi daya beli masyarakat.
6) Pembangunan Infrastruktur Wilayah
   Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
7) Ketahanan Pangan
   Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8) Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
   Mengelola penggunaan lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk Tahun 2026, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengalokasikan dan memprioritaskan

anggaran untuk beberapa hal, antara lain:

1) SPBE-*Merit System*
2) RTRW-RDTR Kecamatan
3) Ketahanan Pangan
4) Infrastruktur
5) Pengelolaan sampah terpadu
6) Penanganan kualitas dan kuantitas air permukaan yang mengalami penurunan

b. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagaimana tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Presiden menekankan agar berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”

Untuk mencapai pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional 1
   Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM)
2) Prioritas Nasional 2
   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3) Prioritas Nasional 3
   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4) Prioritas Nasional 4
   Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5) Prioritas Nasional 5
   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis

sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6) Prioritas Nasional 6
   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7) Prioritas Nasional 7
   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan
8) Prioritas Nasional 8
   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2026 yang didasarkan pada tiga pilar, yaitu pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas.

Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2026, dijabarkan sebagai berikut:

1) Pilar pertumbuhan tinggi berkelanjutan
   a) Pertumbuhan Ekonomi, sebesar 5,20-5,80 persen
   b) *Gross National Income* (GNI) per kapita, di angka US$ 5.520
   c) Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebesar 37,14 persen
   d) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, di angka 76,67
2) Pilar penurunan kemiskinan
   a) Tingkat Kemiskinan, ditargetkan sebesar 6,50-7,50 persen
   b) Tingkat Kemiskinan Ekstrem, ditargetkan menjadi 0,0-0,5 persen
   c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebesar 4,44-4,96
   d) Rasio Gini, di angka 0,377-0,380
3) Pilar sumber daya manusia berkualitas
   a) Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,57

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2) mendorong implementasi hilirisasi sektor pertanian (terutama komoditas perkebunan unggulan dan pangan strategis);
3) peningkatan industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman);
4) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air

yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;

5) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6) penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
7) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
8) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
9) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan bio fortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
10) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
11) penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
12) peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
13) peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
14) penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
15) penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
16) penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
17) peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
18) reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
19) penguatan kerjasama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
20) peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
21) mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
22) mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
23) peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
24) mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tahun 2026 sebagai tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2029 “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
   a) pelayanan publik yang merata dan inklusif;
   b) peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
   c) penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
   d) penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
   e) penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
   f) penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
   g) penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
   h) penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
   i) penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabilitas APIP;
   j) pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
   k) pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   l) penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
   m) penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
   n) penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
   o) penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;
   p) pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
   q) pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
   r) meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
   s) pembentukan jejaring global dalam peningkatan

perekonomian dan ketahanan regional;

t) peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;

u) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;

v) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;

perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:

a) penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;

b) penguatan pondasi sektor perdagangan;

c) penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;

d) peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);

e) peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;

f) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

g) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

h) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan bio fortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);

i) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);

j) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;

k) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

l) penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;

m) peningkatan pertumbuhan penanaman modal;

n) pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;

o) peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;

p) peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;

q) penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;

r) penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;

s) penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
t) penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa;
u) peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
v) pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
w) penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
x) penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
y) identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
z) penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa) penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
bb) peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
cc) harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
dd) penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
ee) peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
ff) penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
gg) penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
hh) penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ii) penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
jj) penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
kk) peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
ll) pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
mm) pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
nn) pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
oo) perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
pp) pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta

pemanfaatan teknologi.

3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a) pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
   b) pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
   c) pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
   d) penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
   e) penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;
   f) pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
   g) pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
   h) pengembangan keterampilan kader kesehatan;
   i) peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   j) pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
   k) pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
   l) peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
   m) peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
   n) penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
   o) peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
   p) peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
   q) pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
   r) penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
   s) penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
   t) pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi

khazanah arsip;

u) peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
v) peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
w) peningkatan pembangunan berbasis gender;
x) penguatan perlindungan sosial adaptif yang mencakup peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dan peningkatan kualitas bantuan sosial;
y) peningkatan ketahanan keluarga;
z) pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama Tahun 2026 yaitu:

1) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70 - 8,53 persen;
2) PDRB Per Kapita sebesar 52,0 - 55,7 juta rupiah;
3) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4) Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5) Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 - 89,50;
6) Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
7) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 - 6,00 persen;
8) Inflasi sebesar 1,50 - 3,50 persen;
9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10) Indeks Modal Manusia sebesar 0,62; dan
11) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 - 4,27 persen.

b. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Arah kebijakan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing SDM dalam Mendukung Pangan Nasional.*** Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 adalah:

1) **Meningkatkan integritas kualitas SDM**, dengan fokus:
   a) Peningkatan karakter dan perilaku masyarakat untuk berpendidikan, mengurangi anak putus sekolah, mendorong kesadaran dalam membangun pendidikan kesetaraan, peningkatan kualitas pendidikan, membangun pendidikan inklusif (untuk semua kalangan penduduk miskin dan difabel);
   b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik primer, maupun lanjutan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit menular terutama TB dan HIV), pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular terutama pada Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Cancer serta gangguan jiwa;
   c) mengembangkan budaya membaca dengan meningkatkan kualitas perpustakaan;
   d) mengembangkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu dan akuntabel menuju keluarga berkualitas;

e) pengembangan kearifan lokal dan budaya dalam mendorong internalisasi nilai nilai integritas;
f) menciptakan kondusifitas sosial dengan peningkatan penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
g) mendorong kesetaraan gender dan perlindungan pada perempuan dan anak.

Cakupan penemuan kasus TB baru pada semester I Tahun 2026 sebanyak 66% dari target 82% selama 1 Tahun (persentase capaian 80,49%), sedangkan untuk Insiden rate HIV per 100.000 penduduk sebanyak 7 per 100.000 (targetnya 9 per 100.000 penduduk artinya Dalam setiap 100.000 penduduk, terdapat sekitar 7 kasus baru HIV yang terjadi dalam periode pengukuran tertentu (dalam hal ini 6 bulan/ 1 semester).

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar perlu memperkuat keselarasan program prioritas daerah bidang kesehatan dengan isu strategis nasional, khususnya dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit menular, melalui penajaman target, indikator, serta intervensi yang mendukung pencapaian milestone pengendalian Tuberkulosis (TB) dan HIV. Upaya tersebut perlu diarahkan pada peningkatan penemuan kasus secara aktif, percepatan diagnosis dan pengobatan, peningkatan keberhasilan pengobatan TB, penguatan penemuan dan pengobatan kasus HIV, serta penguatan surveilans dan pelacakan kontak. Pada aspek PTM, perlu dilakukan penguatan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko melalui skrining dan intervensi berkelanjutan di Puskesmas, Posyandu, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, capaian setiap indikator perlu dipantau secara berkala melalui milestone Semester I, Semester II, dan target akhir tahun, sehingga keterkaitan antara prioritas daerah, target pembangunan kesehatan, dan agenda nasional dapat terukur serta menjadi dasar percepatan apabila terjadi deviasi capaian.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil dengan indikator kinerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia; dan (2) meningkatnya riset dan inovasi dengan indikator kinerjanya Kapabilitas Inovasi. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Pendidikan
b) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
c) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
d) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
f) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
g) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
h) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

i) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
j) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
k) Program Pembinaan Perpustakaan
l) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
m) Program Pengendalian Penduduk
n) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
o) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
p) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
q) Program Perlindungan Perempuan
r) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
s) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
t) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
u) Program Perlindungan Khusus Anak
v) Program Pengembangan Kebudayaan
w) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
x) Program Pembinaan Sejarah
y) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
z) Program Riset Dan Inovasi Daerah

2) **Meningkatnya integritas pembangunan ekonomi,** dengan fokus:
a) peningkatan jiwa kewirausahaan, mengembangkan kualitas UMK, mendorong pengembangan sentra/klaster industri dan pelaku usaha menuju ekonomi yang maju, mengembangkan koperasi sebagaimana prioritas nasional;
b) mengembangkan hilirisasi industri berbasis komoditas pertanian yaitu komoditas sayur, buah, tanaman biofarmaka dan tanaman hias, Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada,tembakau dan vanili, serta komoditas unggulan pertanian lokal lainnya, mengembangkan peran pemuda milenial dalam pertanian, pemenuhan sarana pertanian modern menuju ketahanan pangan. Peningkatan kualitas sumber daya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian. Mendorong perwujudan fortifikasi pangan. Menjamin kelancaran pupuk bagi petani dan mendorong penggunaan pupuk organik;
c) meningkatkan kemandirian pangan dengan meningkatkan cadangan pangan, keanekaragaman pangan dan penyediaan pangan segar;
d) meningkatkan pariwisata yang berintegritas, destinasi wisata yang menarik dan kolaborasi event dalam mendorong kunjungan; dan
e) meningkatkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi; (2) meningkatnya

ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan, dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

a) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
d) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
e) Program Pemasaran Pariwisata
f) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
g) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
h) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
i) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
j) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
k) Program Pengembangan Ekspor
l) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
m) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
n) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
o) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
p) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
q) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
r) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
s) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
t) Program Pengembangan UMKM
u) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
v) Program Promosi Penanaman Modal
w) Program Pelayanan Penanaman Modal
x) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
y) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
z) Program Perencanaan Tenaga Kerja
aa) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
bb) Program Penempatan Tenaga Kerja
cc) Program Hubungan Industrial
dd) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
ee) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
ff) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
gg) Program Penanganan Kerawanan Pangan
hh) Program Pengawasan Keamanan Pangan
ii) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
jj) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

kk) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
ll) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
mm) Program Penyuluhan Pertanian
nn) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
oo) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
pp) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
qq) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

3) **Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan**, dengan fokus:
a) peningkatan kualitas pengawasan internal, kualitas kapasitas APIP, integritas nasional dalam mencegah korupsi;
b) peningkatan merit system dengan memperkuat profesionalisme ASN dalam konsep merit sistem dan kompetensi ASN;
c) pemantapan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah;
d) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi daerah dengan melakukan penilaian manajemen risiko pada dokumen perencanaan;
e) peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi SPBE;
f) peningkatan pelayanan publik yang cepat dan murah; dan
g) pengembangan penelitian dan teknologi dalam mempercepat pembangunan daerah.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah, dengan indikator kinerjanya yaitu Nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Indeks Pelayanan Publik. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:
a) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
c) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
d) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
e) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
f) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
g) Program Perekonomian Dan Pembangunan
h) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
i) Program Penyelenggaraan Pengawasan
j) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
k) Program Pendaftaran Penduduk
l) Program Pencatatan Sipil
m) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

n) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
o) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
p) Program Kepegawaian Daerah
q) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
r) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
s) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
t) Program Pengelolaan Arsip
u) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
v) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
w) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
x) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
y) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
z) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
aa) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
bb) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4) **Meningkatkan kondusifitas wilayah,** dengan fokus:
a) peningkatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, mengurangi terjadinya kebakaran dan mencegah berkurangnya kerugian kebakaran;
b) peningkatan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama serta mendorong demokrasi di masyarakat; dan
c) peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan melakukan koordinasi dengan desa.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kondusifitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi, dengan indikator kinerjanya yaitu Angka Kriminalitas. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:
a) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
c) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
d) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
e) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
f) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
g) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial

5) **Mengembangkan kualitas infrastruktur,** dengan fokus:
   a) pemenuhan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Meningkatkan kualitas jalan dan layanan angkutan. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi kecelakaan. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman;
   b) pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman;
   c) pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman; dan
   d) peningkatan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dengan indikator kinerja Indeks Gini. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

   a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   c) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   d) Program Penataan Bangunan Gedung
   e) Program Penyelenggaraan Jalan
   f) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   h) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   i) Program Pengembangan Perumahan
   j) Program Kawasan Permukiman
   k) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   l) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
   m) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
   n) Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
   o) Program Penatagunaan Tanah
   p) Program Pemberdayaan Sosial
   q) Program Rehabilitasi Sosial
   r) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
   s) Program Penanganan Bencana
   t) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
   u) Program Penataan Desa
   v) Program Peningkatan Kerjasama Desa
   w) Program Administrasi Pemerintahan Desa

x) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
y) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

6) **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,** dengan fokus:
a) Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerjanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:
a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
f) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:
1. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,50;
2. Nilai SAKIP sebesar 71,00;
3. Maturitas SPIP sebesar 3,250;
4. Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 72,45;
6. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,85;
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,26;
8. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,20%;
9. Indeks Ketahanan Pangan sebesar 75,88; dan
10. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan sebesar 8,00%;

Sebagai gambaran keselarasan konsistensi prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten, tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5.
Gambaran Keselarasan Konsistensi Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Untuk Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Tahun 2026		
Nasional	**Provinsi Jawa Tengah**	**Kabupaten Karanganyar**
Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).	*Prioritas Daerah 4* Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	*Prioritas Daerah 4* Meningkatkan kondusifitas wilayah

Prioritas Pembangunan Tahun 2026		
Nasional	**Provinsi Jawa Tengah**	**Kabupaten Karanganyar**
Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	*Prioritas Daerah 4* Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif *Prioritas Daerah 1* Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas *Prioritas Daerah 3* Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	*Prioritas Daerah 2* Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	*Prioritas Daerah 1* Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	*Prioritas Daerah 2* Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi Prioritas Daerah 5 Mengembangkan kualitas infrastruktur
Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	*Prioritas Daerah 2.* Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	*Prioritas Daerah 1* Meningkatkan integritas kualitas SDM
Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	*Prioritas Daerah 1* Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	*Prioritas Daerah 2* Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi
Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	*Prioritas Daerah 1* Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	*Prioritas Daerah 5* Mengembangkan kualitas infrastruktur
Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	*Prioritas Daerah 4* Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	*Prioritas Daerah 3* Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan
Prioritas Nasional 8	*Prioritas Daerah 2.*	*Prioritas Daerah 6*

Prioritas Pembangunan Tahun 2026		
Nasional	**Provinsi Jawa Tengah**	**Kabupaten Karanganyar**
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata *Prioritas Daerah 4* Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar, Tahun 2026

Adapun gambaran keselarasan kebijakan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Nasional ditunjukkan dengan melalui dukungan pelaksanaan program sebagai berikut.

Tabel 4.6.

Dukungan Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional melalui Pelaksanaan Program Pembangunan di Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
1	***Prioritas Nasional 1*** **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	***Prioritas Daerah 4*** **Meningkatkan kondusifitas wilayah**	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL), TRANTIBUMLINMAS (SATPOLPP)**	**16.443.323.275**	**21.974.858.275**	**33.411.491.275**	
			Urusan Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)	*7.649.499.476*	*12.784.378.476*	*21.117.054.476*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Umum (BAKESBANGPOL)*
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	950.000.000	950.000.000	970.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.642.730.000	1.749.919.000	2.314.919.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	550.000.000	5.491.595.000	11.408.443.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200.000.000	125.600.000	160.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	800.000.000	799.600.000	1.803.084.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.506.769.476	3.667.664.476	4.460.608.476	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	*8.793.823.799*	*9.190.479.799*	*12.294.436.799*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)*
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.906.084.000	553.960.000	1.087.590.000	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	575.680.000	40.000.000	100.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.312.059.799	8.596.519.799	11.106.846.799	
2	***Prioritas Nasional 2*** **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.**	***Prioritas Daerah 2*** **Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi**	**URUSAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, PUPR (PROGRAM PENGELOLAAN SDA)**	**18.318.940.990**	**34.008.322.990**	**37.184.574.752**	
			Urusan Pangan	*70.000.000*	*90.000.000*	*125.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pangan*
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	55.000.000	75.000.000	110.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
			Urusan Kelautan Dan Perikanan	*95.000.000*	*263.000.000*	*328.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kelautan Dan Perikanan*
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	55.000.000	223.000.000	283.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.000.000	15.000.000	20.000.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
			Urusan Pertanian	*17.899.860.990*	*32.218.380.990*	*29.754.866.990*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanian*
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	292.557.600	10.395.057.600	13.078.058.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	23.000.000	3.446.248.400	3.811.797.400	
			PROGRAM PENGENDALIAN	40.000.000	85.000.000	90.000.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	24.442.400	174.442.400	129.442.400	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.000.000	382.771.600	412.791.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.509.860.990	17.734.860.990	12.232.777.090	
			Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	*254.080.000*	*1.436.942.000*	*6.976.707.762*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	254.080.000	1.436.942.000	6.976.707.762	
3	***Prioritas Nasional 3*** **Melanjutkan pengembngan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industrl kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	***Prioritas Daerah 2*** **Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi**	**URUSAN TENAGA KERJA, PARIWISATA, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PENANAMAN MODAL**	**14.543.158.176**	**23.105.470.676**	**32.127.804.176**	
			Urusan Tenaga Kerja	-	*1.371.692.500*	*2.244.784.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Tenaga Kerja*
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	1.185.192.500	1.878.419.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	74.579.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	186.500.000	291.786.000	
			Urusan Pariwisata	*5.518.731.891*	*5.880.081.891*	*9.427.913.891*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pariwisata*
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	350.866.000	275.866.000	588.366.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	105.000.000	300.000.000	1.409.777.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	5.000.000	5.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15.000.000	95.000.000	545.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.047.865.891	5.204.215.891	6.879.770.891	
			Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	*3.251.671.452*	*9.839.621.452*	*12.621.651.452*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Koperasi, Usaha*
			PROGRAM	7.940.800	7.940.800	7.940.800	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				*Kecil, Dan Menengah*
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.000.000	10.800.000	38.660.000	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000	1.840.000.000	2.099.991.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	40.000.000	575.000.000	647.140.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	84.000.000	84.000.000	84.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	24.000.000	4.200.500.000	5.929.900.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.990.730.652	3.096.380.652	3.789.019.652	
			Urusan Penanaman Modal	*5.772.754.833*	*6.014.074.833*	*7.833.454.833*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal*
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.000.000	50.000.000	150.000.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	65.000.000	65.000.000	265.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100.500.000	100.500.000	326.500.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	35.000.000	35.000.000	37.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.532.254.833	5.758.574.833	7.049.454.833	
		Prioritas Daerah 5 Mengembangkan kualitas infrastruktur	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN PERHUBUNGAN**	**146.128.650.690**	**156.498.088.690**	**203.939.809.394**	
			Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	*106.355.246.399*	*114.391.037.049*	*154.685.486.224*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	251.200.000	2.020.000.000	2.621.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	56.000.000	558.934.000	876.380.950	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	600.000.000	1.142.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.448.907.000	3.808.907.000	9.173.576.646	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.011.147.300	81.474.051.600	111.894.865.079	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	100.000.000	125.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	136.800.000	1.637.200.000	2.137.700.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.451.192.099	24.191.944.449	26.714.963.549	
			Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	*429.280.000*	*1.397.627.350*	*1.584.627.350*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	140.000.000	140.000.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	645.000.000	705.000.000	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	429.280.000	587.627.350	714.627.350	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	25.000.000	25.000.000	
			Urusan Pertanahan	*-*	*433.000.000*	*537.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pertanahan*
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	433.000.000	537.000.000	
			Urusan Perhubungan	*39.344.124.291*	*40.276.424.291*	*47.132.695.820*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	33.427.967.400	32.794.667.400	38.590.977.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.156.891	7.481.756.891	8.541.718.420	
4	***Prioritas Nasional 4*** **Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender**	***Prioritas Daerah 1*** **Meningkatkan integritas kualitas SDM**	**URUSAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**	**1.139.189.560.472**	**1.162.836.050.472**	**1.225.388.999.255**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
	serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.		**PERLINDUNGAN ANAK, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
			Urusan Pendidikan	*745.873.554.013*	*750.252.954.013*	*777.986.779.593*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan*
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.909.329.400	144.411.532.100	155.518.404.307	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	6.190.000	15.200.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	606.964.224.613	605.835.231.913	622.453.175.286	
			Urusan Kebudayaan	*1.640.000.000*	*2.060.000.000*	*2.485.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kebudayaan*
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	285.000.000	730.000.000	996.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.160.000.000	1.135.000.000	1.284.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	195.000.000	195.000.000	205.000.000	
			Urusan Kesehatan	*369.315.252.243*	*381.955.292.243*	*409.159.155.585*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kesehatan*
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.906.593.300	76.701.637.300	90.783.821.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.576.515.000	1.374.772.200	2.174.336.200	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.003.700	493.923.700	493.923.700	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	307.868.000	307.868.000	407.868.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	298.996.272.243	303.077.091.043	315.299.206.185	
			Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	*8.206.380.000*	*8.428.380.000*	*8.548.380.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	136.200.000	246.736.000	266.736.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.961.380.000	3.314.744.000	3.369.744.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.108.800.000	4.866.900.000	49.911.900.000	
			Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan	*3.770.798.933*	*3.835.048.933*	*4.626.668.933*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan*

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			Perlindungan Anak				*Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000	10.000.000	60.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.700.798.933	3.765.048.933	4.506.668.933	
			Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	*5.584.000.000*	*11.447.000.000*	*17.221.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepemudaan Dan Olahraga*
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	38.000.000	348.000.000	572.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.797.000.000	10.349.000.000	15.899.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	750.000.000	750.000.000	750.000.000	
			Urusan Perpustakaan	*4.798.575.283*	*4.857.375.283*	*5.362.015.144*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perpustakaan*
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	701.522.000	684.580.000	764.580.000	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	33.178.000	50.120.000	50.120.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.063.875.283	4.122.675.283	4.547.315.144	
			Urusan Penelitian Dan Pengembangan	*300.000.000*	*280.800.000*	*355.800.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan*
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	300.000.000	280.800.000	355.800.000	
5	***Prioritas Nasional 5*** **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**	***Prioritas Daerah 2*** **Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi**	**URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**13.265.603.909**	**13.545.185.409**	**15.281.570.299**	
			Urusan Perindustrian	-	*229.639.000*	*570.453.400*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perindustrian*
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	229.639.000	508.953.400	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	7.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	-	-	54.000.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			INDUSTRI NASIONAL				
			Urusan Perdagangan	*13.261.603.909*	*13.311.546.409*	*14.707.116.899*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perdagangan*
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	14.500.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	362.455.400	362.455.400	562.305.200	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	11.873.233	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	29.081.500	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	301.523.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.899.148.509	12.949.091.009	13.787.833.366	
			Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral*
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
6	***Prioritas Nasional 6*** **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan**	***Prioritas Daerah 5*** **Mengembangkan kualitas infrastruktur**	**URUSAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, TRANSMIGRASI**	**22.825.906.141**	**25.036.616.141**	**28.706.476.441**	
			Urusan Sosial	*6.707.839.679*	*8.307.149.679*	*9.273.769.979*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Sosial*
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.838.559.550	68.559.550	68.559.550	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	394.425.000	419.425.000	604.337.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.935.000	101.935.000	101.935.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	22.890.450	22.890.450	22.890.450	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.913.159.679	3.969.509.679	4.469.897.679	
			Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	*16.113.566.462*	*16.724.966.462*	*19.428.206.462*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*
			PROGRAM PENATAAN DESA	80.000.000	80.000.000	157.800.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.350.000.000	3.380.000.000	4.564.840.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN	7.607.600.000	8.091.000.000	8.486.960.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.010.966.462	5.108.966.462	6.153.606.462	
			Urusan Transmigrasi	*4.500.000*	*4.500.000*	*4.500.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Transmigrasi*
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
7	***Prioritas Nasional 7*** **Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**	***Prioritas Daerah 3*** **Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan**	**URUSAN PERENCANAAN, KEUANGAN, UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH), UNSUR PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH), KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN, KEARSIPAN, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD), KEWILAYAHAN**	**643.611.613.775**	**575.760.533.275**	**537.792.442.755**	
			Urusan Perencanaan	*5.751.765.175*	*6.820.965.175*	*7.527.907.314*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perencanaan*
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.000.000	492.720.000	477.320.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	670.000.000	964.800.000	1.039.800.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.571.765.175	5.363.445.175	6.010.787.314	
			Urusan Keuangan	*449.118.748.763*	*363.997.219.772*	*305.900.385.320*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Keuangan*
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	384.950.669.269	310.658.109.786	249.645.481.786	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.107.675.672	572.775.672	1.005.275.672	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	3.790.160.430	2.819.360.430	4.234.846.180	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			DAERAH				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.270.243.392	49.946.973.884	51.014.781.682	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	*44.031.047.622*	*39.352.363.122*	*48.251.385.602*	*Sekretariat Daerah*
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.107.737.000	11.515.417.000	13.148.267.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	10.742.344.500	865.670.000	1.373.673.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.180.966.122	26.971.276.122	33.729.445.602	
			Unsur Pengawasan (Inspektorat Daerah)	*11.903.559.095*	*11.903.559.095*	*12.785.059.095*	*Inspektorat Daerah*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.500.000.000	2.500.000.000	2.486.075.500	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.080.000.000	1.080.000.000	1.471.222.175	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.323.559.095	8.323.559.095	8.827.761.420	
			Urusan Kepegawaian	*7.063.920.883*	*7.706.420.883*	*7.747.609.843*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepegawaian*
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	880.699.700	1.380.699.700	1.675.199.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.183.221.183	6.325.721.183	6.072.410.143	
			Urusan Pendidikan Dan Pelatihan	*537.005.000*	*517.005.000*	*698.505.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan*
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	537.005.000	517.005.000	698.505.000	
			Urusan Komunikasi Dan Informatika	*7.555.268.930*	*8.075.051.930*	*8.633.468.930*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Komunikasi Dan Informatika*
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	591.612.300	821.354.900	850.387.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.687.542.000	1.671.542.000	1.977.322.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.114.630	5.582.155.030	5.805.759.030	
			Urusan Statistik	*8.001.200*	*8.001.200*	*10.607.200*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Statistik*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	8.001.200	8.001.200	10.607.200	
			Urusan Persandian	*111.500.000*	*121.000.000*	*121.000.000*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Persandian*
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	111.500.000	121.000.000	121.000.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
			PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Urusan Kearsipan	*71.000.000*	*71.000.000*	*111.734.722*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kearsipan*
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	67.226.000	67.226.000	107.960.722	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3.774.000	3.774.000	3.774.000	
			Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	*5.570.364.028*	*5.638.964.028*	*6.039.524.028*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.007.103.000	994.613.000	1.002.613.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.940.000	31.940.000	23.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.060.000	8.060.000	12.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.473.261.028	4.554.351.028	4.951.911.028	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	*48.610.808.483*	*62.676.958.483*	*63.045.562.483*	*Sekretariat DPRD*
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.095.685.340	20.049.608.495	20.476.609.495	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.515.123.143	42.627.349.988	42.568.952.988	
			Urusan Kewilayahan	*63.278.624.596*	*68.872.024.587*	*76.919.693.218*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kewilayahan (Kecamatan)*
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	460.194.450	87.640.275	127.603.800	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.397.943.350	13.481.015.750	15.400.811.830	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.198.364.650	314.561.650	364.953.650	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.522.153.700	4.106.039.150	4.219.339.150	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	469.212.000	139.979.400	260.258.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.230.756.446	50.742.788.362	56.546.726.788	
8	***Prioritas Nasional 8***	***Prioritas Daerah 6*** **Meningkatkan**	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP,**	**15.817.546.480**	**17.693.996.480**	**28.061.593.980,00**	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp.)			Pelaksana
				RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	**kualitas lingkungan hidup**	**KEHUTANAN, TRANTIBUM LINMAS (BPBD)**				
			Urusan Lingkungan Hidup	*11.751.416.781*	*13.281.416.781*	*22.566.494.281*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Lingkungan Hidup*
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	75.000.000	305.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	270.212.300	187.000.000	497.439.850	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	34.800.000	533.218.300	537.254.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	5.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.800.000	67.470.500	67.470.500	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	100.000.000	183.083.200	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	27.529.500	27.529.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.981.116.600	1.578.530.300	9.430.249.100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.330.487.881	10.712.668.181	11.513.467.331	
			Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)	*4.066.129.699*	*4.412.579.699*	*5.495.099.699*	*Perangkat Daerah pelaksana Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kebencanaan)*
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.686.936.000	1.086.136.000	1.499.196.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.379.193.699	3.326.443.699	3.995.903.699	
			TOTAL PAGU	**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026 (diolah)

Rekapitulasi dukungan anggaran belanja program tahun 2026 untuk masing-

masing prioritas nasional, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.7.

Dukungan Anggaran Belanja Program Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	16.443.323.275	21.974.858.275	33.411.491.275
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	18.318.940.990	34.008.322.990	37.184.574.752
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	160.671.808.866	179.603.559.366	236.067.613.570
4.	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	1.139.489.560.472	1.163.116.850.472	1.225.744.799.255
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	13.265.603.909	13.545.185.409	15.281.570.299
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	22.825.906.141	25.036.616.141	28.706.476.441
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	643.611.613.775	575.760.533.275	537.792.442.755
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	15.817.546.480	17.693.996.480	28.061.593.980
TOTAL ANGGARAN (Rp)		**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026 (diolah)

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN), yang ditetapkan Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita, berikut arah kebijakan bidang urusan pemerintah kabupaten terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

   Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan arah kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang diarahkan pada percepatan dan akselerasi transformasi pemerintahan digital di daerah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital, integrasi data dan aplikasi antar perangkat daerah, serta peningkatan keamanan informasi.

   Selain itu, Pemerintah Kabupaten mendorong peningkatan kapasitas

sumber daya manusia aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital dan memperluas keterbukaan informasi publik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat serta mudah diakses masyarakat.

Arah kebijakan ini menjadi landasan bagi Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang adaptif, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Urusan Statistik

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengarahkan kebijakan di bidang statistik pada penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi penyelenggaraan statistik daerah sebagai bagian dari Sistem Statistik Nasional (SSN). Kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penyediaan data yang akurat dan berkualitas, penerapan standar statistik, serta integrasi data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.Melalui penguatan tata kelola statistik tersebut, diharapkan tersedia data yang terpadu, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Urusan Persandian

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengarahkan kebijakan di bidang persandian pada penguatan keamanan siber dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan perlindungan data dan sistem informasi pemerintah, penguatan persandian, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola keamanan informasi yang baik.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, mandiri, dan terpercaya, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital daerah. Dengan demikian, bidang persandian turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan.

Berikut gambaran dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas Asta Cita di Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 4.8.

Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Asta Cita
(Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025)

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Asta Cita 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen
				1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.000.000	1.000.000	121.000.000	1 Laporan	1 Laporan
Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	4.552.800	4.552.800	4.552.800	1 Permohonan	1 Permohonan
				2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	240.689.550	102.289.550	109.259.550	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
				2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	36.946.100	415.328.700	437.391.700	1 Media	1 Media
Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.617.730.000	1.744.119.000	2.309.119.000	25 Orang	25 Orang
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 1						**1.901.918.450**	**2.268.290.050**	**2.982.323.050**		
Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0	20.000.000	20.000.000	-	6 laporan
			PROGRAM PENANGANAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 Laporan	1 Laporan

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
		hijau, dan ekonomi biru.	KERAWANAN PANGAN		Gizi Kabupaten/Kota					
Kelautan Dan Perikanan	Pemenuhan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	15.000.000	15.000.000	20.000.000	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha
Pertanian	Peningkatan produksi pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25.000.000	1.199.500.000	1.689.500.000	1 Laporan	2 Laporan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	723.248.400	828.797.400	0 Laporan	4 Laporan
					Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 2	**45.000.000**	**1.962.748.400**	**2.563.297.400**		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM	Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	54.000.000	54.000.000	54.000.000	35 Orang	35 Orang
Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	275.000.000	250.000.000	275.000.000	26 Objek	26 Objek
Pariwisata	Peningkatan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	103.093.400	99.506.350	119.506.350	10 Unit	4 Unit
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	0	5.000.000	5.000.000	4 Laporan	4 Laporan

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 3						**432.093.400**	**408.506.350**	**453.506.350**		
Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1.038.118.000	1.038.118.000	1.038.118.000	2 unit	2 unit
				1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.740.218.950	7.723.878.100	7.723.878.100	1 Paket	1 Paket
				1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	415.673.900	360.447.900	360.447.900	4 Dokumen	4 Dokumen
				1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.958.345.000	46.036.205.000	59.534.194.200	36 Dokumen	36 Dokumen
Sosial	Percepatan penurunan kemiskinan melalui graduasi		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	48.200.000	48.200.000	48.200.000	240 Orang	240 Orang
				1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	264.270.000	3.395.490.000	3.676.810.300	505 Orang	4096 Orang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10 Orang	10 Orang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	20.895.000	6.937.500	6.937.500	2 Laporan	2 Laporan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	95.200.000	110.000.000	110.000.000	4 Laporan	4 Laporan
Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif dan prestasi olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	0	210.000.000	295.000.000	15 Orang	7 Orang
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 4						**46.978.120.850**	**58.939.276.500**	**72.803.586.000**		

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air	Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	400.000.000	5.805.071.996	-	12 KM
Perhubungan	Peningkatan konektivitas antar wilayah dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.800.000.000	30.800.000.000	36.300.000.000	280 buah	280 buah
Penanaman Modal	Pemenuhan target realisasi Penanaman Modal		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	35.000.000	35.000.000	37.500.000	3 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha
Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	208.765.000	208.765.000	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 5						**30.835.000.000**	**31.443.765.000**	**42.351.336.996**		
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	429.280.000	467.627.350	594.627.350	409 Lokasi	409 Lokasi
Sosial	Percepatan penurunan kemiskinan melalui graduasi		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.838.559.550	68.559.550	68.559.550	3 Lembaga	3 Lembaga
Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0	1.185.192.500	1.814.144.000	200 Orang	200 Orang

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
	produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan kerja		TENAGA KERJA							
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa		PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	70.000.000	70.000.000	147.800.000	1000 Unit	1000 Unit
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 6						**2.337.839.550**	**1.791.379.400**	**2.625.130.900**		
Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah dugital di daerah	Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperaabilitas data dan integrasi layanan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	- Aplikasi	4 Aplikasi
				2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	44.902.000	8.902.000	8.902.000	1 Dokumen	1 Dokumen
Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550.000.000	5.491.595.000	11.408.443.000	500 Orang	500 Orang
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 7						**714.902.000**	**5.620.497.000**	**11.537.345.000**		
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.379.100.000	40.000.000	111.680.000	365 laporan	12 laporan
				1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	409.680.000	313.150.000,00	100.000.000	85 Laporan	12 Laporan
Lingkungan Hidup	Penguatan lingkungan hidup		PROGRAM PENGELOLAAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di	1.907.916.600	1.548.530.300,00	3.644.349.100	10000 Ton	30000 Ton

Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)			Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026	
						RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
	yang berkualitas		PERSAMPAHAN		TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					
Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	195.000.000	195.000.000	205.000.000	5 Objek	5 Objek
Perpustakaan	Peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	33.178.000	50.120.000	50.120.000	2 Orang	2 Orang
Kearsipan	Penguatan tertib arsip dan mengembangkan memori kolektif bangsa		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25.923.900	25.923.900	24.143.150	25 Laporan	25 Laporan
				2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	4.032.000	4.032.000	4.066.000	25 Pengguna	25 Pengguna
Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.617.730.000	1.744.119.000	2.309.119.000	25 Orang	25 Orang
Jumlah Anggaran Pendukung Asta Cita 8						**6.572.560.500**	**3.920.875.200**	**6.448.477.250**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, 2026

Rekapitulasi dukungan anggaran belanja program tahun 2026 berdasarkan Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Asta Cita, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.

Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Asta Cita (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025)

NO	ASTA CITA	ANGGARAN (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.901.918.450,00	2.268.290.050,00	2.982.323.050,00
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	45.000.000,00	1.962.748.400,00	2.563.297.400,00
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	432.093.400,00	408.506.350,00	453.506.350,00
4.	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	46.978.120.850,00	58.939.276.500,00	72.803.586.000,00
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	30.835.000.000,00	31.443.765.000,00	42.351.336.996,00
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	2.337.839.550,00	1.791.379.400,00	2.625.130.900,00
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	714.902.000,00	5.620.497.000,00	11.537.345.000,00
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur	6.572.560.500,00	3.920.875.200,00	6.448.477.250,00
TOTAL ANGGARAN (Rp)		**89.817.434.750,00**	**106.355.337.900,00**	**141.765.002.946,00**

Dengan berpedoman pada Form C-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, dukungan program prioritas daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.10.

Dukungan Kabupaten Karanganyar terhadap
Pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026
(Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025)

Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek / Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Urusan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)			Indikator	
									RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
Pro SN 1 Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	264.270.000	3.395.490.000	3.676.810.300	505 Orang	4096 Orang
							1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300	100 %	100 %
	Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300	100 %	100 %
					Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	41.800.000	25.000.000	25.000.000	10 Dokumen	10 Dokumen
	Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,	0	200.000.000	275.000.000	-	40 Dokumen

Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek / Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Urusan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)			Indikator	
									RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
								dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
Pro SN 2 Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	254.080.000	1.036.942.000	1.171.635.766	5 KM	5 KM
Pro SN 3 Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.500.000	63.700.000	63.700.000	5 Dokumen	5 Dokumen
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.958.345.000	46.036.205.000	59.534.194.200	36 dokumen	36 dokumen

Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek / Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Urusan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)			Indikator	
									RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
		Pengendalian Penyakit											
	Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.958.345.000	46.036.205.000	59.534.194.200	36 dokumen	36 dokumen
					Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300	100 %	100 %
	Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Cakupan Penemuan Kasus TBC	%	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	43.505.000,00	113.395.000,00	118.195.000,00	6.750 Orang	6.750 Orang
							1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	264.270.000	3.395.490.000	3.676.810.300	505 Orang	4096 Orang
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	%	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1.038.118.000	1.038.118.000	1.038.118.000	2 unit	2 unit
	Makanan	Meningkatnya	Prevalensi	%	Kesehatan	PROGRAM	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan					

Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek / Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Urusan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)			Indikator	
									RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
	Bergizi Gratis	Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
					Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen
					Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	48.846.000.000	48.846.000.000	48.846.000.000	4.60 KM	4.60 KM
					Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen
Pro SN 4 Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	%	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.800.000	31.800.000	31.800.000	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang				1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	40.800.000	31.800.000	31.800.000	1 Dokumen	1 Dokumen

Pro SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek / Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Urusan	Program	Kode	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)			Indikator	
									RKPD 2026	APBD 2026	P RKPD 2026	Sebelum	Sesudah
	Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran		Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus					Bidang Pendidikan					
Pro SN 5 Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0	20.000.000,00	20.000.000,00	-	6 laporan

Dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) hingga Tahun 2026 di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Strategis Nasional 1, yaitu Pengentasan Kemiskinan.
   ProSN 1 dengan proyek :
   - Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, didukung oleh Urusan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sekolah rakyat didukung Urusan Sosial dengan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Lingkungan Hidup dengan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
   - Pembangunan 3 Juta Rumah didukung oleh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung melalui Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
2. Program Strategis Nasional 2, yaitu Ketahanan Pangan
   ProSN 2 dengan proyek Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, didukung oleh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3. Program Strategis Nasional 3, yaitu Kesehatan Untuk Semua
   Pro SN 3 dengan proyek :
   - Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, didukung oleh Urusan Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
   - Pemeriksaan Gratis didukung oleh Uruan Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
   - Jaminan Kesehatan Nasional didukung oleh Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Urusan Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial melalui Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota.
   - Penuntasan *Tuberkulosis* (TBC), didukung oleh Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberkulosis* dan Urusan Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial melalui Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
   - Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota didukung oleh Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengembangan Rumah Sakit
   - Makan Bergizi Gratis didukung oleh Urusan Kesehatan Program

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan melalui Pemeliharaan Berkala Jalan, Urusan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dan Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

4. Program Strategis Nasional 4, yaitu Perluasan Akses Pendidikan
   Pro SN 4 dengan proyek Perluasan Akses Pendidikan didukung oleh Urusan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan melalui Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
5. Program Strategis Nasional 5, yaitu Pertumbuhan Ekonomi
   Pro SN 5 melalui proyek :
   - Pengendalian Inflasi didukung oleh Urusan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
   - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, didukung oleh Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota.

Progress pelaksanaan ProSN berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
   KDKMP di Kabupaten Karanganyar saat ini telah terbentuk sebanyak 177 KDKMP yang tersebar di 17 kecamatan, dengan rincian 88 gerai telah selesai dibangun, 61 gerai masih proses pembangunan dan 28 gerai belum dibangun.
2. Makanan Bergizi Gratis (MBG)
   Untuk pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karanganyar telah terbentuk sebanyak 135 SPPG, dengan rincian statusnya 95 unit sudah beroperasional, 9 unit belum operasional dan 31 unit masih dalam proses pembangunan, dengan penerima total manfaat sebanyak 260.966 orang.

Adapun progress pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.11.

Progress Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hingga Triwulan Kedua di Tahun 2026

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
1.	Jalan Halus Bebas Jeglongan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Pada tahun 2025 pencapaian kinerja untuk kemantapan jalan sebesar 83,40% (727 km) dari total panjang jalan kabupaten (877,33km) • Jalan kondisi baik : 67,53% (588,40 km) • Jalan kondisi sedang : 15,91% (138,61 km) • Jalan kondisi rusak ringan : 8,20% (71,41 km) • Jalan kondisi rusak berat : 6,87% (59,05 km) • Jalan yang masih perlu dipelihara dan ditingkatkan = jalan kondisi sedang, jalan kondisi rusak ringan dan jalan kondisi rusak berat = 30,88% 9269,07 km) • Catatan realisasi kinerja : - Alokasi anggaran Alokasi anggaran Rp.2,8 M yang berada dari DAU untuk pembangunan 8 Ruas jalan lingkungan. - Anggaran dari DAU Rp.68 M untuk rehabilitasi 12 ruas jalan Kabupaten. - Alokasi dari anggaran bankeu Rp 32 M untuk 8 ruas jalan dan 1 pembangunan jembatan. - Alokasi anggaran Rp. 2 M untuk pemeliharaan berkala 7 Ruas jalan kabupaten	Total Pagu Rp.172.942.642.261 anggaran terserap Rp.159.979.191.287	Tahun 2026 DPUPR menetapkan target 83,5 % kemantapan jalan, dengan kondisi 269,07 km jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2025. Alokasi anggaran yang ada diharapkan dapat menurunkan kerusakan jalan sekitar 5% dari total jalan yang masih perlu ditingkatkan dan dipelihara.	- Alokasi anggaran Pembangunan Jalan (DAU) Rp. 16.155.000.000 - Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Rp.48.846.000.000 - Rekonstruksi Jalan (Opsen kendaraan) Rp.10.402.747.300 - Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 4.141.522.300 - Pelebaran jalan menuju standar (bankeu prov) Rp.19.000.000.000 TOTAL = Rp 100.474.051.600,00	Target kemantapan jalan di akhir RPJMD adalah 85,5 %	Capaian s/d 2025 dari akhir RPJMD = 97,5%

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			- dan yang terakhir Rp. 9 M untuk pemeliharaan rutin yang tersebar di UPT Kecamatan					
2.	Serba gratis cukup dengan KTP (berobat, sekolah, PBB, paket sembako) dan internet gratis di setiap desa	Dinas Kesehatan	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: 12 Dokumen	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: Rp52.690.461.600	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: 12 Dokumen	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: Rp. 40.814.340.000 (kebutuhan sampai dengan Desember Tahun 2026 sebesar Rp. 58.707.180.000)		
			Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: 12 Dokumen	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: Rp700.000.000,00	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: 12 Dokumen	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS (Pelayanan Puskesmas Gratis: Rp400.000.000,00		
		Dinas Sosial	3.080 Paket	Rp. 616.000.000	3.600 Paket	Rp. 720.000.000		
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikasi ISO 27001:2022 tentang Sistem manajemen Keamanan Informasi sebagai syarat pemenuhan akses data NIK Karanganyar ke Ditjen Dukcapil	Rp. 100.000.000	Pemutakhiran data NIK, Integrasi layanan berbasis NIK, kolaborasi lintas layanan	Rp. 120.000.000		
			Fasilitasi internet gratis di 3 titik pos ronda di lokasi sbb: 1. DGS AO WMS Kecamatan Jaten Alamat : Kecamatan Jaten Jati RT. 01/ RW. 07, Jati Koordinat : -7.595766, 110.919876 BW : 20 Mbps SSID : Sesarengan_Mbangun_Karanganyar	Rp. 4.500.000				Tahun 2026 pada DPA penetapan belum direncanakan untuk penambahan titik terfasilitasi internet gratis baru

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			2. DGS AO WMS Kecamatan Karanganyar Alamat : Kecamatan Karanganyar Bejen RT. 04/ RW. 11, Bejen Koordinat : -7.602387, 110.973343 BW : 20 Mbps 3. DGS AO WMS Kecamatan Tasikmadu Alamat : Kecamatan Tasikmadu Cakrukku RT. 02/ RW. 07, Karangmojo Koordinat : -7.5700003, 110.9193897 BW : 20 Mbps SSID : Sesarengan_Mbangun_Karanganyar					karena keterbatasan anggaran. Diharapkan pada Anggaran Perubahan untuk bisa diberikan anggaran.
3.	Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dalam mendukung Program Unggulan Bupati pupuk murah dan mudah, Dispertan PP melaksanakan pengawasan/pendampingan pupuk bersubsidi melalui monitoring lapangan ke kios/penyalur (KPL dan PPTS) di berbagai kecamatan yang dilakukan bertahap pada Januari 2026 dan dilanjutkan pada september-november 2025. Monitoring dan pembinaan kepada PPTS guna memastikan bahwa di PPTS : 1. Stok pupuk bersubsidi semua jenis selalu tersedia, sehingga petani selalu dapat menebus sewaktu waktu 2. Harga jual nya benar-benar sesuai HET yang ditetapkan pemerintah/ tidak di atas nya. 3. Penguatan pelaksanaan dilakukan melalui rapat koordinasi penyaluran	Rp. 18.340.000	Fasilitasi dan Pelaksanaan Program Pupuk Direncanakan untuk penyaluran pupuk NPK sebanyak 1.300 kg kepada sasaran program sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Target Kinerja : Kelompok Tani dengan komoditas Ubi Manohara (Hibah Pupuk) Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Rp. 50.000.000 Rp. 12.000.000		

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			pupuk bersubsidi TA 2025 (12 Feb 2025) serta rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi 2025 sekaligus updating RDKK 2026 (29 Sept 2025). Realisasi Kinerja : 17 Kecamatan yang diawasi Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2025 : Urea Alokasi : 21.000.000 kg Penyaluran : 83,73% NPK Alokasi : 18.400.000 kg Penyaluran : 97,44% Organik Alokasi : 2.600.000 kg Penyaluran : 90,17% ZA Alokasi : 46.250 kg Penyaluran : 43,92%		direncanakan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran melalui kegiatan koordinasi/rapat serta monitoring lapangan. Target Kinerja : 17 Kecamatan (Pengawasan dilakukan pada PPTS) Alokasi Pupuk untuk 2026 (awal) : Urea : 18.800.000 kg NPK : 18400.000 kg Organik : 2.500.000 kg ZA : 59.800 kg			
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (IATD) / Sumur Pertanian dan Irigasi Perpipaan Realisasi kinerja kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dilaksanakan pada 19 kelompok tani, terdiri dari : - 18 kelompok tani untuk pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (IATD) - 1 kelompok tani untuk pembangunan irigasi perpipaan	Rp. 2.897.510.000	Pembangunan Sumur Irigasi Pertanian direncanakan untuk menghasilkan 14 unit prasarana pertanian melalui pembangunan sumur irigasi pada kelompok tani di beberapa kecamatan.	Rp. 2.213.000.000,00		
		Dinas Pekerjaan Umum dan	Capaian irigasi berfungsi dengan baik 76,5% atau 360.591 m, yang terdiri dari 74% irigasi kondisi baik dan 2,5%	Total pagu Rp 7.016.278.220 terserap	TARGET 2026 : 77 % jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik ,	Tahun 2026 mendapatkan 1 paket pekerjaan yang berasal	79,00%	

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
		Perumahan Rakyat	kondisi rusak ringan Realisasi Kinerja : Rehabilitasi jaringan irigasi yang berasal dari DAK 5 D.I dan dari DAU 8 D.I	Rp 6.165.998.000	atau 362.947 m jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik	dari DAU, sedangkan dari bankeu terdapat 8 paket dengan total anggaran Rp.3 M		
4.	Lapangan kerja semakin luas dan UMKM mendapatkan fasilitas	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Fasilitasi Pelatihan Kerja : • Peserta Pelatihan dari APBD = 364 orang • Peserta Pelatihan dari APBN = 96 orang • Peserta Pelatihan Seleksi Magang Jepang = 150 orang TOTAL peserta pelatihan yang difasilitasi = 610 orang Rincian: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sumber Dana DBHCHT dengan Output 184 Orang Yang meliputi Pelatihan : a. Pelatihan Menjahit (3 Paket) b. Pelatihan Pengelasan SMAW 1 G (2 Paket) c. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (3 Paket) d. Pelatihan Fotografi (1 Paket) e. Pelatihan Tukang Bangunan Gedung (1 Paket) f. Pelatihan Barber (2 Paket) g. Pelatihan Barista (2 Paket h. Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi (2 Paket)	Rp. 1.862.445.000	1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sumber Dana DBHCHT dengan Output 100 Orang yang meliputi : a.Program Kejuruan Teknik las (10 Orang) b.Program Kejuruan Otomotif (10 Orang) c.Program Kejuruan Menjahit (10 Orang) d.Program Kejuruan Processing (Barista) (10 Orang) e.Aneka Kejuruan (60 Orang) 2. Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Las pembuatan Tribun *Knockdown* Sumber Dana APBD 2026 dengan Output 10 Orang 3. Pelatihan Daerah Magang Jepang Sember Dana APBD dengan Target Output 140 Peserta yang	Rp. 1.185.192.500		1 tahun kurang lebih 200-300 org yang difasilitasi pelatihan. Di tahun 2025 ada 346 orang

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
			i. Pelatihan Sablon (2 Paket) 2. Pelatihan dan Penempatan Kerja Industri yang terdiri dari 4 perusahaan dengan output 100 orang 3. Pelatihan Persiapan Seleksi Magang Jepang (pra-smart) dengan Output Peserta 10 Orang 4. Seleksi Magang Jepang dengan target output sebesar 140 Orang 5. Pelatihan Kerjasama Baznas dengan Output 80 Orang dengan Program Pelatihan : a. Pelatihan Make Up Artis (60 Orang) b. Pelatihan Z-Coffee (10 Orang) c. Pelatihan Z-Auto (10 Orang) 6. Pelatihan *Tailor Made Training* Sumber Dana APBN BPVP Surakarta dengan Output 48 Orang dengan Program Pelatihan : a. Pelatihan Ms. Office Dasar Untuk Pengurus KDKMP (32 Orang) b. Pelatihan Comercial Cookery untuk Juru Masak SPPG 7. Pelatihan *Project Based Learning* dengan sumber Anggaran APBN BPVP Surakarta dengan Output 48 orang yang meliputi : a. Pelatihan Pembuatan Konten Visual Untuk Media Sosial (16 Orang) b. Pelatihan Modifikasi Sistem Kendali Jarak Jauh dan Penambahan Aksesoris Kendaraan Ringan (16 Orang) c. Pelatihan Automa*tic Irrigation System* (16 Orang)		merupakan peserta lolos seleksi di tahun 2025 4. Pelaksanaan Seleksi Magang Jepang Tahun 2026 Sumber Dana APBD dengan target output 160 orang 5. Pelatihan Vokasi Nasional Sumber Dana APBN BPVP Surakarta dengan output 112 Orang yang meliputi : a. Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi (16 Orang) b. Pelatihan Pengelasan GMAW 3G (16 Orang) c. Pelatihan Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi (16 Orang) d. Pelatihan Desain Grafis Muda (16 Orang) e. Pelatihan Operator Sewing (16 Orang) f. Pelatihan Barista (16 Orang)			

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
					g. Pelatihan Barber (16 Orang)			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (memfasilitasi pencari kerja)	Rp. 7.997.400	-	-	24 laporan	tahun 2026 tidak ada kegiatan ini karena tidak ada anggaran
			Job Fair/Bursa Kerja (memfasilitasi 1500 pencaker)	Rp. 34.800.000	*Job Fair*/Bursa Kerja (memfasilitasi pencaker CPMI, 10 Perusahaan CPMI)	30.000.000	50 orang	
			Pelatihan IKM (Industri Kecil Menengah) : 1. Sentra Kerajinan Bambu (20 peserta) 2. Bimbingan teknis persiapan kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja program perluasan lapangan kerja industri dan sosialisasi kegiatan Solo Great Sale wilayah Karanganyar untuk IKM sejumlah 20 peserta. 3. Pelatihan Melinting Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan dana alokasi DBHCHT untuk 163 orang buruh pabrik rokok, pelaksanaan selama 5 hari dengan materi softskill dan produktivitas serta teknik dan 4. Workshop Srawung Budaya Kreatif IKM Sentra Batik sejumlah 30 peserta.	Rp. 477.027.050				
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil. Transmigrasi, Energi dan	Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha dengan mensosialisasikan proses pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM, dilaksanakan bulan Februari 2025 dengan peserta sebanyak 30 orang pelaku UMKM	Rp. 15.000.000	Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha dengan mensosialisasikan proses pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM, direncanakan peserta	Rp. 11.000.000		

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
		Sumber Daya Mineral			sebanyak 20 orang pelaku UMKM			
			Sosialisasi Pemberdayaan Kemitraan Usaha dengan tujuan memberikan informasi kepada UMKM bagaimana caranya bisa akses dan masuk ke minimarket modern, dilaksanakan bulan Februari 2025 dengan peserta sebanyak 40 orang pelaku UMKM	Rp. 20.000.000	Sosialisasi Pemberdayaan Kemitraan Usaha, direncanakan peserta sebanyak 20 orang pelaku UMKM	Rp. 11.000.000		
			Pelatihan Penggunaan dan Pemanfaatan AI, dilaksanakan bulan Oktober 2025 selama 2 hari dengan peserta sebanyak 30 orang pelaku UMKM	Rp. 37.000.000	Pelatihan Manajemen Keuangan, direncanakan peserta sebanyak 20 orang pelaku UMKM	Rp. 54.000.000		
5.	Modal usaha 10-30 juta setiap Karang Taruna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NIHIL					
6.	Bantuan keuangan 100 juta setiap desa per tahun	BKD	Difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang merata ke seluruh pelosok Karanganyar, memastikan jalan halus bebas jeglongan	-	Sementara difokuskan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang merata ke seluruh pelosok Karanganyar, memastikan jalan halus bebas jeglongan	-	162 Desa x Rp 100.000.000,00 = 16.200.000.000,00 per Tahun (2027 s.d. 2030)	
7.	Insentif untuk guru ngaji, linmas, penjaga tempat ibadah,	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	400 Orang Guru Pengajar Keagamaan Non Formal dan Penjaga Rumah Ibadah. @ Rp. 600.000,00	Rp 240.000.000,00	1. Penjaga Rumah Ibadah sebanyak : 3.362 orang @ Rp. 600.000,00 2. Insentif Guru Keagamaan sebanyak :	1. Rp. 2.017.200.000,00 2. Rp. 2.047.200.000,00 Jumlah kebutuhan anggaran Rp. 4.064.400,000,00		

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah Pelaksana	Yang Sudah Dilaksanakan di Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Target Kinerja di Tahun Terakhir RPJMD (Tahun 2029)	Catatan
			Realisasi Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Rencana Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)		
	kader Posyandu dan guru				1.706 orang @ Rp. 1.200.000,00			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	* Tersalurnya Insentif Kader Posyandu utk 9022 orang, * Terlaksananya pembinaan Kader Posyandu di 177 Desa dan Kelurahan, * Terlaksananya Rakornas Posyandu di Jakarta	Posyandu : Rp. 5.493.600.000,-	* Penyaluran Insentif Kader Posyandu sejumlah 9386 orang Kader, * Pelaksanaan Lomba Kader Posyandu di 17 Kec, * Pelaksanaan Rakor dan Evaluasi Posyandu	Posyandu : Rp. 5.715.000.000,- Kekurangan anggaran Rp. 195.000.000,-	* Tersalurnya Insentif Kader Posyandu, * Terlaksananya pembinaan Kader Posyandu di Desa dan Kelurahan, * Terlaksananya Rakornas Posyandu, *Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Posyandu di Kab. Karanganyar, Terlaksananya Lomba Kader Posyandu di Kab Karanyanyar	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Insentif Guru Swasta Sekolah Dasar (SD)	-	722	Rp. 722.000.000		
			Insentif Guru Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	422	Rp. 422.000.000		
			Insentif Guru Swasta PAUD (/TK/KB/STS/TPA)	Pagu Rp 1.350.000 Volume 1.350 Realisasi Rp 788.000.000 Volume 788	1.440	Rp. 1.440.000.000		
			Insentif Guru Swasta Tutor PKBM	-	225	Rp. 225.000.000		

Sumber: Perangkat Daerah Pengampu Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar, 2026

Progres Implementasi 35 Program Delegasi Gubernur Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.12.

Implementasi 35 Program Delegasi Gubernur Ke Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Karanganyar

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
1	PP	Melahirkan Pemerintahan *yang Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;	Peningkatan TPP ASN	TPP ASN telah diskemakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rp. 384.412.901.059	Rp. 323.379.729.914	Rp. 350.861.037.440
			Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *)	Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah telah diskemakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rp. 15.703.036.094	Rp. 15.242.792.983	Rp. 15.185.029.710
			~~Peningkatan Gaji Perangkat Desa~~ Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Desa Berprestasi	NIHIL			
			Pendidikan dan Pelatihan ASN	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum	3.000 orang	2.600 orang	2.700 orang
			Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah	NIHIL			
			Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Rapat Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100 orang	150 orang	100 orang
			Beasiswa kepada ASN	NIHIL			
2	PP	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan wisata ramah muslim	Tahun 2025 pendataan, di 2026 sosialisasi dan monev	0 unit	2 unit	0 unit
			Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah	Konversi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda)	0 BUMD	1 BUMD	0 BUMD
			Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah	Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Karanganyar (Perseroda)	0 SK	1 SK	0 SK
3	PP	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional,	Pembangunan lumbung kesejahteraan				
			Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora	Produk Unggulan berupa makanan (Permen Jahe) sudah ekspor ke Luar	0 Produk	1 Produk	0 Produk

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
		Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		Negeri, namun belum bekerja sama dengan diaspora			
			Sistem Informasi Desa (SID)	Prodeskel	162 desa	162 desa	162 desa
			Penguatan tim tanggap bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	6 Desa	2 Desa	6 Desa
4	PP	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Verifikasi dan Validasi dalam rangka penyiapan Database Rumah Layak Huni	Pendataan BNBA Rumah Tidak Layak Huni, verifikasi BNBA Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan PK Rumah Tidak Layak Huni	10 unit	10 unit	582 unit
			Penyiapan Data Intervensi Teknis *Backlog* Perumahan	Pendataan dan intervensi *Backlog*	17.000 BNBA	20.000 BNBA	17.811 BNBA
5	PP	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama	Pembentukan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian)	0 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan	0 desa/kelurahan
			Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi	-	15 kelurahan 15 desa	-
7	PI	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	NIHIL			
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	NIHIL			
8	PI	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Pemetaan sasaran desa wisata		20 unit	2 unit	30 unit
			Penambahan anggaran				
9	PI	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Pembentukan Kelembagaan	NIHIL			
10	PA	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi, Mengoptimalkan Peran UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) dan anti korupsi; e-learning penyelenggaraan program pengendalian gratifikasi	0 OPD	46 OPD	0 OPD
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman tentang Gratifikasi	-	15 kelurahan 15 desa	-
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar SMA, SMK	NIHIL			
11	PA	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Spesialis keliling setiap desa	Speling terintegrasi dg CKG	45 desa	47 desa	23 desa
			Pelayanan kesehatan keliling	Pelayanan kesehatan keliling	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan
			Puskesmas pembantu setiap desa	Pembangunan Puskesmas Pembantu	56 Pustu	56 Pustu	56 Pustu
			Pelayanan kesehatan setiap desa	Pelayanan kesehatan setiap desa	144 PKD	144 PKD	144 PKD

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
12	PA	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Penetapan SMA/SMK Unggulan di Jawa Tengah	NIHIL			
13	PA	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan	Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 35 Kabupaten/Kota	Melaksanakan sosialisasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kecamatan	2 kecamatan	4 kecamatan
			Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Melaksanakan fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	4 kecamatan	2 kecamatan	4 kecamatan
			Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	NIHIL			
14	PA	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu	Menyediakan Dokter di Puskesmas Pembantu	0	1 (dokter piket)	1 (dokter piket)
			Penyediaan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu	Menyediakan Bidan di Puskesmas Pembantu	0	63 (bidan definitif), 6 (bidan piket)	63 (bidan definitif), 6 (bidan piket)
15	PA	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	3 orang	3 orang	2 orang
			Penyusunan Kebijakan Perlindungan Hukum Guru	NIHIL			
16	PA	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Melaksanakan sosialisasi kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal			
17	PA	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keikutsertaan juru sembelih halal dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui kolaborasi lintas sektor	0 orang	0 orang	3 orang
			Standarisasi rumah pemotongan hewan	Mengusulkan dukungan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk rehabilitasi Rumah Potong Hewan guna mendukung pemenuhan persyaratan teknis dan standarisasi RPH	0 unit	3 unit	0 unit
18	PA	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 Konten kreator di Desa wisata				
19	PA	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Belum tersedianya basis data UMKM yang valid, mutakhir, dan terintegrasi hingga tingkat RT, sehingga penetapan sasaran penerima subsidi belum dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.			

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
			Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora				
20	PA	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	RTH Perkotaan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.982,55 Ha	3.982,75 Ha	3.982,55 Ha
			RTH Perdesaan	belum ada program pembangunan RTH di perdesaan			
21	PA	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;	Penguatan koperasi desa	KDKMP ke depan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkop RI selain itu jg memantau perkembangan pelaksanaan operasional di Koperasi masing2.	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan	177 desa/kelurahan
22	PA	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih berprestasi	30 medali	30 medali	60 medali
23	PA	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusi	Pemetaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terdapat siswa berkebutuhan khusus	-	37 satuan pendidikan	-
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Jumlah Peningkatan SDM Pendidikan Inklusi Bagi Guru	-	1 kegiatan	-
24	PA	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Pemantauan setiap hari melalui jaringan relawan (grup WA)			
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi	Tidak ada pengadaan Early Warning System (EWS) hingga tahun 2030			
25	PT	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Penyediaan benih, pengembangan pakan mandiri, bantuan sarpras, polikultur nila-udang	NIHIL			
			Pengembangan pakan mandiri	NIHIL			
26	PT	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	Lapak Bumdes	NIHIL			
			Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes dan Fasilitasi Pembentukan Badan Hukum untuk Bumdes	Sosialisasi ke seluruh BUMDes se Kabupaten Karanganyar	162 desa	162 desa	
27	PT	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana - masyarakat	Pelatihan untuk relawan dan pegawai BPBD, tapi belum ada sertifikasi (per tahun 50 orang dengan pelatihan yang berbeda-beda)	50 orang	35 orang	50 orang
28	PT	Cek Kesehatan Gratis	Balita Baru Lahir	Pelaksanaan CKG di setiap desa	10.298 bayi	9.078 bayi	3.953 bayi
			Balita dan Pra Sekolah	Pelaksanaan CKG di setiap desa	77.106 anak	43.797 anak	36.994 anak
			Anak Sekolah (SD)	Pelaksanaan CKG di setiap desa	149.018 anak	106.619 anak	121.640 anak
			Dewasa	Pelaksanaan CKG di setiap desa	564.985 orang	263.531 orang	123.916 orang

NO		Program Delegasi Gubernur	Aktivitas Riil	Implementasi di Kabupaten Karanganyar	Target		Capaian Tahun 2025
					Tahun 2025	Tahun 2026	
			Lansia	Pelaksanaan CKG di setiap desa	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang
29	PT	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Balai Rehabilitasi Sosial	NIHIL			
			Penambahan identitas bagi kaum marginal	NIHIL			
30	PT	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;	Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan	NIHIL			
31	PT	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir	NIHIL			
32	PT	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah	NIHIL			
			Promosi produk unggulan di Jawa Tengah	NIHIL			
33	PT	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	200 orang	300 orang
			Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
			Hibah FKUB	Hibah FKUB	Rp. 250.000.000	NA	Rp. 250.000.000
34	PT	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pemberian insentif diberikan kepada 2 orang kader di pustu (@Rp500000 per 3 bulan)	Tidak Ada (Honor Kader Posyandu tidak ada yang spesifik untuk Kader Pustu)			
			Dukungan kelembagaan Posyandu 6 Bidang SPM (Bimtek dan Rapat Koordinasi TP Posyandu)	Insentif Honor Kader Posyandu	9.022 orang	9.386 orang	9.022 orangg
35	PT	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu, Orientasi Pembinaan Posyandu bidang Kesehatan bagi tenaga Kesehatan Puskesmas	-	204 orang	-
			Pemeriksaan kesehatan	Pelaksanaan CKG di setiap desa	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang
			Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi	Posyandu Lansia	144.381 orang	86.757 orang	34.595 orang

Sumber: Perangkat Daerah Pengampu 35 Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota, 2026

Pada program Delegasi Gubernur salah satunya adalah Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa, Di Kabupaten Karanganyar target 2026 sebanyak 47 desa dan capaian semester I sebanyak 29 desa (persentase capaian sebesar 61,70%).

Program spelling menjadi program strategi pendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan bertujuan untuk memperluas akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pelayanan Spelling yang mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat dapat mendukung deteksi dini, penanganan dan tindak lanjut kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Untuk Program Kecamatan Berdaya, telah ditindaklanjuti dengan menetapkan lokasi Kecamatan Berdaya sejumlah 17 Kecamatan (semua kecamatan di Kabupaten Karanganyar) dan membentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya dan Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan. Hal-hal tersebut didukung dengan regulasi berupa:

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 400.10.2/42 Tahun 2026 tentang Penetapan Kecamatan Berdaya.
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 400.10.2/43 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Berdaya.
3. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 400.10.2/60 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan.
4. Berita Acara tentang pengukuran kecamatan berdaya tanggal 7 Juli 2026.

Sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2025-2029, tahun 2026 difokuskan pada tema pembangunan **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** dengan strategi antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi ekonomi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan bio fortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerjasama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, Perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan

lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;

19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026, selain itu juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026 dan pembangunan tingkat provinsi yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Keselarasan Indikator Tematik Pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Karanganyar dengan Indikator Tematik di Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.13.
Keselarasan Indikator Tematik Pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Karanganyar dengan Indikator Tematik di RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Indikator	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kab. Karanganyar	Target di RKPD Tahun 2026	Target di Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
MAKRO					
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-6,00	6,20	6,20	6,20	
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,71-4,27	3,35	3,35	3,10	Realisasi Tahun 2025 : 3,26
3. Tingkat Kemiskinan (%)	8,70-8,53	8,84	8,84	8,00	Realisasi Tahun 2025 : 8,48
4. Indeks Pembangunan Manusia	-	79,26	79,26	79,26	
TEMATIK					
5. Indeks Ketahanan Pangan	85,60	89,70	89,72	75,88	Sesuai dengan Surat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 500.1/139/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Penyampaian Target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2026 dan Tahun 2027
6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,83	7,02	7,02	6,07	Realisasi Tahun 2025 : 6,09

Indikator	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kab. Karanganyar	Target di RKPD Tahun 2026	Target di Perubahan RKPD Tahun 2026	Keterangan
(*Prevalence of Undernourishment*) /PoU)					

Sumber: Berita Acara Rakortekbang Tahun 2025 (Eks Karisidenan Surakarta), RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; yang terdiri dari :
   a). Perencanaan;
   b). Keuangan;
   c). Kepegawaian;
   d). Pendidikan dan Pelatihan;
   e). Penelitian dan Pengembangan;
   f). Pengawasan.
c. Unsur Kewilayahan
d. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dilaksanakan diantaranya karena penyesuaian yang dikarenakan perubahan dana transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sehingga perlu disesuaikan dalam pelaksanaan belanjanya juga, SILPA Tahun

2025 yang masih belum digunakan sehingga menambah kemampuan anggaran yang dapat dibelanjakan, penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran, yang sebelumnya tertampung dalam Mendahului Perubahan dan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan kumpulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun rincian yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan terdapat dalam lampiran dokumen ini.

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Pendidikan

Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas PAUD, kualitas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan kualitas ruang kelas, kualitas laboratorium, bantuan pembiayaan pendidikan SD dan SMP, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, dam peningkatan sertifikasi kompetensi guru. Program ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan distribusi pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kepemilikan perizinan pendidikan swasta.

Tabel 5.1.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	606.964.224.613	605.835.231.913	622.453.175.286	Disdikbud
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.909.329.400	144.411.532.100	155.518.404.307	Disdikbud
3. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	6.190.000	15.200.000	Disdikbud
Jumlah	**745.873.554.013**	**750.252.954.013**	**777.986.779.593**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

b. Kesehatan

Diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, Cancer, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumberdaya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan.
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
   Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas laik sehat pada tempat-tempat umum, serta kepemilikan PIRT pada pengolahan makanan.
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas usaha kesehatan berbasis masyarakat, pelaksanaan advokasi dan KIE serta peningkatan rumah tangga berperilaku hidup sehat dan bersih.

Tabel 5.2.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	298.996.272.243	303.077.091.043	315.299.206.185	Dinkes
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.906.593.300	76.701.637.300	90.783.821.500	Dinkes
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.576.515.000	1.374.772.200	2.174.336.200	Dinkes
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.003.700	493.923.700	493.923.700	Dinkes
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	307.868.000	307.868.000	407.868.000	Dinkes
Jumlah	**369.315.252.243**	**381.955.292.243**	**409.159.155.585**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik), Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
      Program ini difokuskan pada pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu)

daerah kabupaten/kota dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota.
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
5) Program Penataan Bangunan Gedung
   Program ini difokuskan pada terciptanya tertib penyelenggaraan bangunan yang sesuai dengan fungsi, standar teknis, dan administratif.
6) Program Penyelenggaraan Jalan
   Program ini difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten, terutama diprioritaskan jalan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Program ini difokuskan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Program ini difokuskan pada penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

Tabel 5.3.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.451.192.099	24.191.944.449	26.714.963.549	DPUPR
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	254.080.000	1.436.942.000	6.976.707.762	DPUPR
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	251.200.000	2.020.000.000	2.621.000.000	DPUPR
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	56.000.000	558.934.000	876.380.950	DPUPR
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	600.000.000	1.142.000.000	DPUPR
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.448.907.000	3.808.907.000	9.173.576.646	DPUPR
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.011.147.300	81.474.051.600	111.894.865.079	DPUPR
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	100.000.000	125.000.000	DPUPR
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	136.800.000	1.637.200.000	2.137.700.000	DPUPR

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
Jumlah	**106.609.326.399**	**115.827.979.049**	**161.662.193.986**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemakaman. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan
Program ini difokuskan pemenuhan SPM perumahan.
2) Program Kawasan Permukiman
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan antarwilayah permukiman.
3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini difokuskan pada penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sarana dan prasarana dasar, serta penataan lingkungan untuk menciptakan hunian yang layak, aman, dan sehat.
4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini difokuskan pada perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh.
5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini difokuskan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelaku jasa di bidang perumahan dan permukiman. Selain itu program ini mencakup penyediaan layanan sertifikasi tenaga kerja, penetapan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha, serta registrasi yang terintegrasi dan transparan.

Tabel 5.4.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	140.000.000	140.000.000	DPUPR
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	645.000.000	705.000.000	DPUPR
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	DPUPR
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	429.280.000	587.627.350	714.627.350	DPUPR
5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	25.000.000	25.000.000	DPUPR
Jumlah	**429.280.000**	**1.397.627.350**	**1.584.627.350**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Diprioritaskan untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban daerah dengan penegakan Perda.
2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM penanganan kebakaran.
3) Program Penanggulangan Bencana
Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM penanggulangan bencana.

Tabel 5.5.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.312.059.799	8.596.519.799	11.106.846.799	Satpol PP
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.906.084.000	553.960.000	1.087.590.000	Satpol PP
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	575.680.000	40.000.000	100.000.000	Satpol PP
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.379.193.699	3.326.443.699	3.995.903.699	BPBD
5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.686.936.000	1.086.136.000	1.499.196.000	BPBD
Jumlah	**12.859.953.498**	**13.603.059.498**	**17.789.536.498**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

f. Sosial.
Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan keterampilan. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial
Program ini difokuskan untuk meningkatkan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
2) Program Rehabilitasi Sosial
Program ini difokuskan untuk pemenuhan SPM Sosial.
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
4) Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan kabupaten.

Tabel 5.6.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.913.159.679	3.969.509.679	4.469.897.679	DINSOS
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.838.559.550	68.559.550	68.559.550	DINSOS
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	394.425.000	419.425.000	604.337.000	DINSOS
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300	DINSOS
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	101.935.000	101.935.000	101.935.000	DINSOS
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	22.890.450	22.890.450	22.890.450	DINSOS
Jumlah	**6.707.839.679**	**8.307.149.679**	**9.273.769.979**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel –tabel berikut:

a. Tenaga Kerja

Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja daerah.
2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri.
3) Program Penempatan Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online, pelayanan antar kerja lintas daerah dan pelaksanaan *job fair*.
4) Program Hubungan Industrial
   Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak adanya PHK.

Tabel 5.7.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	DISDAGPERIN NAKER
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	1.185.192.500	1.878.419.000	DISDAGPERIN NAKER
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	74.579.000	DISDAGPERIN NAKER
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	186.500.000	291.786.000	DISDAGPERIN NAKER
Jumlah	**-**	**1.371.692.500**	**2.244.784.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT.

Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengaurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.
2) Program Perlindungan Perempuan
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
6) Program Perlindungan Khusus Anak
   Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan.

Tabel 5.8.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.700.798.933	3.765.048.933	4.506.668.933	DP3APPKB
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DP3APPKB
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DP3APPKB
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	DP3APPKB
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DP3APPKB
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000	10.000.000	60.000.000	DP3APPKB
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DP3APPKB
Jumlah	**3.770.798.933**	**3.835.048.933**	**4.626.668.933**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

c. Pangan
   Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan.

3) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan.

Tabel 5.9.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	55.000.000	75.000.000	110.000.000	DISPERTAN PP
2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DISPERTAN PP
3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DISPERTAN PP
Jumlah	**70.000.000**	**90.000.000**	**125.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

d. Pertanahan
Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program ini difokuskan pada penyelesaian proses ganti rugi dan pemberian santunan kepada pemilik tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, agar proses pembangunan berjalan lancar dan adil.

2) Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini difokuskan pada penataan ulang kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dan tanah absentee melalui retribusi dan pemberian ganti kerugian guna menciptakan keadilan agraria.

3) Program Penatagunaan Tanah
Program ini difokuskan pada pemanfaatan dan peruntukan tanah secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Tabel 5.10.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	DPUPR
2. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-	DPUPR
3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	433.000.000	537.000.000	DPUPR
Jumlah	**-**	**433.000.000**	**537.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

e. Lingkungan Hidup

Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup.
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai baku mutu yang berlaku.
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   Program ini difokuskan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah.
5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten.
6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup.
7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   Program ini difokuskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup.
9) Program Pengelolaan Persampahan
   Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir

Tabel 5.11.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.330.487.881	10.712.668.181	11.513.467.331	DLH
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	75.000.000	305.000.000	DLH
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	270.212.300	187.000.000	497.439.850	DLH
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	34.800.000	533.218.300	537.254.800	DLH
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	5.000.000	DLH
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.800.000	67.470.500	67.470.500	DLH

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	100.000.000	183.083.200	DLH
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	DLH
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	27.529.500	27.529.500	DLH
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.981.116.600	1.578.530.300	9.430.249.100	DLH
Jumlah	**11.751.416.781**	**13.281.416.781**	**22.566.494.281**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pendaftaran Penduduk
   Program ini difokuskan pada pencatatan dan perekaman data kependudukan setiap individu untuk menjamin hak identitas dan kepastian hukum.
2) Program Pencatatan Sipil
   Program ini difokuskan pada pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian, untuk kepentingan administrasi negara.
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Program ini difokuskan pada pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data kependudukan secara digital untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan akurat.
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
   Program ini difokuskan pada penyusunan dan analisis data profil penduduk sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Tabel 5.12.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.473.261.028	4.554.351.028	4.951.911.028	DISDUKCAPIL
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.007.103.000	994.613.000	1.002.613.000	DISDUKCAPIL
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DISDUKCAPIL
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.940.000	31.940.000	23.000.000	DISDUKCAPIL
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.060.000	8.060.000	12.000.000	DISDUKCAPIL
Jumlah	**5.570.364.028**	**5.638.964.028**	**6.039.524.028**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penataan Desa
   Program ini difokuskan pada penataan wilayah administrasi desa, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan desa mandiri dan mendorong kemampuan desa dalam menuju

ketahanan pangan sebagai salah wujud dukungan terhadap program prioritas provinsi yaitu desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, *hydro*, maupun tenaga surya.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan penguatan kerjasama antar desa, desa dengan pihak ketiga, serta desa dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, pengarsipan, pelaporan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   Program ini difokuskan pada penguatan peran serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa.

Tabel 5.13.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.010.966.462	5.108.966.462	6.153.606.462	DISPERMASDES
2. PROGRAM PENATAAN DESA	80.000.000	80.000.000	157.800.000	DISPERMASDES
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	65.000.000	65.000.000	65.000.000	DISPERMASDES
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.350.000.000	3.380.000.000	4.564.840.000	DISPERMASDES
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.607.600.000	8.091.000.000	8.486.960.000	DISPERMASDES
Jumlah	**16.113.566.462**	**16.724.966.462**	**19.428.206.462**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Diprioritaskan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Pengendalian Penduduk
      Program ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga dan penyebaran penduduk yang seimbang.
   2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
      Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB untuk mendukung keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
   3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
      Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

Tabel 5.14.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	136.200.000	246.736.000	266.736.000	DP3APPKB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.961.380.000	3.314.744.000	3.369.744.000	DP3APPKB
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.108.800.000	4.866.900.000	4.911.900.000	DP3APPKB
Jumlah	**8.206.380.000**	**8.428.380.000**	**8.548.380.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

i. Perhubungan

Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, petunjuk dan perlindungan pengguna jalan kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada peningkatan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas serta penyediaan angkutan jalan yang andal dan terjangkau.

Tabel 5.15.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.156.891	7.481.756.891	8.541.718.420	DISHUB
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	33.427.967.400	32.794.667.400	38.590.977.400	DISHUB
Jumlah	**39.344.124.291**	**40.276.424.291**	**47.132.695.820**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

j. Komunikasi dan Informatika

Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi publik yang *up to date*, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan komunikasi publik untuk membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung layanan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

Tabel 5.16.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.114.630	5.582.155.030	5.805.759.030	DISKOMINFO
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	591.612.300	821.354.900	850.387.900	DISKOMINFO
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.687.542.000	1.671.542.000	1.977.322.000	DISKOMINFO
Jumlah	**7.555.268.930**	**8.075.051.930**	**8.633.468.930**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   Program ini difokuskan pada pemberian kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   Program ini difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan koperasi.
3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Program ini difokuskan pada penilaian kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian.
5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Program ini difokuskan pada peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
7) Program Pengembangan UMKM
   Program ini difokuskan pada fasilitasi penguatan daya saing dan inovasi UMKM agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Tabel 5.17.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.990.730.652	3.096.380.652	3.789.019.652	DISKUKTRANS ESDM
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	7.940.800	7.940.800	7.940.800	DISKUKTRANS ESDM
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.000.000	10.800.000	38.660.000	DISKUKTRANS ESDM
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DISKUKTRANS ESDM
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000	1.840.000.000	2.099.991.000	DISKUKTRANS ESDM
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	40.000.000	575.000.000	647.140.000	DISKUKTRANS ESDM
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	84.000.000	84.000.000	84.000.000	DISKUKTRANS ESDM
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	24.000.000	4.200.500.000	5.929.900.000	DISKUKTRANS ESDM
Jumlah	**3.251.671.452**	**9.839.621.452**	**12.621.651.452**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

l. Penanaman Modal

Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan administrasi), meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada penciptaan regulasi dan kondisi yang kondusif bagi investor agar tertarik menanamkan modal di daerah.
2) Program Promosi Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik daerah melalui kegiatan promosi peluang investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri.
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada penyediaan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi para investor.
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi kegiatan investasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan komitmen dan peraturan yang berlaku.
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data investasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan investasi.

Tabel 5.18.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.532.254.833	5.758.574.833	7.049.454.833	DPMPTSP
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.000.000	50.000.000	150.000.000	DPMPTSP
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	65.000.000	65.000.000	265.000.000	DPMPTSP
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100.500.000	100.500.000	326.500.000	DPMPTSP
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	35.000.000	35.000.000	37.500.000	DPMPTSP
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DPMPTSP
Jumlah	**5.772.754.833**	**6.014.074.833**	**7.833.454.833**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

m. Kepemudaan dan Olahraga

Diprioritaskan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah, dengan penyediaan sarana prasarana olah raga, dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas, kreativitas, dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini difokuskan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 5.19.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	38.000.000	348.000.000	572.000.000	DISPARPORA
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.797.000.000	10.349.000.000	15.899.000.000	DISPARPORA
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	750.000.000	750.000.000	750.000.000	DISPARPORA
Jumlah	**5.585.000.000**	**11.447.000.000**	**17.221.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

n. Statistik
Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara *up to date* dan terbuka *(on line)*. Dengan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Tabel 5.20.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	8.001.200	8.001.200	10.607.200	DISKOMINFO
Jumlah	**8.001.200**	**8.001.200**	**10.607.200**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

o. Persandian
Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan keamanannya. Dengan program prioritas sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini difokuskan pada perlindungan dan pengamanan informasi strategis melalui sistem persandian guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi pemerintahan.

Tabel 5.21.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111.500.000	121.000.000	121.000.000	DISKOMINFO
Jumlah	**111.500.000**	**121.000.000**	**121.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

p. Kebudayaan
Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dan lain-lain). Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kebudayaan
   Program ini difokuskan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal dan nasional melalui pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan budaya secara berkelanjutan.
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Program ini difokuskan pada pelestarian dan pengembangan seni tradisional sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.
3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Program ini difokuskan pada perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya agar tetap lestari dan bernilai bagi pendidikan serta pariwisata.

Tabel 5.22.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	285.000.000	730.000.000	996.000.000	Disdikbud
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.160.000.000	1.135.000.000	1.284.000.000	Disdikbud
3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	195.000.000	195.000.000	205.000.000	Disdikbud
Jumlah	**1.640.000.000**	**2.060.000.000**	**2.485.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

q. Perpustakaan
   Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Pembinaan Perpustakaan
      Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan, dan akses informasi masyarakat.
   2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
      Program ini difokuskan pada upaya perlindungan, perawatan, dan digitalisasi koleksi langka serta naskah kuno agar tetap lestari dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

Tabel 5.23.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.063.875.283	4.122.675.283	4.547.315.144	DISARPUS
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	701.552.000	684.580.000	764.580.000	DISARPUS
3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	33.178.000	50.120.000	50.120.000	
Jumlah	**4.798.575.283**	**4.857.375.283**	**5.362.015.144**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

r. Kearsipan.
   Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Arsip
   Program ini difokuskan pada pengaturan, penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara sistematis untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja.
2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   Program ini difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan keutuhan arsip statis maupun vital dari risiko kerusakan, kehilangan, atau bencana.

Tabel 5.24.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	67.226.000	67.226.000	107.960.722	DISARPUS
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3.774.000	3.774.000	3.774.000	DISARPUS
Jumlah	**71.000.000**	**71.000.000**	**111.734.722**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.3. Urusan Pilihan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut.

a. Kelautan dan Perikanan
   Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
      Program ini difokuskan pada pengembangan usaha budidaya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan teknologi, sarana, dan kapasitas pelaku usaha.
   2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
      Program ini difokuskan pada pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutannya.
   3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
      Program ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah, mutu, dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan yang higienis serta penguatan akses pasar.

Tabel 5.25.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	55.000.000	223.000.000	283.000.000	DISPERTANPP
2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.000.000	15.000.000	20.000.000	DISPERTANPP
3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DISPERTANPP
Jumlah	**95.000.000**	**263.000.000**	**328.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

b. Pariwisata
   Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di pedesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Program ini difokuskan pada pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
2) Program Pemasaran Pariwisata
   Program ini difokuskan pada promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif melalui berbagai media dan kegiatan untuk menarik minat wisatawan.
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI untuk mendukung inovasi dan menciptakan nilai tambah produk kreatif.
4) Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pengembangan berkelanjutan.

Tabel 5.26.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.047.865.891	5.204.215.891	6.879.770.891	DISPARPORA
2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	350.866.000	275.866.000	588.366.000	DISPARPORA
3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	105.000.000	300.000.000	1.409.777.000	DISPARPORA
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	5.000.000	5.000.000	DISPARPORA
5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	15.000.000	95.000.000	545.000.000	DISPARPORA
Jumlah	**5.518.731.891**	**5.880.081.891**	**9.427.913.891**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

c. Pertanian
   Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan dan ternak), mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil pertanian, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di pedesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
      Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas.
   2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
      Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang untuk menunjang kelancaran usaha tani.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat.
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim.
5) Program Penyuluhan Pertanian
   Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani melalui pendampingan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna.

Tabel 5.27.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.509.860.990	17.734.860.990	12.232.777.090	DISPERTAN PP
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	292.557.600	10.395.057.600	13.078.058.500	DISPERTAN PP
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	23.000.000	3.446.248.400	3.811.797.400	DISPERTAN PP
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	40.000.000	85.000.000	90.000.000	DISPERTAN PP
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	24.442.400	174.442.400	129.442.400	DISPERTAN PP
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.000.000	382.771.600	412.791.600	DISPERTAN PP
Jumlah	**17.899.860.990**	**32.218.380.990**	**29.754.866.990**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

d. Kehutanan
   Urusan kehutanan diprioritaskan untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
      Program ini difokuskan pada pemberdayaan desa melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

Tabel 5.28.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-	-	DLH
Jumlah	**-**	**-**	**-**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

e. Energi dan Sumber Daya Mineral
   Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diprioritaskan untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dengan program prioritas sebagai berikut:
   1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
      Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah.

Tabel 5.29.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.000.000	4.000.000	4.000.000	DISKUKTRANS ESDM
Jumlah	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

f. Perdagangan

Diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas pasar rakyat, penyediaan sarana prasarana pasar rakyat yang memenuhi standar, meningkatkan potensi ekspor produk lokal, terutama di pedesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini difokuskan pada penyederhanaan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pengusaha.
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini difokuskan pada penguatan jaringan distribusi barang dan jasa untuk memastikan kelancaran pasokan dan pemerataan distribusi ke seluruh wilayah.
3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Program ini difokuskan pada upaya pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
4) Program Pengembangan Ekspor
   Program ini difokuskan pada peningkatan volume dan diversifikasi produk ekspor melalui penguatan daya saing dan akses pasar global.
5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   Program ini difokuskan pada pengaturan standar produk dan layanan serta perlindungan konsumen untuk memastikan kualitas dan keamanan barang/jasa yang beredar di pasar.
6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Program ini difokuskan pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui promosi dan penguatan daya saing produk lokal.

Tabel 5.30.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.899.148.509	12.949.091.009	13.787.833.366	DISDAGPERIN NAKER
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	14.500.000	DISDAGPERIN NAKER
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	362.455.400	362.455.400	562.305.200	DISDAGPERIN NAKER
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	11.873.233	DISDAGPERIN NAKER
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	DISDAGPERIN NAKER

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	29.081.500	DISDAGPERIN NAKER
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	301.523.600	DISDAGPERIN NAKER
Jumlah	**13.261.603.909**	**13.311.546.409**	**14.707.116.899**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah.

g. Perindustrian

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah, penyediaan lapangan kerja baru, serta menciptakan industri yang ramah lingkungan. Dengan program prioritas:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Program ini difokuskan pada perencanaan dan pengembangan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah.
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   Program ini difokuskan pada pengaturan dan pengawasan izin usaha industri di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi sektor industri.

Tabel 5.31.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	229.639.000	508.953.400	DISDAGPERIN NAKER
2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	-	-	7.500.000	DISDAGPERIN NAKER
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	54.000.000	DISDAGPERIN NAKER
Jumlah	**-**	**229.639.000**	**570.453.400**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

h. Transmigrasi

Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dan penyediaan bantuan bagi transmigran asal Karanganyar. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
   Program ini difokuskan pada penyiapan transmigran serta pengembangan kawasan yang menjadi tujuan transmigrasi agar layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik transmigran maupun penduduk lokal.

Tabel 5.32.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.500.000	4.500.000	4.500.000	DISKUKTRANS ESDM
Jumlah	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.4. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.

a. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan adil.
2) Program Perekonomian dan Pembangunan
   Program ini difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah.
3) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   Program ini difokuskan pada penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.

Tabel 5.33.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.180.996.122	26.971.276.122	33.729.445.602	SETDA
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.107.737.000	11.515.417.000	13.148.267.000	SETDA
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	10.742.344.500	865.670.000	1.373.673.000	SETDA
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.515.123.143	42.627.349.988	42.568.952.988	SETWAN
5. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.095.685.340	20.049.608.495	20.476.609.495	SETWAN
Jumlah	**92.641.856.105**	**102.029.321.605**	**111.296.948.085**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.5. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.

a. Perencanaan

Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, sikron dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Program ini difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan

pembangunan, serta evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran dan efektivitas program.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini difokuskan pada koordinasi antar instansi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

Tabel 5.34.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.571.765.175	5.363.445.175	6.010.787.314	BAPPERIDA
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.000.000	492.720.000	477.320.000	BAPPERIDA
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	670.000.000	964.800.000	1.039.800.000	BAPPERIDA
Jumlah	**5.751.765.175**	**6.820.965.175**	**7.527.907.314**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

b. Keuangan
Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini difokuskan pada pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lain, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 5.35.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.270.243.392	49.946.973.884	51.014.781.682	BKD
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	384.950.669.269	310.658.109.786	249.645.481.786	BKD
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.107.675.672	572.775.672	1.005.275.672	BKD
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.790.160.430	2.819.360.430	4.234.846.180	BKD
Jumlah	**449.118.748.763**	**363.997.219.772**	**305.900.385.320**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

c. Kepegawaian
Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penataan, pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif, dengan program prioritas:

1) Program Kepegawaian Daerah
   Program ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, serta pemberian layanan kepegawaian yang efisien dan berkualitas.

Tabel 5.36.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.183.221.183	6.325.721.183	6.072.410.143	BKPSDM
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	880.699.700	1.380.699.700	1.675.199.700	BKPSDM
Jumlah	**7.063.920.883**	**7.706.420.883**	**7.747.609.843**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

d. Penelitian dan Pengembangan
   Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut:

   1) Program Riset dan Inovasi Daerah
      Program ini difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan daerah.

Tabel 5.37.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	300.000.000	280.800.000	355.800.000	BAPPERIDA
Jumlah	**300.000.000**	**280.800.000**	**355.800.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

e. Pendidikan dan Pelatihan
   Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai, dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional, berdaya saing dan kompeten. Dengan program prioritas sebagai berikut:

   1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
      Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor.

Tabel 5.38.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	537.005.000	517.005.000	698.505.000	BKPSDM
Jumlah	**537.005.000**	**517.005.000**	**698.505.000**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.6. Urusan Unsur Pengawasan

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Inspektorat. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Program ini difokuskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan akuntabilitas.
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Program ini difokuskan pada penyusunan kebijakan yang tepat dan penyediaan pendampingan serta asistensi untuk mendukung implementasi kebijakan di tingkat daerah secara efektif.

Tabel 5.39.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.323.559.095	8.323.559.095	8.827.761.420	INSPEKTORAT
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.500.000.000	2.500.000.000	2.486.075.500	INSPEKTORAT
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.080.000.000	1.080.000.000	1.471.222.175	INSPEKTORAT
Jumlah	**11.903.559.095**	**11.903.559.095**	**12.785.059.095**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

5.1.7. Urusan Unsur Kewilayahan

Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan desa, dan pemerataan hasil pembangunan, dengan program prioritas:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
   Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan.
3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal.
5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Tabel 5.40.

Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Kewilayahan Tahun 2026

NO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			JUMLAH		
		RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	JATIPURO	2.207.360.190	2.266.511.590	2.584.201.590	5.221.900	6.788.500	7.958.500	9.000.000	22.359.200	31.119.200	7.440.000	7.440.000	7.440.000	34.180.000	91.629.400	91.629.400	14.000.000	19.223.400	23.573.400	**2.277.202.090**	**2.413.952.090**	**2.745.922.090**
2	JATIYOSO	1.726.806.972	1.835.156.972	2.204.655.972	38.257.900	38.257.900	3.457.900	41.269.800	48.469.800	31.318.800	109.060.000	60.020.000	9.620.000	99.548.000	144.380.000	104.072.000	65.432.000	31.040.000	14.240.000	**2.080.374.672**	**2.157.324.672**	**2.367.364.672**
3	JUMANTONO	2.026.901.816	2.100.111.816	2.262.379.816	5.266.800	5.266.800	17.020.800	9.350.700	20.854.100	34.462.100	9.939.550	11.619.550	26.629.550	86.749.500	92.869.500	92.869.500	24.064.400	13.401.000	25.181.000	**2.162.272.766**	**2.244.122.766**	**2.458.542.766**
4	JUMAPOLO	1.871.969.768	1.896.859.768	2.265.959.768	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2.800.000	5.200.000	5.200.000	41.900.000	90.910.000	90.910.000	5.680.000	8.780.000	17.200.000	**1.938.349.768**	**2.017.749.768**	**2.395.269.768**
5	MATESIH	1.999.583.574	2.271.818.899	2.444.212.456	105.600.000	919.675	1.982.700	15.400.000	15.400.000	25.400.000	137.400.000	3.000.000	4.000.000	31.600.000	82.745.000	82.745.000	3.000.000	3.000.000	9.980.000	**2.292.583.574**	**2.376.883.574**	**2.568.320.156**
6	TAWANGMANGU	4.855.411.324	4.914.171.324	5.607.023.774	3.220.600	3.220.600	4.346.600	2.049.039.300	2.319.039.300	2.431.920.850	44.947.600	44.947.600	47.807.600	570.932.400	601.372.400	626.172.400	-	-	-	**7.523.551.224**	**7.882.751.224**	**8.717.271.224**
7	NGARGOYOSO	1.726.977.922	2.031.502.922	2.580.291.922	36.140.000	37.050.000	37.050.000	65.288.800	15.488.800	22.563.800	122.400.000	2.400.000	6.720.000	62.440.000	79.025.000	79.025.000	76.720.000	8.800.000	22.436.000	**2.089.966.722**	**2.174.266.722**	**2.748.086.722**
8	KARANGPANDAN	2.100.040.521	2.126.915.512	2.861.401.521	5.600.000	1.680.000	1.680.000	5.040.000	14.000.000	27.034.000	24.736.000	77.121.000	77.121.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	**2.138.776.521**	**2.223.076.512**	**2.970.596.521**
9	KARANGANYAR	12.769.365.422	13.505.523.472	14.354.417.122	14.260.000	6.601.100	6.601.100	9.928.441.200	10.915.965.250	12.642.151.600	170.881.500	83.541.300	99.171.300	117.433.800	2.278.050.800	2.285.110.800	-	-	-	**23.000.381.922**	**26.789.681.922**	**29.387.451.922**
10	TASIKMADU	2.248.163.498	2.277.393.498	2.383.510.598	400.000	400.000	400.000	1.920.000	10.040.000	14.972.900	21.600.000	1.120.000	1.120.000	29.820.000	94.800.000	94.800.000	1.960.000	1.960.000	5.030.000	**2.303.863.498**	**2.385.713.498**	**2.499.833.498**
11	JATEN	1.951.049.947	2.268.420.897	2.455.896.997	40.956.100	2.570.100	3.139.200	68.994.200	16.474.200	16.474.200	89.600.000	3.200.000	3.200.000	118.700.000	114.805.050	118.405.050	68.498.300	14.178.300	14.653.100	**2.337.798.547**	**2.419.648.547**	**2.611.768.547**
12	COLOMADU	2.202.261.800	2.681.589.200	2.778.129.200	74.400.000	5.501.000	10.181.000	46.750.000	17.200.000	17.200.000	229.200.000	8.752.200	13.432.200	55.350.000	78.815.000	88.075.000	37.200.000	17.504.400	36.864.400	**2.645.161.800**	**2.809.361.800**	**2.943.881.800**
13	GONDANGREJO	2.035.492.867	2.371.427.867	2.455.589.907	40.400.000	2.000.000	2.000.000	50.800.000	16.000.000	19.000.000	120.000.000	2.400.000	2.400.000	67.200.000	82.065.000	82.065.000	75.800.000	5.000.000	7.000.000	**2.389.692.867**	**2.478.892.867**	**2.568.054.907**
14	MOJOGEDANG	1.720.220.009	1.744.615.009	2.329.725.009	700.000	1.340.000	12.900.000	13.620.000	16.500.000	21.840.000	2.240.000	2.800.000	4.200.000	43.450.000	93.765.000	90.765.000	10.900.000	9.060.000	30.170.000	**1.791.130.009**	**1.868.080.009**	**2.489.600.009**
15	KEBAKKRAMAT	1.739.023.126	2.090.598.126	2.331.006.996	86.181.100	2.181.100	2.181.100	67.034.250	18.074.250	20.523.380	89.560.000	22.360.000	27.852.000	56.950.000	54.535.000	104.535.000	77.930.000	8.330.000	22.250.000	**2.116.678.476**	**2.196.078.476**	**2.508.348.476**
16	KERJO	2.117.419.093	2.191.280.893	2.360.772.343	3.368.650	5.015.100	8.295.900	7.146.250	12.238.000	16.280.750	22.080.000	27.360.000	27.360.000	3.680.000	75.665.000	97.245.000	855.000	2.290.000	8.865.000	**2.154.548.993**	**2.313.848.993**	**2.518.818.993**
17	JENAWI	1.969.656.597	2.006.262.597	2.287.551.797	1.773.400	1.648.400	6.409.000	9.248.850	9.232.850	14.550.250	1.680.000	1.680.000	1.680.000	41.400.000	89.235.000	89.235.000	12.532.300	12.532.300	21.135.100	**2.036.291.147**	**2.120.591.147**	**2.420.561.147**
JUMLAH		**47.267.704.446**	**50.580.160.362**	**56.546.726.788**	**463.746.450**	**122.440.275**	**127.603.800**	**12.402.343.350**	**13.501.335.750**	**15.400.811.830**	**1.205.564.650**	**364.961.650**	**364.953.650**	**1.463.013.700**	**4.146.347.150**	**4.219.339.150**	**476.252.000**	**156.779.400**	**260.258.000**	**63.278.624.596**	**68.872.024.587**	**76.919.693.218**

Sumber: Bapperida 2026 diolah

5.1.8. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Urusan Pemerintahan Umum oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sinergis, aman dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Program ini difokuskan pada memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila serta pengembangan karakter kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang bersatu, adil, dan sejahtera.
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   Program ini difokuskan pada penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang mendidik, beretika, dan mengembangkan budaya politik yang sehat di masyarakat.
3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Program ini difokuskan pada pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pembangunan serta pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Program ini difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional serta peningkatan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

Tabel 5.41.

Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan Umum

Tahun 2026

Program	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	Perangkat Daerah
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.506.769.476	3.667.664.476	4.460.608.476	BAKESBANGPOL
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	950.000.000	950.000.000	970.000.000	BAKESBANGPOL
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.642.730.000	1.749.919.000	2.314.919.000	BAKESBANGPOL
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	550.000.000	5.491.595.000	11.408.443.000	BAKESBANGPOL
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200.000.000	125.600.000	160.000.000	BAKESBANGPOL
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	800.000.000	799.600.000	1.803.084.000	BAKESBANGPOL
Jumlah	**7.649.499.476**	**12.784.378.476**	**21.117.054.476**	

Sumber: Bapperida 2026, diolah

Tabel 5.42.

Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		**Indeks Reformasi Birokrasi**			**643.611.613.775**	**575.760.533.275**	**537.792.442.755**
	Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	**Nilai SAKIP**	**Prioritas 3 Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan**		**643.611.613.775**	**575.760.533.275**	**537.792.442.755**
				URUSAN PERENCANAAN	**5.751.765.175**	**6.820.965.175**	**7.527.907.314**
				1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	510.000.000	492.720.000	477.320.000
				2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	670.000.000	964.800.000	1.039.800.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.571.765.175	5.363.445.175	6.010.787.314
				URUSAN KEUANGAN	**449.118.748.763**	**363.997.219.772**	**305.900.385.320**
				1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	384.950.669.269	310.658.109.786	249.645.481.786
				2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.107.675.672	572.775.672	1.005.275.672
				3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.790.160.430	2.819.360.430	4.234.846.180
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.270.243.392	49.946.973.884	51.014.781.682
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)	**44.031.047.622**	**39.352.363.122**	**48.251.385.602**
				1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.107.737.000	11.515.417.000	13.148.267.000
				2. Program Perekonomian Dan Pembangunan	10.742.344.500	865.670.000	1.373.673.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.180.966.122	26.971.276.122	33.729.445.602
		Maturitas SPIP					
				UNSUR PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH)	**11.903.559.095**	**11.903.559.095**	**12.785.059.095**
				1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.486.075.500
				2. Program Perumusan Kebijakan,	1.080.000.000	1.080.000.000	1.471.222.175

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Pendampingan Dan Asistensi			
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.323.559.095	8.323.559.095	8.827.761.420
				URUSAN KEPEGAWAIAN	**7.063.920.883**	**7.706.420.883**	**7.747.609.843**
				1. Program Kepegawaian Daerah	880.699.700	1.380.699.700	1.675.199.700
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.183.221.183	6.325.721.183	6.072.410.143
				URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**537.005.000**	**517.005.000**	**698.505.000**
				1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	537.005.000	517.005.000	698.505.000
				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**7.555.268.930**	**8.075.051.930**	**8.633.468.930**
				1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	591.612.300	821.354.900	850.387.900
				2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.687.542.000	1.671.542.000	1.977.322.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.276.114.630	5.582.155.030	5.805.759.030
				URUSAN STATISTIK	**8.001.200**	**8.001.200**	**10.607.200**
				1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.001.200	8.001.200	10.607.200
				URUSAN PERSANDIAN	**111.500.000**	**121.000.000**	**121.000.000**
				1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	111.500.000	121.000.000	121.000.000
				URUSAN KEARSIPAN	**71.000.000**	**71.000.000**	**111.734.722**
				1. Program Pengelolaan Arsip	67.226.000	67.226.000	107.960.722
				2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	3.774.000	3.774.000	3.774.000
		Indeks Pelayanan Publik					
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)	**48.610.808.483**	**62.676.958.483**	**63.045.562.483**
				1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.095.685.340	20.049.608.495	20.476.609.495
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.515.123.143	42.627.349.988	42.568.952.988

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**5.570.364.028**	**5.638.964.028**	**6.039.524.028**
				1. Program Pendaftaran Penduduk	1.007.103.000	994.613.000	1.002.613.000
				2. Program Pencatatan Sipil	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	31.940.000	31.940.000	23.000.000
				4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	8.060.000	8.060.000	12.000.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.473.261.028	4.554.351.028	4.951.911.028
				URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)	**63.278.624.596**	**68.872.024.587**	**76.919.693.218**
				1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	463.746.450	122.440.275	127.603.800
				2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.402.343.350	13.501.335.750	15.400.811.830
				3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.205.564.650	364.961.650	364.953.650
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.463.013.700	4.146.347.150	4.219.339.150
				5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	176.252.000	156.779.400	260.258.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.267.704.446	50.580.160.362	56.546.726.788
TJ 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, Kondusifitas wilayah		**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif**			**32.260.869.755**	**39.668.854.755**	**61.473.085.255**
		Kasus Konflik SARA					
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Prioritas 6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**		**15.817.546.480**	**17.693.996.480**	**28.061.593.980**
				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	**11.751.416.781**	**13.281.416.781**	**22.566.494.281**
				1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	25.000.000	75.000.000	305.000.000
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	270.212.300	187.000.000	497.439.850

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	34.800.000	533.218.300	537.254.800
				4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	-	-	5.000.000
				5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.800.000	67.470.500	67.470.500
				6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	100.000.000	183.083.200
				7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	-
				8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000	27.529.500	27.529.500
				9. Program Pengelolaan Persampahan	1.981.116.600	1.578.530.300	9.430.249.100
				10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.330.487.881	10.712.668.181	11.513.467.331
				URUSAN KEHUTANAN	**-**	**-**	**-**
				1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	-	-	-
				URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**4.066.129.699**	**4.412.579.699**	**5.495.099.699**
				1. Program Penanggulangan Bencana	1.686.936.000	1.086.136.000	1.499.196.000
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.379.193.699	3.326.443.699	3.995.903.699
	Sasaran 3: Meningkatnya Kondusifitas, kerukunan antar	**Angka Kriminalitas**	**Prioritas 4. Meningkatkan Kondusifitas wilayah**		**16.443.323.275**	**21.974.858.275**	**33.411.491.275**
				URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**8.793.823.799**	**9.190.479.799**	**12.294.436.799**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	umat beragama dan demokratisasi			1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.906.084.000	553.960.000	1.087.590.000
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	575.680.000	40.000.000	100.000.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.312.059.799	8.596.519.799	11.106.846.799
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL)	7.649.499.476	12.784.378.476	**21.117.054.476**
				1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	950.000.000	950.000.000	970.000.000
				2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.642.730.000	1.749.919.000	2.314.919.000
				3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	550.000.000	5.491.595.000	11.408.443.000
				4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200.000.000	125.600.000	160.000.000
				5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	800.000.000	799.600.000	1.803.084.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.506.769.476	3.667.664.476	4.460.608.476
TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar		**Indeks Daya Saing Daerah**			**1.185.617.263.547**	**1.233.775.829.547**	**1.310.338.748.482**
	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Prioritas 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM**		**1.139.189.560.472**	**1.162.836.050.472**	**1.225.388.999.255**
				URUSAN PENDIDIKAN	**745.873.554.013**	**750.252.954.013**	**777.986.779.593**
				1. Program Pengelolaan Pendidikan	138.909.329.400	144.411.532.100	155.518.404.307
				2. Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	-	-	-

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	6.190.000	15.200.000
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	606.964.224.613	605.835.231.913	622.453.175.286
				URUSAN KEBUDAYAAN	**1.640.000.000**	**2.060.000.000**	**2.485.000.000**
				1. Program Pengembangan Kebudayaan	285.000.000	730.000.000	996.000.000
				2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.160.000.000	1.135.000.000	1.284.000.000
				3. Program Pembinaan Sejarah	-	-	-
				4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	195.000.000	195.000.000	205.000.000
				URUSAN KESEHATAN	**369.315.252.243**	**381.955.292.243**	**409.159.155.585**
				1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.906.593.300	76.701.637.300	90.783.821.500
				2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.576.515.000	1.374.772.200	2.174.336.200
				3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	528.003.700	493.923.700	493.923.700
				4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	307.868.000	307.868.000	407.868.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	298.996.272.243	303.077.091.043	315.299.206.185
				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**8.206.380.000**	**8.428.380.000**	**8.548.380.000**
				1. Program Pengendalian Penduduk	136.200.000	246.736.000	266.736.000
				2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.961.380.000	3.314.744.000	3.369.744.000
				3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.108.800.000	4.866.900.000	4.911.900.000
				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**3.770.798.933**	**3.835.048.933**	**4.626.668.933**
				1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	5.000.000	5.000.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				2. Program Perlindungan Perempuan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-
				4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	10.000.000	10.000.000	60.000.000
				6. Program Perlindungan Khusus Anak	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.700.798.933	3.765.048.933	4.506.668.933
				URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**5.585.000.000**	**11.447.000.000**	**17.221.000.000**
				1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	38.000.000	348.000.000	572.000.000
				2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.797.000.000	10.349.000.000	15.899.000.000
				3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	750.000.000
				URUSAN PERPUSTAKAAN	**4.798.575.283**	**4.857.375.283**	**5.362.015.144**
				1. Program Pembinaan Perpustakaan	701.552.000	684.580.000	764.580.000
				2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	33.178.000	50.120.000	50.120.000
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.063.875.283	4.122.675.283	4.547.315.144
	Sasaran 5: Meningkatnya riset dan inovasi	**Kapabilitas inovasi**	**Prioritas 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM**		**300.000.000**	**280.800.000**	**355.800.000**
				URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**300.000.000**	**280.800.000**	**355.800.000**
				1. Program Riset Dan Inovasi Daerah	300.000.000	280.800.000	355.800.000
	Sasaran 6: Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Prioritas 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi**		**27.808.762.085**	**36.650.656.085**	**47.409.374.475**
				URUSAN TENAGA KERJA	**-**	**1.371.692.500**	**2.244.784.000**
				1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-	-
				2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	1.185.192.500	1.878.419.000
				3. Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	74.579.000
				4. Program Hubungan Industrial	-	186.500.000	291.786.000
				URUSAN PERINDUSTRIAN	**-**	**229.639.000**	**570.453.400**

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	229.639.000	508.953.400
				2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	7.500.000
				3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	-	54.000.000
				URUSAN PERDAGANGAN	**13.261.603.909**	**13.311.546.409**	**14.707.116.899**
				1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	-	14.500.000
				2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	362.455.400	362.455.400	562.305.200
				3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	11.873.233
				4. Program Pengembangan Ekspor	-	-	-
				5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	29.081.500
				6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-	-	301.523.600
				7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.899.148.509	12.949.091.009	13.787.833.366
				URUSAN PARIWISATA	**5.518.731.891**	**5.880.081.891**	**9.427.913.891**
				1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	350.866.000	275.866.000	588.366.000
				2. Program Pemasaran Pariwisata	105.000.000	300.000.000	1.409.777.000
				3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	5.000.000	5.000.000
				4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	15.000.000	95.000.000	545.000.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.047.865.891	5.204.215.891	6.879.770.891
				URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
				1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	4.000.000	4.000.000	4000000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**3.251.671.452**	**9.839.621.452**	**12.621.651.452**
				1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	7.940.800	7.940.800	7.940.800
				2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000	10.800.000	38.660.000
				3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	1.840.000.000	2.099.991.000
				5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	40.000.000	575.000.000	647.140.000
				6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	84.000.000	84.000.000	84.000.000
				7. Program Pengembangan UMKM	24.000.000	4.200.500.000	5.929.900.000
				8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.990.730.652	3.096.380.652	3.789.019.652
				URUSAN PENANAMAN MODAL	**5.772.754.833**	**6.014.074.833**	**7.833.454.833**
				1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	35.000.000	50.000.000	150.000.000
				2. Program Promosi Penanaman Modal	65.000.000	65.000.000	265.000.000
				3. Program Pelayanan Penanaman Modal	100.500.000	100.500.000	326.500.000
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	35.000.000	35.000.000	37.500.000
				5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.532.254.833	5.758.574.833	7.049.454.833
	Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Prioritas 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi**		**18.318.940.990**	**34.008.322.990**	**37.184.574.752**
				URUSAN PANGAN	**70.000.000**	**90.000.000**	**125.000.000**
				1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-
				2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan	55.000.000	75.000.000	110.000.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	kemandirian pangan			Ketahanan Pangan Masyarakat			
				3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	**95.000.000**	**263.000.000**	**328.000.000**
				1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	55.000.000	223.000.000	283.000.000
				2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	15.000.000	15.000.000	20.000.000
				3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				URUSAN PERTANIAN	**17.899.860.990**	**32.218.380.990**	**29.754.866.990**
				1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	292.557.600	10.395.057.600	13.078.058.500
				2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.000.000	3.446.248.400	3.811.797.400
				3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.000.000	85.000.000	90.000.000
				4. Rogram Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	24.442.400	174.442.400	129.442.400
				5. Program Penyuluhan Pertanian	10.000.000	382.771.600	412.791.600
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.509.860.990	17.734.860.990	12.232.777.090
				URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**254.080.000**	**1.436.942.000**	**6.976.707.762**
				1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	254.080.000	1.436.942.000	6976707762
TJ 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata		**Tingkat Kemiskinan**			**168.954.556.831**	**181.534.704.831**	**232.646.285.835**
	Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi	**Indeks gini**	**Prioritas 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur**		**168.954.556.831**	**181.534.704.831**	**232.646.285.835**
				URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**106.355.246.399**	**114.391.037.049**	**154.685.486.224**
				1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	251.200.000	2.020.000.000	2.621.000.000

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	ketimpangan pendapatan			2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	56.000.000	558.934.000	876.380.950
				3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	600.000.000	1.142.000.000
				4. Program Penataan Bangunan Gedung	1.448.907.000	3.808.907.000	9.173.576.646
				5. Program Penyelenggaraan Jalan	85.011.147.300	81.474.051.600	111.894.865.079
				6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	100.000.000	125.000.000
				7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	136.800.000	1.637.200.000	2.137.700.000
				8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.451.192.099	24.191.944.449	26.714.963.549
				URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**429.280.000**	**1.397.627.350**	**1.584.627.350**
				1. Program Pengembangan Perumahan	-	140.000.000	140.000.000
				2. Program Kawasan Permukiman	-	645.000.000	705.000.000
				3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-
				4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	429.280.000	587.627.350	714.627.350
				5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	25.000.000	25.000.000
				URUSAN PERHUBUNGAN	**39.344.124.291**	**40.276.424.291**	**47.132.695.820**
				1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	33.427.967.400	32.794.667.400	38.590.977.400
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.916.156.891	7.481.756.891	8.541.718.420
				URUSAN PERTANAHAN	**-**	**433.000.000**	**537.000.000**
				1. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	-	-	-

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PAGU		
					RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				2. Program Penatagunaan Tanah	-	433.000.000	537.000.000
				URUSAN SOSIAL	**6.707.839.679**	**8.307.149.679**	**9.273.769.979**
				1. Program Pemberdayaan Sosial	1.838.559.550	68.559.550	68.559.550
				2. Program Rehabilitasi Sosial	394.425.000	419.425.000	604.337.000
				3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	436.870.000	3.724.830.000	4.006.150.300
				4. Program Penanganan Bencana	101.935.000	101.935.000	101.935.000
				5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.890.450	22.890.450	22.890.450
				6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.913.159.679	3.969.509.679	4.469.897.679
				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**16.113.566.462**	**16.724.966.462**	**19.428.206.462**
				1. Program Penataan Desa	80.000.000	80.000.000	157.800.000
				2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	65.000.000	65.000.000	65.000.000
				3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.350.000.000	3.380.000.000	4.564.840.000
				4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	7.607.600.000	8.091.000.000	8.486.960.000
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.010.966.462	5.108.966.462	6.153.606.462
				URUSAN TRANSMIGRASI	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
				1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	4.500.000	4.500.000	4.500.000
				TOTAL PAGU	**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**

Sumber: BAPPERIDA, 2026, diolah

Rekapitulasi dukungan anggaran belanja program tahun 2026 untuk masing-masing prioritas daerah, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.43.

Dukungan Anggaran Belanja Program Tahun 2026 terhadap Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp)		
		RKPD 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1.	Meningkatkan integritas kualitas SDM	1.139.489.560.472	1.163.116.850.472	1.225.744.799.255
2.	Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	46.127.703.075	70.658.979.075	84.593.949.227
3.	Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	643.611.613.775	575.760.533.275	537.792.442.755
4.	Meningkatkan Kondusifitas wilayah	16.443.323.275	21.974.858.275	33.411.491.275
5.	Mengembangkan kualitas infrastruktur	168.954.556.831	181.534.704.831	232.646.285.835
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	15.817.546.480	17.693.996.480	28.061.593.980
TOTAL ANGGARAN (Rp)		**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**

Sumber: BAPPERIDA, 2026 (diolah)

5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2026

5.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.931.019.677.319,00 atau turun sebesar Rp 52.720.245.089,00 atau turun sebesar 2,66 % jika dibandingkan dengan target penetapan Pendapatan APBD Tahun 2026 sebesar Rp 1.983.739.922.408,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44.

Rencana Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
1	**PENDAPATAN**	**1.983.739.922.408**	**1.931.019.677.319**	**-52.720.245.089**	**-2,66**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**522.598.236.818**	**534.470.723.729**	**11.872.486.911**	**2,27**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	317.987.473.000	325.487.473.000	7.500.000.000	2,36
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	178.776.456.117	184.191.227.636	5.414.771.519	3,03
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101	19.971.916.093	190.658.992	0,96
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.053.050.600	4.820.107.000	-1.232.943.600	-20,37
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.461.141.685.590**	**1.396.548.953.590**	**-64.592.732.000**	**-4,42**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.187.235.000	1.285.007.503.000	-94.179.732.000	-6,83
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590	111.541.450.590	29.587.000.000	36,10
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0,00

Sumber: BKD, 2026, diolah

5.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2026 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.45.
Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
5	**BELANJA**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**	**111.510.639.919**	**5,49**
5.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**1.598.504.688.490**	**1.720.731.283.026**	**122.226.594.536**	**7,65**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.035.949.058.068	1.034.187.761.485	-1.761.296.583	-0,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.633.771.422	592.242.048.541	109.608.277.119	22,71
5.1.05	Belanja Hibah	76.323.339.000	90.485.753.000	14.162.414.000	18,56
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.598.520.000	3.815.720.000	217.200.000	6,04
5.2	**BELANJA MODAL**	**123.364.080.418**	**174.132.323.651**	**50.768.243.233**	**41,15**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**4.718.500.000**	**-281.500.000**	**-5,63**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.718.500.000	-281.500.000	-5,63
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**303.871.153.500**	**242.668.455.650**	**-61.202.697.850**	**-20,14**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600	23.565.264.750	1.211.034.150	5,42
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	281.516.922.900	219.103.190.900	-62.413.732.000	-22,17
	Surplus (Defisit)	**-47.000.000.000**	**-211.230.885.008**	**-164.230.885.008**	**349,43**

Sumber: BKD, 2026, diolah

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2026 naik sebesar Rp. 111.510.639.919,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2026 atau naik 5,49%.

5.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Proyeksi perubahan pembiayaan tahun anggaran 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.46.
Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,34**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**50.000.000.000**	**214.230.885.008**	**164.230.885.008**	**328,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000	214.230.885.008	164.230.885.008	328,46
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**-**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,34**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: BKD, 2026, diolah

Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yaitu :

Rp 1.931.019.677.319,- + Rp 214.230.885.008,- = Rp 2.145.250.562.327,-

Secara ringkas kerangka ekonomi dan pendanaan daerah Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.47.

Kerangka Ekonomi Dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2026

Kabupaten Karanganyar

KODE REK	URAIAN	RKPD TAHUN 2026	APBD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	%
4	**PENDAPATAN**	**1.983.444.303.908**	**1.983.739.922.408**	**1.931.019.677.319**	**- 52.720.245.089**	**-2,66%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**522.598.236.818**	**522.598.236.818**	**534.470.723.729**	**11.872.486.911**	**2,27%**
4 1.1	Pajak Daerah	317.987.473.000	317.987.473.000	325.487.473.000	7.500.000.000	2,36%
4 1.2	Retribusi Daerah	178.776.456.117	178.776.456.117	184.191.227.636	5.414.771.519	3,03%
4 1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101	19.781.257.101	19.971.916.093	190.658.992	0,96%
4 1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.053.050.600	6.053.050.600	4.820.107.000	- 1.232.943.600	-20,37%
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.460.846.067.090**	**1.461.141.685.590**	**1.396.548.953.590**	**- 64.592.732.000**	**-4,42%**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.378.891.616.500	1.379.187.235.000	1.285.007.503.000	- 94.179.732.000	-6,83%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590	81.954.450.590	111.541.450.590	29.587.000.000	36,10%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	0,00%
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	0,00%
5	**BELANJA**	**2.030.444.303.908**	**2.030.739.922.408**	**2.142.250.562.327**	**111.510.639.919**	**5,49%**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.531.763.100.673**	**1.598.504.688.490**	**1.720.731.283.026**	**122.226.594.536**	**7,65%**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.049.342.686.129	1.035.949.058.068	1.034.187.761.485	- 1.761.296.583	-0,17%
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.570.244.544	482.633.771.422	592.242.048.541	109.608.277.119	22,71%
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00%
5.1.5.	Belanja Hibah	47.628.170.000	76.323.339.000	90.485.753.000	14.162.414.000	18,56%
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	222.000.000	3.598.520.000	3.815.720.000	217.200.000	6,04%
5.2.	**BELANJA MODAL**	**116.302.934.302**	**123.364.080.418**	**174.132.323.651**	**50.768.243.233**	**41,15%**
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	0,00%
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.857.721.352	19.682.238.168	26.425.816.530	6.743.578.362	34,26%
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.038.118.000	10.521.818.000	21.201.548.000	10.679.730.000	101,50%
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.368.747.300	84.945.097.300	118.045.218.849	33.100.121.549	38,97%
5.2.5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.865.980.650	7.937.589.950	8.176.728.850	239.138.900	3,01%
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	172.367.000	277.337.000	283.011.422	5.674.422	2,05%
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**4.718.500.000**	**- 281.500.000**	**-5,63%**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	4.718.500.000	- 281.500.000	-5,63%
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**377.378.268.933**	**303.871.153.500**	**242.668.455.650**	**- 61.202.697.850**	**-20,14%**
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600	22.354.230.600	23.565.264.750	1.211.034.150	5,42%
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	355.024.038.333	281.516.922.900	219.103.190.900	- 62.413.732.000	-22,17%
	DEFISIT/SURPLUS	**- 47.000.000.000**	**- 47.000.000.000**	**- 211.230.885.008**	**- 164.230.885.008**	**349,43%**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.000.000.000**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**214.230.885.008**	**164.230.885.008**	**328,46%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	50.000.000.000	214.230.885.008	164.230.885.008	328,46%
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**-**	**0,00%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	-	-	-	-	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	**47.000.000.000**	**47.000.000.000**	**211.230.885.008**	**164.230.885.008**	**349,43%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**-**	**-**	**-**	
	TOTAL APBD	**2.033.444.303.908**	**2.033.739.922.408**	**2.145.250.562.327**	**111.510.639.919**	5,48%

Sumber: BKD Kab. Karanganyar, 2026

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2026 serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun 2026.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi dan memberikan saran masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2026 ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat prioritas program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman dan arah

pelaksanaan pembangunan daerah antar pelaku pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

